

**FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA
DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**



Oleh :

Nama : Diah Ayu Kusumadewi

No Mahasiswa : 03312056

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2007**

**FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA
DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2007

**FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA
DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Diah Ayu Kusumadewi

No Mahasiswa : 03312056

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

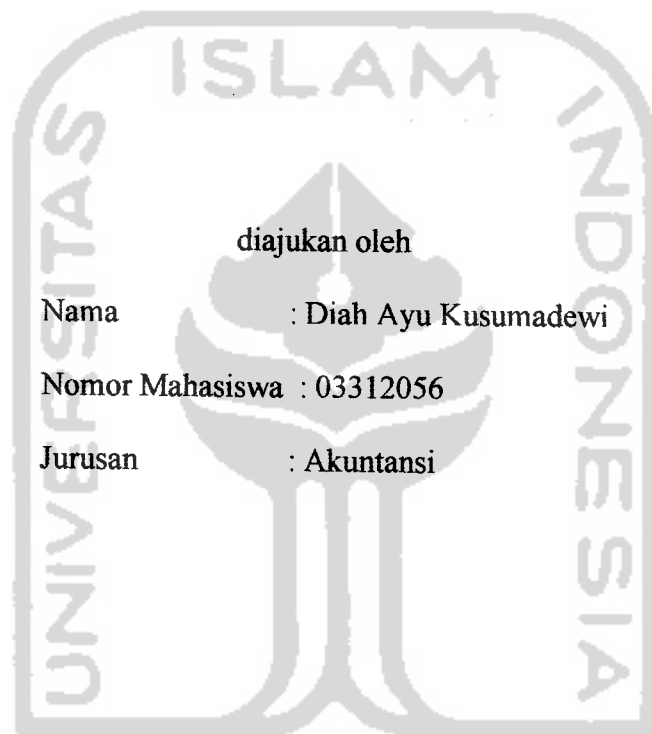
Yogyakarta,2007

Penyusun,

(Diah Ayu Kusumadewi)

**FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA
DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

Hasil Penelitian



diajukan oleh

Nama : Diah Ayu Kusumadewi

Nomor Mahasiswa : 03312056

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 4 Mei 2017

Dosen Pembimbing,

(Arief Rahman, SE, S.IP, M.Com)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Flypaper Effect Pada dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia

Disusun Oleh: DIAH AYU KUSUMADEWI
Nomor mahasiswa: 03312056

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 14 Juni 2007

Pembimbing Skripsi/Penguji : Arief Rahman, SE, M.Com

Penguji : Dra. Prapti Antarwiyati, M.Si, Ak



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S-1) di fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Asma'i Ishak, M. Bus.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
2. Ibu Dra. Erna Hidayah M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Arief Rahman, SE, S.IP, M.Com, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan petunjuk dan arahan sejak permulaan sampai dengan selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Kedua Orang Tuaku, untuk seluruh doa, kasih sayang serta pengorbanannya. Dan untuk semua yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata dan tidak dapat terbalaskan dengan apapun. Semoga Allah SWT membalas keduanya dengan kebaikan yang besar, memudahkan segala

urusannya, melapangkan hatinya dan menyelamatkan keduanya dari fitnah dunia & akhirat, Allahuma Amin.

5. Adik-adikku, Lilik dan Iman, atas canda tawanya yang walaupun kadang menyebalkan namun
6. Sahabatku “Ita” atas waktu dan kebersamaannya. Terimakasih.
7. Septa, terimakasih atas kasih sayang, kesabaran, semangat dan bantuan yang diberikan selama ini.
8. Teman-temanku senasib seperjuangan dari awal kuliah dan semoga sampai kapanpun : Nisa, Puri, Ima, Vivi. Thanks a million.
9. Teman-teman kelas B “never ending stories” : Nisa, Puri, Ima, Vivi, Hayu, Bohaiy, Galuh, Sissy, Septa, Aki, Chubby, Fatah, Nunu’, Ayik, Genjik, dan semuanya.
10. Semua pihak telah membantu penulis selama penulisan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu di sini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan karya tulis ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Berita Acara Ujian.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
Abstrak.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Masalah.....	6
1.6 Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II. KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	
2.1 Kajian Teori.....	8
2.1.1 Latar Belakang Pemberian Transfer.....	8

2.1.2	Belanja Daerah.....	12
2.1.3	Pendapatan Asli Daerah.....	13
2.1.4	Dana Alokasi Umum.....	16
2.2	Penelitian Terdahulu dan Penarikan Hipotesis.....	17
2.2.1	Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah.....	17
2.2.2	<i>Flypaper Effect</i>	18
2.2.3	<i>Flypaper Effect</i> Pada Daerah Kaya dan Miskin.....	20
BAB III. DESAIN PENELITIAN		
3.1	Populasi dan Sampel.....	21
3.2	Data dan Sumber Data.....	22
3.3	Variabel.....	22
3.3.1	Variabel Independen.....	22
3.3.2	Variabel Dependen.....	23
3.4	Tahap-tahap Analisis.....	23
3.4.1	Pengujian Terhadap Asumsi Klasik.....	23
3.4.2	Pengujian Hipotesis.....	24
BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		
4.1	Statistik Deskriptif.....	29
4.2	Uji Pengaruh PADt dan DAUt terhadap Belanja Daeraht.....	30
4.2.1	Uji Asumsi Klasik.....	30
4.2.1.1	Uji Normalitas.....	30
4.2.1.2	Uji Multikolinearitas.....	32
4.2.1.3	Uji Autokorelasi.....	32

4.2.1.4 Uji Heteroskedastisitas.....	34
4.2.2 Analisis Regresi Berganda.....	35
4.2.2.1 Uji F.....	37
4.2.2.2 Uji t.....	39
4.3 Uji Pengaruh PAD _{t-1} dan DAU _{t-1} terhadap Belanja Daeraht (lag 1 tahun).....	41
4.3.1 Uji Asumsi Klasik.....	41
4.3.1.1 Uji Normalitas.....	41
4.3.1.2 Uji Multikolinearitas.....	42
4.3.1.3 Uji Autokorelasi.....	43
4.3.1.4 Uji Heteroskedastisitas.....	44
4.3.2 Analisis Hasil Regresi (dengan lag 1 tahun).....	45
4.3.2.1 Uji F.....	48
4.3.2.2 Uji t.....	49
4.4 Analisa <i>Flypaper Effect</i> pada daerah dengan PAD tinggi dan rendah.....	51
4.4.1 Penghitungan rasio DOF dan Pengkategorian daerah.....	51
4.4.2 Statistik Deskriptif.....	52
4.4.3 Uji Asumsi Klasik.....	54
4.4.3.1 Uji Normalitas.....	54
4.4.3.2 Uji Multikolinearitas.....	55
4.4.3.3 Uji Autokorelasi.....	56
4.4.3.4 Uji Heteroskedastisitas.....	57

4.4.4	Analisa Regresi Berganda.....	59
-------	-------------------------------	----

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	62
-----	-----------------	----

5.2	Keterbatasan Penelitian.....	64
-----	------------------------------	----

5.3	Saran.....	64
-----	------------	----

REFERENSI.....	65
----------------	----

LAMPIRAN.....	67
---------------	----



DAFTAR TABEL

Uji Pengaruh PADt dan DAUt terhadap Belanja Daeraht

Tabel 4.1 Deskriptif Statistik.....	29
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	32
Tabel 4.3 Pengukuran Autokorelasi.....	33
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Autokorelasi.....	33
Tabel 4.5 Koefisien Determinasi.....	36
Tabel 4.6 Hasil Regresi Linier Berganda.....	37
Tabel 4.7 Hasil Regresi Linier Berganda untuk Uji F.....	38

Uji Pengaruh PADt-1 dan DAUt-1 terhadap Belanja Daeraht (lag 1 tahun)

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	43
Tabel 4.9 Pengujian Autokorelasi.....	44
Tabel 4.10 Koefisien Determinasi.....	46
Tabel 4.11 Hasil Regresi Linier Berganda.....	47
Tabel 4.12 Hasil Regresi Linier Berganda untuk Uji F.....	48

Analisa *Flypaper Effect* pada daerah dengan PAD tinggi dan rendah

Tabel 4.13 Deskriptif Statistik Rasio DOF.....	52
Tabel 4.14 Deskriptif Statistik daerah dengan PAD rendah.....	52
Tabel 4.15 Deskriptif Statistik daerah dengan PAD tinggi.....	53
Tabel 4.16 Korelasi antar variabel independen.....	56
Tabel 4.17 Pengujian Autokorelasi.....	57
Tabel 4.18 Koefisien Determinasi.....	60
Tabel 4.19 Hasil Regresi Linier Berganda.....	60

DAFTAR GAMBAR

Uji Pengaruh PAD_t dan DAU_t terhadap Belanja Daeraht

Gambar 4.1 Normal Probability Plot.....31

Gambar 4.2 Grafik Scatterplot.....35

Uji Pengaruh PAD_{t-1} dan DAU_{t-1} terhadap Belanja Daeraht (lag 1 tahun)

Gambar 4.3 Normal Probability Plot.....42

Gambar 4.4 Grafik Scatterplot.....45

Analisa *Flypaper Effect* pada daerah dengan PAD tinggi dan rendah

Gambar 4.5 Normal Probability Plot untuk daerah PAD rendah.....54

Gambar 4.6 Normal Probability Plot untuk daerah PAD tinggi.....55

Gambar 4.7 Grafik Scatterplot.....58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sampel Penelitian Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.....	67
Lampiran 2. Data Ringkasan Realisasi Belanja Daerah Pemda Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2001-2004.....	72
Lampiran 3. Data Ringkasan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2001-2004.....	78
Lampiran 4. Data Ringkasan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Pemda Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2001-2004.....	84
Lampiran 5. Penghitungan rasio DOF Tahun 2002.....	90
Lampiran 6. Penghitungan rasio DOF Tahun 2003.....	96
Lampiran 7. Penghitungan rasio DOF Tahun 2004.....	102

"Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia"

ABSTRAK

Pada penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisa apakah flypaper effect terjadi pada respon Pemda atas DAU dan PAD terhadap Belanja Daerahnya. Flypaper effect terjadi jika transfer Pemerintah Pusat yang dalam hal ini diperankan oleh DAU, lebih dapat mendorong daerah untuk melakukan belanja dibandingkan dengan PADnya sendiri. Flypaper effect dianalisa pada keadaan tanpa lag, dengan lag, dan pada daerah dengan PAD tinggi dan rendah.

Objek penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Indonesia dan data yang digunakan adalah data tahun 2001 sampai dengan 2004. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa flypaper effect terjadi pada respon Pemda atas DAU dan PAD terhadap Belanja Daerahnya, baik tanpa lag maupun dengan lag. Begitu pula ketika flypaper effect diujikan pada daerah dengan PAD tinggi dan daerah dengan PAD rendah, terbukti bahwa flypaper effect juga terjadi.

Keywords : Laporan realisasi APBD, DAU, PAD, Belanja Daerah, Flypaper effect, Kabupaten/Kota.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia mulai menempuh suatu babak baru dalam kehidupan masyarakatnya dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan yang terjadi setelah dikeluarkannya UU tersebut adalah setiap daerah memiliki otonomi atas kewenangan dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemerintah daerahnya masing-masing. Kebijakan otonomi tersebut dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Dimana dalam UU No.22 Tahun 1999, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bersamaan dengan itu, dikeluarkan pula UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah. Yang dimaksud dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam UU No.25 Tahun 1999 adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka Negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata acara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya (dalam Saragih,2003). Perimbangan keuangan tersebut tercermin dengan adanya dana

perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dengan adanya hak otonomi daerah yang disertai perimbangan keuangan pusat-daerah, diharapkan tiap daerah mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya.

Disamping mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam UU No.25 Tahun 1999 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Saragih (2003), dana bagi hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. DAU berperan sebagai pemerata fiskal antardaerah (fiscal equalization) di Indonesia. Sedangkan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Diluar dari ketiga fungsi tersebut, untuk secara detailnya, penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.

Namun pada praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan dana utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang

oleh Pemerintah Daerah dilaporkan di perhitungan APBD. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan penafsiran mengenai DAU oleh daerah-daerah. Dalam Saragih (2003), berbagai penafsiran tersebut diantaranya (a) DAU merupakan hibah yang diberikan pemerintah pusat tanpa ada pengembalian, (b) DAU tidak perlu dipertanggungjawabkan karena DAU merupakan konsekuensi dari penyerahan kewenang atau tugas-tugas umum pemerintahan ke daerah, (c) DAU harus dipertanggungjawabkan, baik ke masyarakat lokal maupun ke pusat, karena DAU berasal dari dana APBN.

Beberapa peneliti menemukan respon Pemda berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak). Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri, maka disebut *flypaper effect* (Oates, 1999 dalam Halim 2003). Abdul Halim dan Sukriy Abdullah pernah melakukan pengujian adanya *flypaper effects* pada belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa *flypaper effect* terjadi pada DAU periode t-1 terhadap Belanja Daerah periode t. Namun hasil penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah Indonesia. Karena menurut Halim(2002) Pemda kabupaten/kota di Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan Pemda kabupaten/kota di luar Jawa-Bali. Menanggapi hal tersebut, Mutiara Maimunah melakukan penelitian yang sama pada Pemda kabupaten/kota di pulau Sumatra pada tahun 2003 dan 2004. Hasil yang diperoleh

konsisten dengan penelitian Abdul Halim dan Sukriy Abdullah yaitu DAU periode $t-1$ memiliki pengaruh lebih besar dari pada PAD periode $t-1$ terhadap Belanja Daerah periode t . Namun ketika diuji pengaruh DAUt dan PADt secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah t , hasilnya PAD tidak signifikan dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Melihat dua penelitian sebelumnya yang hanya terbatas pada wilayah bagian barat Indonesia, peneliti tertarik untuk melengkapi kedua penelitian tersebut dengan melakukan penelitian untuk keseluruhan kabupaten/kota di Indonesia. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja Daerah di Indonesia. Sehingga penulis mengambil judul **"FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA"**.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian seperti ini di Indonesia telah dilakukan oleh Abdul Halim dan Sukriy Abdullah pada tahun 2003 dengan mengamati pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Berikutnya, penelitian sejenis dilakukan lagi oleh Mutiara Maimunah pada tahun 2006 pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Penelitian tersebut menggunakan populasi data yang tidak mencakup seluruh propinsi di Indonesia dan

menggunakan data *cross-section* sehingga tidak dapat diamati perubahannya dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini saya akan mencermati masalah:

1. Apakah DAU dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia?
2. Antara DAU dan PAD, manakah yang berpengaruh paling signifikan terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia?
3. Apakah terjadi *flypaper effect* dalam kurun waktu 2001 – 2004?
4. Apakah *flypaper effect* terjadi pada daerah dengan PAD tinggi atau daerah dengan PAD rendah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Menguji apakah DAU dan PAD memiliki pengaruh terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Mengetahui apakah *flypaper effect* terjadi pada belanja pemerintah Kabupaten/Kota.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris mengenai penerapan sistem perimbangan daerah yang tengah berjalan dan dapat dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai khazanah pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan menggunakan sampel kabupaten dan kota untuk mengetahui adanya *flypaper effect*. *Flypaper effect* merupakan suatu kondisi dimana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berpengaruh lebih signifikan terhadap belanja daerah dibandingkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk melihat ada tidaknya *flypaper effect* dengan membandingkan antara pengaruh Dana Alokasi Umum (sebagai transfer) dan pengaruh antara Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah.

1.6 Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika pembahasan.

BAB III : LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang penjabaran teori yang digunakan sebagai acuan untuk membahas masalah yang diangkat, meliputi: Desentralisasi Latar Belakang Pemberian Transfer, Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, serta hasil penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

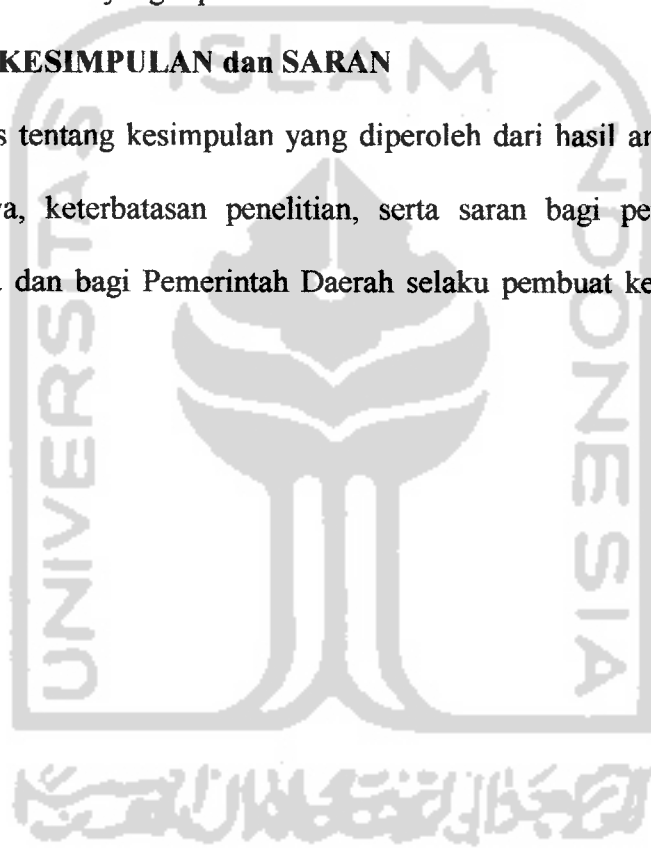
Menguraikan tentang populasi dan pemilihan sampel, data dan sumber data, identifikasi variabel dan tahap-tahap analisis yang dilakukan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis atas hipotesis yang dibuat dan pembahasan hasil yang diperoleh.

BAB V : KESIMPULAN dan SARAN

Membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, serta saran bagi penelitian sejenis berikutnya dan bagi Pemerintah Daerah selaku pembuat kebijakan belanja daerah.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Teori

2.1.1. Latar Belakang Pemberian Transfer

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah (untuk mendukung fungsi atau tugas pelayanan publik) sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003). Hal ini merupakan konsekuensi adanya otonomi daerah, dimana otonomi daerah menurut UU No.22 tahun 1999 adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

HM. Aries Djaenuri (1999) dalam Saragih (2003) mengemukakan empat model hubungan keuangan pusat dan daerah yang dapat dijadikan sebagai alternatif pendekatan, yaitu :

- (a) *By percentage*. Yaitu distribusi penerimaan atas PBB, royalti, *land rent* di bidang kehutanan dan pertambangan umum serta pertambangan migas dimana sebagian hasilnya diberikan kepada daerah menggunakan persentase tertentu
- (b) *By origin*. Yaitu distribusi penerimaan ke daerah berdasarkan pada asal sumber penerimaan
- (c) *By formula*. Yaitu distribusi penerimaan ke daerah berdasarkan pada suatu formula atau melibatkan faktor-faktor tertentu

(d) *By ad hoc grants*. Yaitu transfer keuangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan pada prioritas nasional atau dasar alokasi lain yang ditujukan untuk tujuan tertentu untuk satu tahun anggaran tertentu.

Berdasarkan model diatas, maka pendekatan yang digunakan di Indonesia dalam merumuskan dana perimbangan yaitu *by percentage* untuk dana bagi hasil, *by formula* untuk Dana Alokasi Umum (*block grant*), dan *by ad hoc grants* atau *special grant* untuk Dana Alokasi khusus.

Dalam pelaksanaan desentralisasi, peran transfer tidak dapat dihindarkan mengingat otonomi yang dilimpahkan menuntut daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Hal ini tentu saja mengakibatkan biaya yang harus dikeluarkan daerah dalam mengemban urusan pemerintahan daerah lebih banyak dibanding sebelum otonomi.

Transfer pemerintah pusat kepada daerah dapat dibedakan menjadi bagi hasil (*revenue sharing*) dan bantuan (*grants*). *Grants* sendiri dapat dikelompokkan menjadi *block grant* (besarnya ditentukan berdasarkan formula) dan *special grant* (ditentukan berdasarkan pendekatan kebutuhan yang sifatnya insidental dan mempunyai fungsi khusus). Dalam dana perimbangan yang diterapkan di Indonesia, Dana bagi hasil berperan sebagai *revenue sharing*, Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai *block grant* dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai *special grant*.

Dalam Sidik et al (2002) dan BPPK Departemen Keuangan (2004) dikemukakan tujuan transfer, yaitu :

a. Pemerataan vertikal (*vertical equalization*)

Pemerintah Pusat menguasai sebagian besar sumber-sumber penerimaan (pajak) utama negara. Sedangkan, pemerintah daerah hanya menguasai sebagian kecil sumber-sumber penerimaan negara, atau hanya berwenang untuk memungut pajak-pajak lokal. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*). Yang dimaksud ketimpangan vertikal yaitu ketimpangan yang terjadi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana pemerintah pusat begitu mendominasi penerimaan pajak dan sumber daya alam daerah. Akibatnya, daerah dengan sumber daya alam yang melimpah tidak dapat sepenuhnya merasakan hasil kekayaan daerah mereka sendiri. Kondisi inilah yang akan diatasi dengan menggunakan dana perimbangan, khususnya dana bagi hasil. Dimana daerah penghasil penerimaan (baik pajak maupun sumber daya alam) akan mendapat porsi yang lebih besar dalam bagi hasil penerimaan umum (*general revenue sharing*).

2. Pemerataan horizontal (*Horizontal equalization*)

Kemampuan Daerah untuk menghasilkan pendapatan sangat bervariasi tergantung kondisi daerah bersangkutan. Hal ini berimplikasi pada kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) di daerah yang bersangkutan. Di samping itu, tiap daerah juga memiliki kebutuhan belanja yang berbeda-beda tergantung pada jumlah penduduk, proporsi penduduk, dan keadaan geografis daerah. Hal ini berimplikasi pada bervariasinya kebutuhan fiskal (*fiscal need*) di daerah-daerah bersangkutan.

Selisih antara kebutuhan fiskal dan kemampuan fiskal daerah disebut dengan celah fiskal (fiscal gap). Celah fiskal inilah yang akan ditutup dengan transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk DAU.

3. Menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah

Setiap daerah memiliki kemampuan yang bervariasi dalam menyediakan pelayanan umum untuk masyarakatnya, hal ini terutama karena perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh tiap daerah. Sementara itu, standar pelayanan minimum untuk tiap Pemerintah daerah di Indonesia sama dan harus tetap dijaga. Oleh karena itu Pemerintah Pusat harus menjamin standar pelayanan umum di tiap daerah dengan memberikan subsidi.

4. Mengatasi persoalan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya efek pelayanan publik

Setiap jenis pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Daerah tertentu tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di daerah yang bersangkutan saja. Misalnya, pendidikan tinggi, pemadam kebakaran, jalan raya antar daerah, dan rumah sakit daerah, tidak bisa dibatasi manfaatnya hanya untuk masyarakat daerah tertentu saja. Namun tanpa adanya imbalan (dalam bentuk pendapatan), Pemerintah Daerah biasanya enggan berinvestasi dalam hal tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat perlu memberikan semacam insentif ataupun menyerahkan sumber-sumber keuangan agar pelayanan-pelayanan publik demikian dapat dipenuhi oleh daerah.

5. Stabilisasi

Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan transfer sebagai stabilizer pada saat aktivitas ekonomi daerah lesu ataupun pada saat aktivitas ekonomi meningkat. Pada saat aktivitas perekonomian daerah sedang lesu, pemberian transfer dapat ditingkatkan, dan sebaliknya pada saat perekonomian meningkat pemberian transfer dapat dikurangi. Namun, dalam melakukan hal ini diperlukan kecermatan dalam mengkalkulasi penurunan dan peningkatan transfer dan menentukan saat yang tepat dalam melakukan penurunan dan peningkatan transfer tersebut agar tidak berakibat merusak atau bertentangan dengan tujuan stabilisasi.

2.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah menurut PP nomor 105 tahun 2000 adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam satu periode anggaran. Belanja pemerintah daerah dalam APBD dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi. Belanja operasi merupakan jenis belanja yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik Contohnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
- b. Belanja Modal. Jenis belanja ini merupakan belanja yang manfaatnya dapat diperoleh lebih dari satu tahun dan dilakukan untuk menambah aset atau kekayaan daerah, yang mana dari aset atau kekayaan tersebut akan

menimbulkan belanja lainnya. Contoh dari jenis belanja ini adalah belanja tanah, peralatan, jalan, gedung, dan lain-lain.

- c. Belanja tak terduga. Yaitu belanja tidak tersangka adalah belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah

2.1.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam UU No.25, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a. Hasil pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut undang-undang tersebut jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Propinsi yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Sedangkan jenis pajak daerah untuk kabupaten terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C.

b. Hasil retribusi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada pasal 18 ayat 2 UU tersebut disebutkan ada tiga golongan retribusi daerah yaitu :

1. Retribusi jasa umum. Yaitu retribusi atas jasa yang diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Contoh dari retribusi ini adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, dan lain-lain.
2. Retribusi Jasa Usaha. Yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Contoh dari retribusi ini adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi tempat pelelangan, dan lain-lain.
3. Retribusi perizinan tertentu. Yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau

badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasaranan, sarana/fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Contohnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), retribusi Izin Gangguan, retribusi izin trayek, dan lain-lain.

- c. Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan

Yang termasuk dalam jenis pendapatan ini yaitu deviden atau bagian laba yang diperoleh oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibagikan bagi pemegang saham, dalam hal ini merupakan pendapatan bagi Pemerintah daerah (Bastian, 2001).

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Yang tergolong dalam jenis pendapatan ini antara lain pendapatan bunga deposito, jasa giro, hasil penjualan surat berharga investasi, pendapatan dari ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah, denda, penggantian biaya, dan lain-lain.

2.1.4. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut UU No.25 Tahun 1999 adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN. Kemudian, dari 25 % tersebut dibagi lagi menjadi 90% untuk DAU bagi daerah Kabupaten/Kota dan 10% untuk DAU bagi daerah Propinsi. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, DAU berperan sebagai transfer yang bersifat *block grants*. Artinya, besarnya DAU ditentukan oleh suatu formula khusus. Formula untuk menghitung besarnya DAU yaitu :

a. DAU untuk Propinsi

$$DAU = \text{Jumlah DAU untuk Pr opinsi} \times \frac{\text{Bobot Pr opinsi yang bersangkutan}}{\text{Jumlah bobot seluruh Pr opinsi}}$$

b. DAU untuk daerah Kabupaten/Kota

$$DAU = \text{Jumlah DAU untuk Kabupaten/ Kota} \times \frac{\text{Bobot Kabupaten/ Kota yang bersangkutan}}{\text{Jumlah bobot seluruh Kabupaten/ Kota}}$$

Dimana formula untuk menghitung Bobot DAU daerah adalah

$$\text{Bobot DAU Daerah} = \frac{\text{KebutuhanDAU Daerah}}{\text{Total KebutuhanDAU seluruhdaerah}}$$

Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, salah satu tujuan transfer adalah pemerataan horizontal (*horizontal equalization*) yaitu dengan menutup celah fiskal (*fiscal gap*) yang berada diantara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. Tujuan transfer tersebut yang akan dipenuhi melalui DAU. Dimana kebutuhan DAU suatu daerah merupakan selisih antara kebutuhan daerah dengan potensi penerimaan daerah.

$$\text{Kebutuhan DAU} = \text{Kebutuhan Daerah} - \text{Potensi Penerimaan Daerah}$$

Kebutuhan Daerah dihitung dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, indeks harga bangunan, dan jumlah penduduk miskin. Sedangkan potensi penerimaan daerah dapat diketahui dengan memperhatikan variabel-variabel potensi yaitu PDRB sektor sumber daya alam (primer), PDRB sektor industri dan jasa lainnya (non-primer), dan besarnya angkatan kerja.

2.2. Penelitian terdahulu dan penarikan hipotesis

2.2.1. Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah

Penelitian mengenai pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah sudah pernah dilakukan diantaranya oleh Aziz et al, 2000; Blackley, 1986; Joulfaian dan Mokeerjee, 1990; Legrenzi dan Milas, 2001; von Furstenberg et al, 1986 dalam Sukriy dan Halim (2003). Dalam beberapa penelitian, hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah mempengaruhi anggaran belanja Pemerintah daerah disebut dengan *tax-spend hypothesis*. Hipotesis ini mengandung

makna bahwa kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja daerah disesuaikan dengan pendapatan daerah yang diterima.

Namun di sisi lain, transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat juga turut mempengaruhi besarnya anggaran belanja daerah yang akan dianggarkan oleh Pemerintah Daerah. Legrensi dan Milas (2001) dalam Maimunah (2005) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel *municipalities* di Italia dan memperoleh hasil bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja Daerah. Kebijakan-kebijakan belanja daerah jangka pendek yang dibuat Pemerintah daerah sangat bergantung pada transfer yang diterima. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H_{A1} DAU dan PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah

2.2.2. *Flypaper Effect*

Oates (1999) dalam Sukriy dan Halim (2003) menyatakan bahwa beberapa penelitian mengenai perilaku Pemerintah Daerah dalam merespon transfer Pemerintah Pusat yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa respon Pemda berbeda untuk transfer dan pendapatan daerahnya sendiri. Ketika respon Pemerintah Daerah lebih besar untuk transfer dibanding pendapatan daerahnya sendiri maka disebut *flypaper effect*.

Penelitian tentang analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) di Indonesia sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Abdul Halim dan Sukriy Abdullah yaitu pada Pemerintah kabupaten/kota di pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Hasil

penelitian pada kabupaten/kota di Jawa dan Bali menunjukkan bahwa secara terpisah, DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, baik dengan lag maupun tanpa lag. Ketika tanpa menggunakan lag, pengaruh PAD terhadap belanja daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi dengan digunakan lag, pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah justru lebih kuat daripada PAD. Hal ini berarti terjadi *flypaper effect* dalam respon Pemda terhadap DAU dan PAD (Sukriy dan Halim, 2004). Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa stimulus untuk melakukan Belanja Daerah pada tahun t dipengaruhi oleh transfer pemerintah pusat yang diterima daerah periode $t-1$.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Maimunah (2006) dengan mengambil sampel pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Hasil penelitian yang dilakukan Mutiara Maimunah menunjukkan bahwa secara terpisah maupun serempak, DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah, baik tanpa lag maupun dengan lag. Ketika diregres secara serempak baik dengan maupun tanpa lag, pengaruh DAU terhadap BD lebih kuat daripada pengaruh PAD. Ini berarti telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Sumatera (Maimunah, 2006). Berdasarkan penelitian-penelitian yang ada, maka hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya *flypaper effect* adalah:

H_{A2} Pengaruh DAU_t terhadap BD_t lebih besar daripada pengaruh PAD_t terhadap BD_t

H_{A3} Pengaruh DAU_{t-1} terhadap BD_t lebih besar daripada pengaruh PAD_{t-1} terhadap BD_t

2.2.3. *Flypaper Effect* Pada Daerah Kaya dan Miskin

Pada penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (2006) diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan terjadinya *flypaper effect* baik pada daerah yang PAD-nya tinggi maupun pada daerah yang PAD-nya rendah (yang diukur melalui rasio DOF masing-masing daerah) di Kabupaten/Kota di pulau Sumatera. Ini berarti *flypaper effect* yang terjadi pada daerah kaya PAD tidak berbeda dengan *flypaper effect* yang terjadi pada daerah miskin PAD. Atau dengan kata lain, *flypaper effect* tidak hanya terjadi pada daerah miskin PAD, namun juga daerah kaya PAD. Berdasarkan pada hal tersebut maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut

H_{A4} Daerah dengan PAD rendah dan PAD tinggi mengalami *flypaper effect*

BAB III

DESAIN PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek yang akan diteliti dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, jumlah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia adalah sebanyak 349 Kabupaten dan 91 Kota (sumber : BPS). Dikarenakan kondisi Indonesia selama kurun waktu penelitian (tahun 2001 sampai dengan 2004) mengalami perubahan jumlah daerah akibat penggabungan, penghapusan dan pembentukan daerah baru, maka sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu daerah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Daerah kabupaten/kota yang sudah ada dan tidak mengalami perubahan dari tahun 2001 sampai dengan 2004.
2. Ketersediaan data laporan realisasi APBD dari tahun 2001 sampai dengan 2004.

Dengan mengacu pada dua kriteria tersebut, diperoleh data sebanyak 270 daerah kabupaten/kota yang tersebar di 30 Propinsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, hanya 225 daerah saja yang dapat digunakan sebagai sampel dalam penelitian. Hal ini dikarenakan sebanyak 45 daerah kabupaten/kota memiliki nilai PAD, DAU, dan Belanja Daerah yang ekstrim yang dapat mengganggu generalisasi hasil

penelitian, sehingga harus dikeluarkan dari penelitian. Daerah-daerah kabupaten dan kota yang menjadi sampel dalam penelitian ini disajikan dalam lampiran 1

3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung, namun melalui media yang menerbitkannya. Data yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah yang terdapat pada laporan realisasi APBD kabupaten/kota di Indonesia tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, yang diperoleh melalui situs departemen keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (www.djapk.go.id).

3.3 Variabel

3.3.1. Variabel independen

Variabel independen atau penjelas dalam penelitian ini adalah

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang berasal dari sumber ekonomi daerah.

3.3.2. Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah. Belanja Daerah menurut PP nomor 105 tahun 2000 adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam satu periode anggaran.

3.4 Tahap-Tahap Analisis

3.4.1 Pengujian terhadap Asumsi klasik

Agar model regresi yang digunakan menunjukkan persamaan yang mempunyai hubungan yang valid atau BLUE (*best linear unbiased estimator*) model tersebut harus memnuhi asumsi-asumsi dasar klasik regresi. Asumsi-asumsi tersebut adalah normalitas, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terdapat autokorelasi, dan tidak ada heteroskedastisitas. Oleh karena itu pengujian asumsi klasik perlu dilakukan.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi tersebut variabel pengganggu atau residual terdistribusi secara normal atau tidak.

b. Uji multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan adanya hubungan yang kuat antar variable-variabel independent dalam persamaan regresi. Adanya multikolinearitas ini berdampak pada ketidaktepatan estimasi yang mengarahkan pada kesimpulan menerima hipotesa null (Ghozali, 2001). Multikolinearitas dapat

diketahui dari tingginya hubungan korelasi antar variabel bebas atau variabel independent dalam model.

c. Uji autokorelasi

Autokorelasi yaitu suatu keadaan dimana dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode observasi dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi biasa muncul bila data yang digunakan adalah data runtut waktu (*time series data*). Adanya autokorelasi dapat diketahui dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Uji ini telah tersedia dalam program SPSS yang digunakan peneliti.

d. Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas adalah tidak konstannya atau berubah-ubahnya varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Sebaliknya jika variance dari satu pengamatn ke pengamatan yang lain konstan maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas (Imam Ghozali, 2005).

3.4.2 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesa, alat analisis yang digunakan adalah Regresi Berganda.

Model yang digunakan adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dengan :

Y = Belanja daerah

α = konstanta

β_1, β_2 = koefisien korelasi

X_1 = PAD

X_2 = DAU

- a. Untuk mengetahui apakah variabel DAU dan PAD secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah (H_1), maka dilakukan uji F.

Hipotesa yang akan diuji melalui uji F ini yaitu

$H_{o1} : \beta_1 = \beta_2 = 0$; Variabel PAD dan DAU secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

$H_{a1} : \beta_1 = \beta_2 \neq 0$; Variabel PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

Uji F dilakukan dengan membandingkan *P Value* f hitung yang dihasilkan dari model regresi tersebut dengan derajat signifikansinya (α) yaitu 0,05. Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan hipotesa diatas adalah jika *P Value* f hitung $< \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka H_o ditolak. Dimana mempunyai makna bahwa variabel PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

- b. Untuk mengetahui manakah yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap Belanja Daerah antara variabel DAU dan PAD (H_2) digunakan uji t.

Hipotesa yang akan diuji melalui uji t ini yaitu:

$H_{o2} : \beta_1 = 0$; Variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

$H_{a2} : \beta_1 \neq 0$; Variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

$H_{02} : \beta_2 = 0$; Variabel DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$; Variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

Uji t dilakukan dengan membandingkan *P Value* t hitung yang dihasilkan oleh masing-masing variabel independen dalam persamaan regresi di atas dengan derajat signifikansinya (α) yaitu 0,05. Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan hipotesa diatas yaitu jika *P Value* t hitung $< \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak. Untuk mengetahui adanya flypaper effect maka *P Value* t hitung DAU harus lebih signifikan (lebih kecil) daripada *P Value* t hitung PAD, atau *P Value* t hitung PAD tidak signifikan.

- c. Untuk mengetahui manakah diantara PAD periode sebelumnya dan DAU periode sebelumnya yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap Belanja Daerah (H_3), digunakan persamaan :

$$Y_t = \alpha + \beta_1 X_{1t-1} + \beta_2 X_{2t-1} + e$$

Dengan :

Y_t = Belanja daerah periode t

α = konstanta

β_1, β_2 = koefisien korelasi

X_{1t-1} = PAD periode t-1

X_{2t-1} = DAU periode t

Hipotesa yang akan diuji yaitu:

$H_{03} : \beta_1 = 0$; Variabel PAD_{t-1} tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah_t

$H_{03} : \beta_1 \neq 0$; Variabel PAD_{t-1} berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah_t

$H_{03} : \beta_2 = 0$; Variabel DAU_{t-1} tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah_t

$H_{03} : \beta_1 \neq 0$; Variabel DAU_{t-1} berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah_t

Kemudian dilakukan uji t dengan membandingkan *P Value* t hitung yang dihasilkan oleh masing-masing variabel independen dalam persamaan regresi di atas dengan derajat signifikansinya (α) yaitu 0,05. Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan hipotesa diatas yaitu jika *P Value* t hitung $< \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak. Untuk mengetahui adanya flypaper effect maka *P Value* t hitung DAU_t harus lebih kecil daripada *P Value* t hitung PAD_t , atau *P Value* t hitung PAD tidak signifikan.

- d. Untuk menguji Hipotesis keempat, daerah kabupaten/kota yang menjadi sampel dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi kategori daerah dengan PAD tinggi dan daerah dengan PAD rendah. Dasar dari pengklasifikasian ini adalah nilai persentase dari DOF (derajat otonomi fiskal) masing-masing daerah. Rasio DOF ini dapat dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah yang bersangkutan.

Formula untuk menghitung rasio DOF ini adalah :

$$DOF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Kemudian, untuk menguji hipotesis keempat, daerah dengan DOF rendah dan daerah dengan DOF tinggi masing-masing dibuat regresinya dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dengan :

Y = Belanja daerah

α = konstanta

β_1, β_2 = koefisien korelasi

X_1 = PAD

X_2 = DAU

Kemudian dilakukan uji t dengan membandingkan *P Value* t hitung yang dihasilkan oleh masing-masing variabel independen dalam persamaan regresi di atas dengan derajat signifikansinya (α) yaitu 0,05. Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan hipotesa diatas yaitu jika *P Value* t hitung $< \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak. Untuk mengetahui adanya flypaper effect maka *P Value* t hitung DAU harus lebih kecil daripada *P Value* t hitung PAD, atau *P Value* t hitung PAD tidak signifikan.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan disajikan analisa adanya *flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.

4.1 Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif untuk variabel variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel dependen yaitu Belanja Daerah dari tahun 2001 sampai dengan 2004 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Deskriptif statistik
(000 rupiah)

	PAD	DAU	BD
<u>Tahun 2001</u>			
Rata-rata	12.676.656.844	161.239.138.311	185.749.834.356
Median	8.089.120.000	145.652.400.000	172.799.470.000
Tertinggi	574.640.000	37.179.120.000	45.689.340.000
Terendah	100.680.640.000	479.574.010.000	563.153.900.000
Jumlah sampel	225	225	225
<u>Tahun 2002</u>			
Rata-rata	17.986.872.133	184.025.275.067	225.004.949.511
Median	12.359.310.000	169.656.740.000	204.330.720.000
Tertinggi	1.600.760.000	64.550.000.000	69.676.200.000
Terendah	123.310.170.000	521.753.730.000	822.273.040.000
Jumlah sampel	225	225	225
<u>Tahun 2003</u>			
Rata-rata	20.821.149.289	207.771.912.044	282.264.133.956
Median	15.573.350.000	190.300.000.000	261.158.000.000
Tertinggi	1.975.270.000	82.083.690.000	84.696.820.000
Terendah	148.921.780.000	522.266.190.000	803.164.130.000

Tabel 4.1 (Lanjutan)

Deskriptif statistik

(000 rupiah)

	PAD	DAU	BD
Jumlah sampel	225	225	225
Tahun 2004			
Rata-rata	22.156.211.600	208.272.765.733	286.278.250.267
Median	16.356.100.000	192.376.250.000	258.777.880.000
Tertinggi	2.167.140.000	58.323.610.000	99.045.650.000
Terendah	166.260.110.000	591.852.180.000	974.948.090.000
Jumlah sampel	225	225	225

Sumber : Hasil pengolahan data

4.2 Uji Pengaruh PADt dan DAUt terhadap Belanja Daeraht

Pada bagian ini akan dijelaskan analisa data untuk mengetahui pengaruh PADt dan DAUt terhadap Belanja Daeraht. Data yang digunakan yaitu data PAD, DAU dan Belanja Daerah Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2002 sampai dengan 2004.

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

Uji ini berkaitan dengan ada tidaknya normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas dalam model regresi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik tersebut agar hasil kesimpulannya tidak menimbulkan nilai bias.

4.2.1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi tersebut variabel pengganggu atau residual terdistribusi secara normal atau tidak.

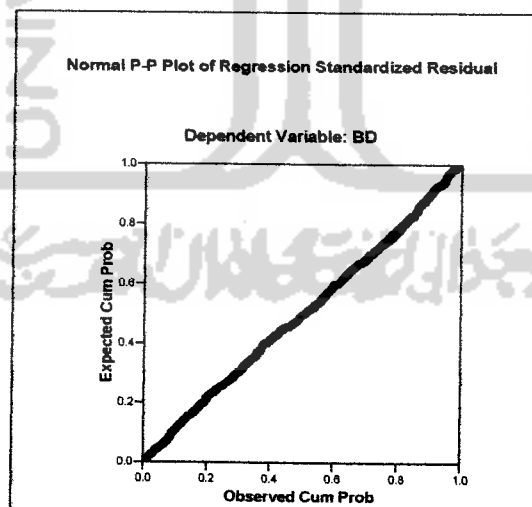
Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan menggunakan grafik *normal probability plot*. Untuk mengambil keputusan normal tidaknya distribusi residual digunakan dasar berikut :

1. Jika titik-titik pada *normal probability plot* menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika titik-titik pada *normal probability plot* menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berikut ini gambar *normal probability plot* yang dihasilkan menggunakan program SPSS.

Gambar 4.1

Normal Probability Plot



Sumber : Hasil pengolahan data

Dari gambar 4.1 di atas dapat dilihat bahwa data menyebar mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut telah memenuhi asumsi normalitas.

4.2.1.2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana terdapat hubungan yang kuat antar variable-variabel independen dalam persamaan regresi. Multikolineritas dapat mengakibatkan ketidaktepatan estimasi yang mengarahkan pada kesimpulan menerima hipotesa null (Ghozali, 2005). Menurut Ghozali, multikolinearitas terjadi jika korelasi antar variabel independennya tinggi (di atas 0,9). Hasil uji multikolinearitas menggunakan program SPSS 12.0 dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Hasil Pengujian Multikolineritas

Coefficient Correlations ^a				
Model			DAU	PAD
1	Correlations	DAU	1,000	-,548
		PAD	-,548	1,000
	Covariances	DAU	,000	,000
		PAD	,000	,004

a. Dependent Variable: BD

Sumber : Hasil pengolahan data

Dari tabel 4.2 di atas diketahui nilai korelasi antara variabel PAD dan DAU dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 jauh dibawah 0.9 (<0.9). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi yang dibangun tidak mengandung masalah multikolinearitas.

4.2.1.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*).

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah menggunakan Uji Durbin – Watson. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi di dasarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Pengukuran Autokorelasi

Dw	Kesimpulan
Kurang dari 1,08	Ada autokorelasi
1,08 sampai dengan 1,66	Tanpa kesimpulan
1,66 sampai dengan 2,34	Tidak ada autokorelasi
2,34 sampai dengan 2,92	Tanpa kesimpulan
lebih dari 2,92	Ada autokorelasi

Sumber : Algifari (2000 : 89)

Dengan menggunakan program SPSS versi 12.0 diperoleh nilai Durbin Watson pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4

Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,978 ^a	,956	,956	2,449E+10	1,866

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD
b. Dependent Variable: BD

Sumber : Hasil pengolahan data

Tampak pada tabel diatas, nilai Durbin Watson yaitu 1,866. Jika dibandingkan dengan tabel 4.3, diketahui bahwa nilai ini berada diantara 1,66 sampai dengan 2,34, yang berarti tidak ada autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibangun bebas dari masalah autokorelasi.

4.2.1.4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah tidak konstannya atau berubah-ubahnya varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Sebaliknya jika variance dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain konstan maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas (Imam Ghazali, 2005).

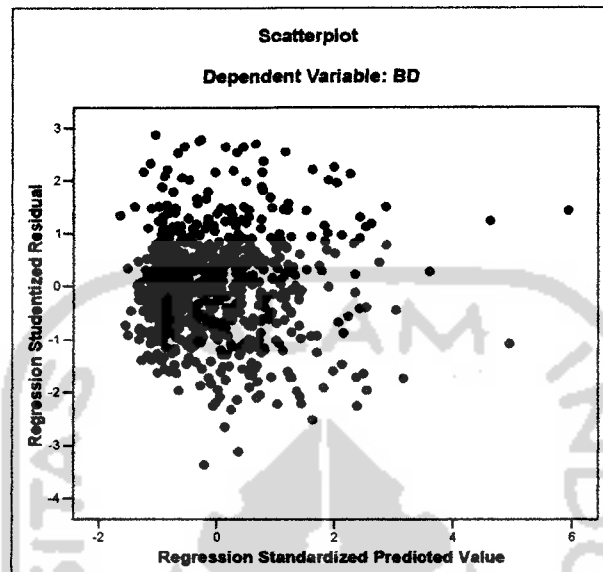
Heteroskedastisitas dapat diketahui melalui ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Dalam Ghazali (2005) dikemukakan dasar analisis untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu :

1. Jika titik-titik pada *scatterplot* membentuk suatu pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, dapat dipastikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika titik-titik pada *scatterplot* tidak membentuk suatu pola yang jelas dan menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat dipastikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan program SPSS 12.0 dapat ditunjukkan pada gambar berikut berikut :

Gambar 4.2

Grafik scatterplot



Sumber : Hasil pengolahan data

Dari gambar 4.1 di atas dapat diketahui bahwa titik-titik yang ada menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Ini berarti bahwa model regresi yang dibangun sudah terlepas dari masalah heteroskedastisitas.

4.2.2. Analisis Hasil Regresi Berganda

Setelah dilakukannya pengujian asumsi klasik, maka dapat dilanjutkan pada penelitian analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu PAD dan DAU terhadap variabel dependen yaitu Belanja daerah. Pada regresi ini data yang digunakan yaitu PAD, DAU dan Belanja daerah tahun 2002 sampai dengan 2004. Model regresi linier berganda yang digunakan adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dengan :

- Y = Belanja daerah
 α = konstanta
 β_1, β_2 = koefisien korelasi
X1 = PAD
X2 = DAU

Hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan program komputer *Microsoft Excel* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Koefisien Determinasi

Regression Statistics	
Multiple R	0,977744112
R Square	0,955983548
Adjusted R Square	0,955852547
Standard Error	24485741276
Observations	675

Sumber : Hasil pengolahan data

Dari tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R Square) model regresi ini adalah 0,955983548 dan setelah disesuaikan maka nilainya menjadi 0,955852547 atau 95,58 %. Nilai ini mencerminkan kemampuan model ini dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. Nilai adjusted R square sebesar 95,58 % memiliki makna bahwa model regresi ini mampu menjelaskan 95,58 % perubahan variabel dependen yaitu Belanja Daerah. Sedangkan sisanya yaitu 4,42 % dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Tabel 4.6

Hasil Regresi Linier Berganda

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	8603033475	2412339200	3,56626194	0,000387813
PAD	1,654789631	0,062295507	26,56354712	7,6055E-107
DAU	1,111295857	0,013227304	84,01529564	0

Sumber : Hasil pengolahan data

Dari Tabel 4.6 tersebut dapat diperoleh model persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$BD = 8603033475 + 1,654789631 \text{ PAD} + 1,111295857 \text{ DAU}$$

Persamaan tersebut memiliki makna sebagai berikut :

- Konstanta sebesar 8.603.033.475 berarti bahwa jika variabel PAD dan DAU adalah 0, maka nilai Belanja daerah adalah Rp.8.603.033.475.
- Koefisien variabel PAD yaitu sebesar 1,654789631 mengandung makna bahwa setiap kenaikan Rp.1 PAD akan mengakibatkan BD meningkat sebesar 1,654789631.
- Koefisien variabel DAU sebesar 1,111295857 memiliki makna yaitu setiap kenaikan Rp.1 DAU akan mengakibatkan BD meningkat sebesar 1,111295857.

4.2.2.1. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel dependen secara bersama-sama terhadap variabel independen. Uji F ini lebih lanjut digunakan untuk menguji Hipotesis pertama yaitu :

$H_{01} : \beta_1 = \beta_2 = 0$; Variabel PAD dan DAU secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

$H_{a1} : \beta_1 = \beta_2 \neq 0$; Variabel PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

Uji F dilakukan dengan membandingkan *P Value* f hitung yang dihasilkan dari model regresi dengan derajat signifikansinya (α) yaitu 0,05. Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan hipotesa diatas adalah jika *P Value* f hitung $< \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak. Dengan menggunakan program Microsoft Excel dihasilkan output pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.7
Hasil Regresi Berganda Untuk Uji F

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	2	8,75047E+24	4,37523E+24	7297,50941	0
Residual	672	4,02899E+23	5,99552E+20		
Total	674	9,15336E+24			

Sumber : Hasil pengolahan data

Dari pengujian tersebut secara keseluruhan diperoleh hasil seperti yang terlihat pada Tabel 4.7 bahwa nilai F hitung dari kedua variabel tersebut secara serentak adalah 7297,50941 dengan tingkat signifikan sebesar 0. Ini berarti H_{a1} tidak dapat ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa DAU dan PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah diterima.

4.2.2.1. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yaitu PAD dan DAU terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah. Lebih lanjut, uji t ini akan digunakan untuk mengetahui mana diantara kedua variabel dependen yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap Belanja Daerah (H_2). Hipotesa yang akan diuji melalui uji t ini yaitu:

$H_{02} : \beta_1 = 0$; Variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

$H_{a2} : \beta_1 \neq 0$; Variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

$H_{02} : \beta_2 = 0$; Variabel DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$; Variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

Uji t dilakukan dengan membandingkan *P Value* t hitung yang dihasilkan oleh masing-masing variabel independen dalam persamaan regresi dengan derajat signifikansinya (α) yaitu 0,05. Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan hipotesa diatas yaitu jika *P Value* t hitung $< \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak. Dengan menggunakan program Microsoft Excel dihasilkan output pada tabel 4.5 yang telah dicantumkan pada bagian sebelumnya.

Pada tabel 4.5 tersebut diketahui nilai t hitung untuk PAD pada derajat kepercayaan 5% ($\alpha = 0,05$) yaitu 26,56354712, sedangkan *P Value* t hitungnya yaitu 7,6055E-107. Dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa nilai *P value* untuk

PAD lebih kecil daripada derajat kepercayaannya ($7,6055E-107 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara individual PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja daerah.

Pada tabel 4.5 tersebut juga dapat diketahui nilai t hitung untuk DAU pada derajat kepercayaan 5% ($\alpha = 0,05$) yaitu 84,01529564, sedangkan P Value t hitungnya yaitu 0. Dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa nilai P value untuk PAD lebih kecil daripada derajat kepercayaannya ($0 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara individual DAU juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja daerah.

Dari kedua variabel tersebut harus diketahui variabel mana yang memiliki pengaruh paling kuat untuk menentukan terjadi tidaknya flypaper effect. Untuk mengetahui adanya flypaper effect maka P Value t hitung DAU harus lebih signifikan (lebih kecil) daripada P Value t hitung PAD, atau P Value t hitung PAD tidak signifikan. Dari nilai P value untuk masing-masing variabel independen di atas diketahui bahwa P value untuk DAU lebih kecil daripada P value untuk PAD. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa DAU memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap Belanja Daerah daripada PAD diterima. Atau dengan kata lain, telah terjadi *flypaper effect* dimana DAU sebagai *block grant* lebih dapat menstimulus suatu daerah dalam melakukan Belanja daerah daripada PADnya sendiri. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Sukriy dan Halim (2003) dan Maimunah (2006).

4.3 Uji Pengaruh PAD_{t-1} dan DAU_{t-1} terhadap Belanja Daerah (lag 1 tahun)

Pada bagian ini akan dijelaskan analisa data untuk mengetahui pengaruh PAD_{t-1} dan DAU_{t-1} terhadap Belanja Daerah. Data yang digunakan yaitu data PAD dan DAU Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2002 sampai dengan 2004 dan Belanja Daerah Pemda Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2001 sampai dengan 2003.

4.3.1. Uji Asumsi Klasik

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik tersebut agar hasil kesimpulannya tidak menimbulkan nilai bias. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas dalam model regresi.

4.3.1.1. Uji Normalitas

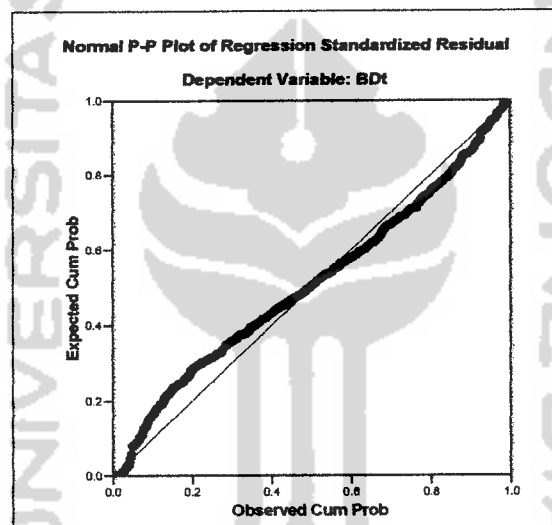
Uji Normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi tersebut variabel pengganggu atau residual terdistribusi secara normal atau tidak. Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan menggunakan grafik *normal probability plot*. Untuk mengambil keputusan normal tidaknya distribusi residual digunakan dasar berikut :

1. Jika titik-titik pada *normal probability plot* menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.

2. Jika titik-titik pada *normal probability plot* menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berikut ini gambar *normal probability plot* yang dihasilkan menggunakan program SPSS.

Gambar 4.3
Normal Probability Plot



Sumber : Hasil pengolahan data

Dari gambar 4.3 di atas dapat dilihat bahwa data menyebar mengikuti garis diagonal, dan meskipun ada beberapa data yang melebar ke luar dari garis diagonal, namun tidak menyimpang terlalu jauh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut telah memenuhi asumsi normalitas.

4.3.1.2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana terdapat hubungan yang kuat antar variable-variabel independen dalam persamaan regresi.

Multikolineritas dapat mengakibatkan ketidaktepatan estimasi yang mengarahkan pada kesimpulan menerima hipotesa null (Ghozali, 2005). Menurut Ghozali, multikolineritas terjadi jika korelasi antar variabel independennya tinggi (di atas 0,9). Hasil uji multikolineritas menggunakan program SPSS 12.0 dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Multikolineritas

Coefficient Correlations ^a				
Model			DAUt-1	PADt-1
1	Correlations	DAUt-1	1,000	-,541
		PADt-1	-,541	1,000
	Covariances	DAUt-1	,000	-,001
		PADt-1	-,001	,010

a. Dependent Variable: BDt

Sumber : Hasil pengolahan data

Dari tabel tersebut diperoleh nilai korelasi antara PAD dan DAU yaitu sebesar -0,541. Nilai ini masih jauh dibawah batas nilai korelasi yang diperkenankan agar tidak terjadi multikolineritas yaitu 0,9. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak mengandung masalah multikolineritas.

4.3.1.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*).

Seperti yang telah dilakukan sebelumnya uji autokorelasi ini dilakukan dengan menggunakan nilai Durbin Watson yang dihasilkan dalam model regresi dan membandingkannya dengan tabel pengukuran autokorelasi yang terdapat pada bagian sebelumnya. Dengan menggunakan program SPSS versi 12.0 diperoleh nilai Durbin Watson pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9
Pengujian Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,952 ^a	,906	,906	3,575E+10	2,002
a. Predictors: (Constant), DAUt-1, PADt-1					
b. Dependent Variable: BDt					

Sumber : Hasil pengolahan data

Dari tabel tersebut diketahui nilai Durbin Watson yang dihasilkan adalah sebesar 2,002. Nilai ini berada pada interval 1,66 sampai dengan 2,34 yang berarti tidak ada autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terbebas dari masalah autokorelasi.

4.3.1.4. Uji Heteroskedastisitas

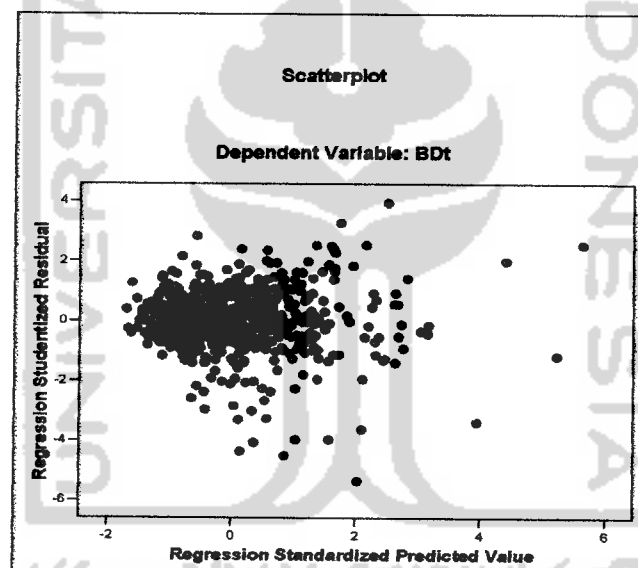
Heteroskedastisitas adalah tidak konstannya atau berubah-ubahnya varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Sebaliknya jika variance dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain konstan maka disebut

homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas (Ghozali, 2005).

Sama halnya dengan model regresi sebelumnya, pengujian untuk mengetahui ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot*nya. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan program SPSS 12.0 dapat ditunjukkan pada gambar berikut berikut.

Gambar 4.4

Grafik Scatterplot



Sumber : Hasil pengolahan data

Tampak pada gambar tersebut titik-titik yang ada menyebar dengan pola yang tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu Y. Hal ini berarti model regresi tersebut tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

4.3.2. Analisis Hasil Regresi (dengan lag 1 tahun)

Analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu PADt-1 dan DAU terhadap variabel dependen yaitu

Belanja daerah. Pada regresi ini data yang digunakan yaitu PAD dan DAU tahun 2001 sampai dengan 2003 dan Belanja daerah tahun 2002 sampai dengan 2004.

Model regresi linier berganda yang digunakan adalah :

$$Y_t = \alpha + \beta_1 X_{1t-1} + \beta_2 X_{2t-1} + e$$

Dengan :

Y_t = Belanja daerah periode t

α = konstanta

β_1, β_2 = koefisien korelasi

X_{1t-1} = PAD periode t-1

X_{2t-1} = DAU periode t

Hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan program komputer *Microsoft Excel* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10

Koefisien Determinasi

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,95192603
R Square	0,906163166
Adjusted R Square	0,90588389
Standard Error	35751347316
Observations	675

Sumber : Hasil pengolahan data

Dari tabel 4.10 diatas diketahui koefisien determinasi (*R Square*) dari model regresi ini adalah sebesar 0,906163166. Dan setelah disesuaikan dihasilkan *adjusted R square* sebesar 0,90588389 atau 90,59 %. Nilai ini berarti bahwa model ini memiliki kemampuan sebesar 90,59 % dalam menjelaskan perubahan

variabel dependen. Sedangkan sisanya yaitu 9,41 % dijelaskan oleh sebab lain di luar penelitian ini.

Tabel 4.11

Hasil Regresi Linier Berganda

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	29778613815	3375583760	8,821767117	9,64811E-18
PADt-1	1,998943343	0,100478817	19,89417677	1,34572E-69
DAUt-1	1,0873951	0,019820168	54,86306134	2,1154E-250

Sumber : Hasil pengolahan data

Dari Tabel 4.11 tersebut dapat diperoleh model persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$BD = 29778613815 + 1,998943343 \text{ PAD} + 1,0873951 \text{ DAU}$$

Persamaan tersebut memiliki makna sebagai berikut :

- Konstanta sebesar 29.778.613.815 memiliki makna yaitu jika PAD dan DAU bernilai 0, maka nilai Belanja Daerah sama dengan konstanta yaitu Rp.29.778.613.815.
- Koefisien PAD sebesar 1,998943343 mengandung makna bahwa setiap kenaikan Rp.1 PAD akan mengakibatkan BD meningkat sebesar Rp.1,998943343.
- Koefisien DAU sebesar 1,0873951 mengandung makna bahwa setiap kenaikan Rp.1 DAU akan mengakibatkan BD meningkat sebesar Rp.1,0873951.

4.3.2.1. Uji F

Uji F ini dilakukan untuk melihat pengaruh kedua variabel independen yaitu PAD_{t-1} dan DAU_{t-1} secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah. Uji F dilakukan dengan membandingkan *P Value* f hitung yang dihasilkan dari model regresi dengan derajat signifikansinya (α) yaitu 0,05. Kriteria yang digunakan yaitu jika *P Value* f hitung $< \alpha$ ($\alpha = 0,05$) berarti kedua variabel independen secara bersama-sama mampu mempengaruhi perubahan variabel dependen. Atau dengan kata lain variabel PAD_{t-1} dan DAU_{t-1} secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dengan menggunakan program komputer *Microsoft Excel* diperoleh keluaran seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.12

Hasil Regresi Berganda Untuk Uji F

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	2	8,29444E+24	4,14722E+24	3244,683472	0
Residual	672	8,58923E+23	1,27816E+21		
Total	674	9,15336E+24			

Sumber : Hasil pengolahan data

Dari tabel di atas, diketahui nilai F hitung dari kedua variabel tersebut secara serentak adalah 3244,683472 dengan tingkat signifikan 0. Hal ini berarti PAD_{t-1} dan DAU_{t-1} secara bersama-sama mampu mempengaruhi Belanja Daerah secara signifikan. Atau dengan kata lain, PAD dan DAU yang diterima Pemerintah Daerah pada tahun anggaran sebelumnya berpengaruh terhadap Belanja Daerah yang dilakukan pada periode t.

4.3.2.2. Uji t

Uji t ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen dalam hal ini PAD_{t-1} dan DAU_{t-1} terhadap Belanja Daerah periode t . Lebih lanjut, uji t ini akan menguji hipotesis ketiga yaitu DAU_{t-1} memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap Belanja Daerah daripada PAD_{t-1} . Hipotesa yang akan diuji melalui uji t ini yaitu:

$H_{03} : \beta_1 = 0$; Variabel PAD_{t-1} tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah $_t$

$H_{03} : \beta_1 \neq 0$; Variabel PAD_{t-1} berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah $_t$

$H_{03} : \beta_2 = 0$; Variabel DAU_{t-1} tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah $_t$

$H_{03} : \beta_2 \neq 0$; Variabel DAU_{t-1} berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah $_t$

Uji t dilakukan dengan membandingkan *P Value* t hitung yang dihasilkan oleh masing-masing variabel independen dalam persamaan regresi dengan derajat signifikansinya (α) yaitu 0,05. Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan hipotesa diatas yaitu jika *P Value* t hitung $< \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak. Dengan menggunakan program *Microsoft Excel* dihasilkan output pada tabel 4.11 yang telah dicantumkan pada bagian sebelumnya.

Dalam tabel 4.11 tersebut, diketahui bahwa model regresi ini menghasilkan t hitung untuk PAD_{t-1} yaitu sebesar 19,89417677 dengan *P value* sebesar 1,34572E-69. Nilai *P value* ini lebih kecil daripada α (1,34572E-69 <

0,05). Ini berarti PAD_{t-1} memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah_t. Atau dengan kata lain PAD yang diterima Pemerintah daerah tahun anggaran sebelumnya mampu mempengaruhi daerah untuk melakukan belanja pada tahun anggaran berikutnya.

T Hitung untuk variabel DAU_{t-1} yaitu sebesar 54,86306134 dengan P value 2,1154E-250. Nilai P value ini juga lebih kecil daripada α (2,1154E-250 < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU_{t-1} juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah periodet. Atau dengan kata lain DAU yang diterima daerah pada tahun anggaran sebelumnya juga mampu mempengaruhi Belanja Daerah tahun berikutnya.

Untuk mengetahui ada tidaknya *flypaper effect*, DAU_{t-1} harus memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada PAD_{t-1}. Untuk itu, P value untuk tiap variabel harus dibandingkan. P value yang lebih kecil berarti memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap variabel dependennya. Dalam model regresi ini diketahui bahwa nilai *P value* untuk DAU_{t-1} lebih kecil daripada *P value* untuk PAD_{t-1} (2,1154E-250 < 1,34572E-69). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa DAU_{t-1} memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap Belanja Daerah_t daripada PAD_{t-1} tidak dapat ditolak. Ini berarti kebijakan Pemda untuk melakukan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya lebih dipengaruhi oleh transfer (DAU) yang diterima dari Pemerintah Pusat pada tahun anggaran sebelumnya daripada PAD yang diterima pada tahun anggaran sebelumnya (terjadi *flypaper effect*). Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Halim dan Sukriy (2003).

4.4. Analisa *Flypaper Effect* pada daerah dengan PAD tinggi dan rendah

Dalam penelitiannya, Maimunah (2006) membagi daerah dengan PAD tinggi dan rendah dan melihat *flypaper effect* yang terjadi pada dua kondisi daerah tersebut. Dasar yang digunakan untuk mengkategorikan daerah ke dalam kelompok PAD tinggi dan rendah adalah nilai rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) atau yang lebih dikenal dengan rasio kemandirian. Rasio ini membandingkan PAD suatu daerah dengan Total Pendapatan yang diterima daerah tersebut. Rasio kemandirian ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern (Halim, 2004). Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin rendah ketergantungan daerah tersebut terhadap sumber dana ekstern.

4.4.1. Penghitungan rasio DOF dan Pengkategorian daerah

Rasio DOF tiap daerah kabupaten/kota dihitung dengan membagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan yang diterima pada tahun yang sama. Formula yang digunakan yaitu :

$$DOF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Hasil penghitungan rasio DOF tiap daerah pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 dapat dilihat pada lampiran 5 sampai dengan lampiran 7.

Kemudian sebagai dasar pengkategorian, nilai rasio DOF tiap tahun (dari tahun 2002 sampai dengan 2004) dalam lampiran tersebut dicari nilai rata-ratanya. Dengan menggunakan program komputer Microsoft Excel diperoleh hasil pada tabel berikut.

Tabel 4.13

Deskriptif Statistik Rasio DOF

	<i>Tahun 2002</i>	<i>Tahun 2003</i>	<i>Tahun 2004</i>
Rata-rata	6,60%	6,79%	7,14%
Nilai Tengah	5,68%	6,14%	6,15%
Minimum	1,10%	1,07%	1,08%
Maximum	23,83%	28,20%	32,82%
Jumlah sampel	225	225	225

Sumber : Hasil pengolahan data

Seperti yang tampak pada tabel 4.13, rata-rata nilai DOF pada tahun 2001 adalah 6,6%, pada tahun 2003 6,79%, dan pada tahun 2004 7,14%. Nilai rata-rata tersebut kemudian digunakan untuk membedakan daerah yang ber-PAD tinggi dan ber-PAD rendah. Daerah dengan nilai DOF rendah (dibawah rata-rata) dikategorikan sebagai daerah dengan PAD tinggi dan sebaliknya, daerah dengan nilai DOF tinggi (diatas rata-rata) dikategorikan sebagai daerah dengan PAD rendah.

4.4.2. Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif untuk PAD, DAU, dan Belanja Daerah pada daerah dengan PAD rendah dari tahun 2002 sampai dengan 2004 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.14

Statistik Deskriptif daerah dengan PAD rendah

	<i>PAD</i>	<i>DAU</i>	<i>BD</i>
<u>Tahun 2002</u>			
Mean	10.165.532.955	178.933.221.061	208.229.434.470
Median	8.052.655.000	160.559.325.000	189.994.230.000
Minimum	1.600.760.000	64.550.000.000	69.676.200.000
Maximum	33.407.680.000	441.780.890.000	507.254.140.000
Count	132	132	132

Tabel 4.14 (lanjutan)

Statistik Deskriptif daerah dengan PAD rendah

	<i>PAD</i>	<i>DAU</i>	<i>BD</i>
Tahun 2003			
Mean	12.343.794.380	200.650.018.905	261.628.368.175
Median	10.065.800.000	183.322.810.000	241.715.910.000
Minimum	1.975.270.000	85.087.690.000	84.696.820.000
Maximum	38.519.570.000	466.360.000.000	627.317.450.000
Count	137	137	137
Tahun 2004			
Mean	13.632.764.514	200.645.193.403	266.435.330.139
Median	11.009.720.000	178.778.500.000	237.625.190.000
Minimum	2.167.140.000	58.323.610.000	99.045.650.000
Maximum	59.632.520.000	484.995.000.000	599.157.810.000
Count	144	144	144

Sumber : Hasil pengolahan data

Sedangkan deskriptif statistik untuk daerah dengan PAD tinggi dari tahun 2002 sampai dengan 2004 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.15

Statistik Deskriptif daerah dengan PAD tinggi

	<i>PAD</i>	<i>DAU</i>	<i>BD</i>
<u>Tahun 2002</u>			
Mean	29.088.127.742	191.252.706.559	248.815.357.957
Median	23.188.520.000	185.990.800.000	253.205.380.000
Minimum	10.101.940.000	84.259.920.000	105.464.610.000
Maximum	123.310.170.000	521.753.730.000	822.273.040.000
Count	93	93	93
<u>Tahun 2003</u>			
Mean	34.018.849.545	218.859.404.773	314.390.269.318
Median	28.641.640.000	203.336.020.000	300.191.630.000
Minimum	8.434.990.000	82.083.690.000	107.735.360.000
Maximum	148.921.780.000	522.266.190.000	803.164.130.000
Count	88	88	88
<u>Tahun 2004</u>			
Mean	37.309.006.420	221.832.894.321	321.554.552.716
Median	32.133.200.000	211.450.990.000	311.462.410.000
Minimum	9.871.720.000	78.190.000.000	117.766.800.000
Maximum	166.260.110.000	591.852.180.000	974.948.090.000
Count	81	81	81

Sumber : Hasil pengolahan data

4.4.3 Uji Asumsi Klasik

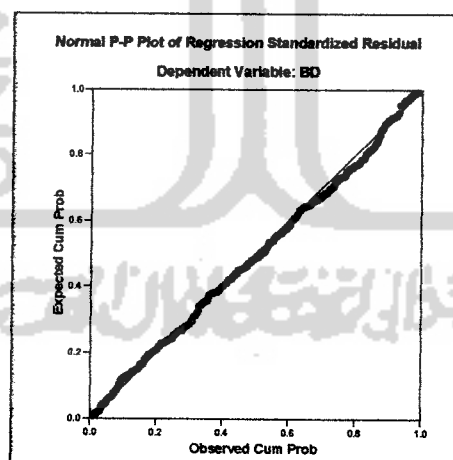
Seperti pada pembahasan sebelumnya, uji asumsi klasik harus dilakukan sebelum melakukan analisa regresi untuk memastikan model yang dibangun tidak menghasilkan kesimpulan yang bias.

4.4.3.1. Uji Normalitas

Seperti pada uji normalitas yang sudah dilakukan sebelumnya, uji normalitas kali ini juga menggunakan metode grafik. Berikut ini *normal probability plot* untuk kedua jenis daerah yang akan diuji yang dihasilkan melalui pengolahan menggunakan program SPSS versi 12.0.

Gambar 4.5

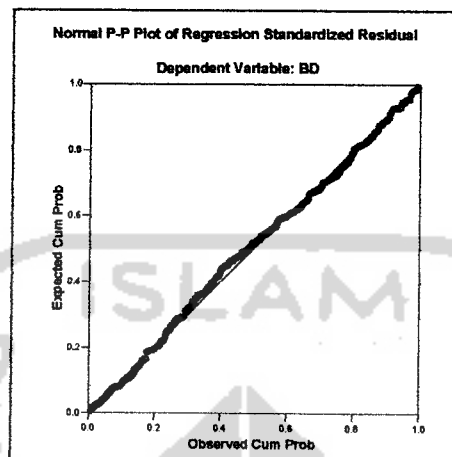
Normal Probability plot untuk daerah dengan PAD rendah



Sumber : Hasil pengolahan data

Gambar 4.6

Normal Probability plot untuk daerah dengan PAD rendah



Sumber : Hasil pengolahan data

Dari gambar 4.5 dan 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik yang ada menyebar mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan data yang digunakan dalam model regresi ini sudah terdistribusi normal.

4.4.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi yang kuat antar variabel independen. Untuk itu, peneliti menggunakan SPSS versi 12.0 dan memperoleh output seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.16

Korelasi antar variabel independen

Coefficient Correlations ^a				
Model			DAU	PAD
1	Correlations	DAU	1,000	-,767
		PAD	-,767	1,000
	Covariances	DAU	,000	-,004
		PAD	-,004	,059

a. Dependent Variable: BD

Coefficient Correlations ^a				
Model			DAU	PAD
1	Correlations	DAU	1,000	-,625
		PAD	-,625	1,000
	Covariances	DAU	,000	-,001
		PAD	-,001	,008

a. Dependent Variable: BD

Sumber : Hasil pengolahan data

Tabel pertama merupakan korelasi antara variabel PAD dan DAU pada daerah dengan PAD rendah sedangkan tabel kedua adalah korelasi antara variabel PAD dan DAU pada daerah dengan PAD tinggi. Dari kedua tabel tersebut tampak nilai korelasi antara PAD dan DAU masing-masing adalah sebesar -0,767 pada daerah dengan PAD rendah dan -0,625 pada daerah dengan PAD tinggi. Nilai korelasi ini masih jauh dibawah 0,9 sehingga dapat dikatakan pada model regresi ini antar variabel independennya tidak saling berkorelasi (tidak terjadi multikolnearitas).

4.4.3.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi akan dideteksi melalui nilai Durbin Watsonnya. Dengan menggunakan SPSS versi 12.0 diperoleh keluaran sebagai berikut.

Tabel 4.17

Pengujian Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,974 ^a	,948	,948	2,380E+10	1,832
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD					
b. Dependent Variable: BD					

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,981 ^a	,963	,963	2,475E+10	1,776
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD					
b. Dependent Variable: BD					

Sumber : Hasil pengolahan data

Tampak pada tabel 4.16 di atas, nilai Durbin Watson yaitu 1,832 untuk daerah dengan PAD rendah dan 1,776 untuk daerah dengan PAD tinggi. Kedua nilai Durbin Watson ini berada pada interval 1,66 sampai dengan 2,34. Dimana menurut Algifari (2000) pada interval tersebut tidak terjadi autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini telah terlepas dari masalah autokorelasi.

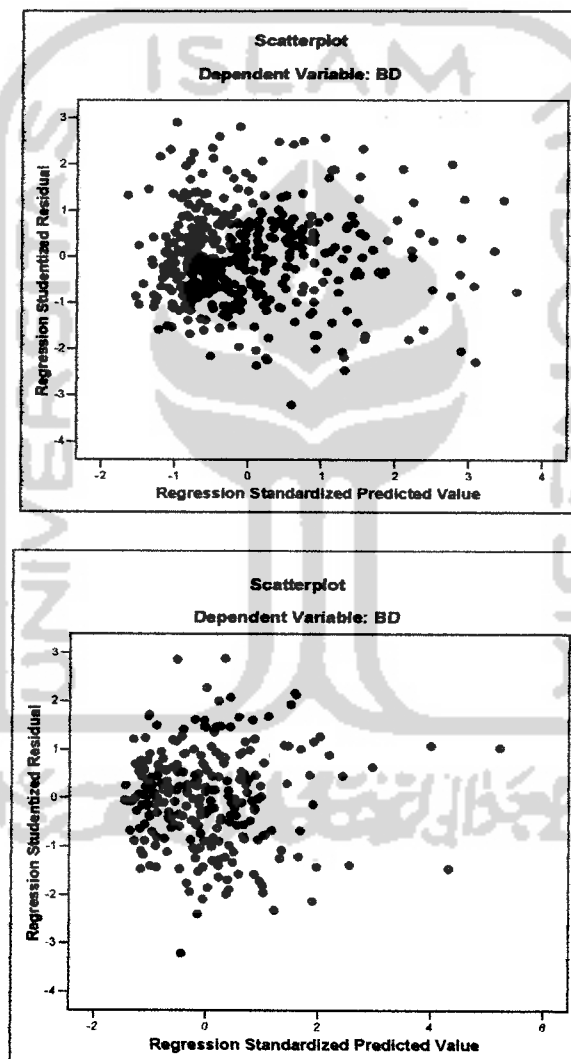
4.4.3.4. Uji Heteroskedastisitas

Sama halnya dengan pengujian heteroskedastisitas pada bagian terdahulu, uji heteroskedastisitas ini bermaksud untuk mendeteksi tidak konstannya atau

berubah-ubahnya varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas digunakan *scatterplot*. Berikut ini *scatterplot* yang dihasilkan melalui pengolahan menggunakan SPSS versi 12.0.

Gambar 4.7

Grafik scatterplot



Sumber : Hasil pengolahan data

Grafik *scatterplot* pertama adalah grafik *scatterplot* untuk daerah dengan PAD rendah dan yang kedua adalah untuk daerah dengan PAD tinggi. Kedua grafik *scatterplot* tersebut menunjukkan penyebaran titik-titik di atas dan di bawah 0

pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang teratur. Hal ini sesuai dengan kriteria tidak terjadinya heteroskedastisitas. Sehingga dapat disimpulkan model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

4.4.4. Analisa Regresi Berganda

Setelah memenuhi persyaratan asumsi klasik, maka analisa regresi berganda dapat dilakukan. Analisa regresi berganda disini adalah untuk melihat apakah *flypaper effect* terjadi pada daerah dengan PAD tinggi dan rendah. Model regresi linier berganda yang digunakan adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dengan :

Y	= Belanja daerah
α	= konstanta
β_1, β_2	= koefisien korelasi
X1	= PAD
X2	= DAU

Hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan program komputer *Microsoft Excel* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.18

Koefisien determinasi

	<i>PAD Rendah</i>	<i>PAD tinggi</i>
Multiple R	0,973774735	0,981415327
R Square	0,948237235	0,963176043
Adjusted R Square	0,947984733	0,962891688
Standard Error	23803896334	24753845505
Observations	413	262

Sumber : Hasil pengolahan data

Pada tabel 4.17, terlihat koefisien determinasi untuk daerah dengan PAD tinggi yaitu 0,947984733 (atau 94,79 %) dan untuk daerah dengan PAD rendah 0,962891688 (atau 96,29 %). Nilai koefisien ini merupakan persentase kemampuan model regresi dalam menjelaskan perubahan variabel Belanja Daerah. Kedua nilai koefisien determinasi ini terbilang tinggi sehingga dapat dikatakan sebagai model regresi yang bagus.

Tabel 4.19

Hasil Regresi Linier Berganda

	PAD tinggi			PAD rendah		
	Intercept	PAD	DAU	Intercept	PAD	DAU
<i>Coefficients</i>	10899558667	2,263381162	1,073566311	4536018481	1,83086923	1,085109447
<i>t Stat</i>	3,594642124	9,316927296	48,14892902	1,160179223	20,46032547	49,455473
<i>P-value</i>	0,000364377	7,44397E-19	7,8096E-171	0,247044168	5,10065E-56	5,9766E-134

Sumber : Hasil pengolahan data

Untuk melihat ada tidaknya *flypaper effect*, maka dilakukan dengan cara yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu dengan melihat *P Value* antara kedua variabel independen (PAD dan DAU). *Flypaper effect* terjadi jika pengaruh DAU lebih signifikan terhadap Belanja Daerah dibandingkan PAD. Oleh karena itu, *P value* DAU harus lebih signifikan (lebih rendah) atau PAD tidak signifikan. Dari tabel di atas, diperoleh *P value* untuk masing-masing variabel pada dua kondisi daerah yang kesemuanya signifikan (lebih kecil dari α). Namun *P value* untuk variabel DAU jauh lebih kecil daripada variabel PAD baik pada daerah dengan PAD tinggi maupun pada daerah dengan PAD rendah. Ini berarti bahwa baik pada daerah kaya PAD maupun pada daerah miskin PAD, keduanya mengalami *flypaper effect*, dimana DAU yang diterima daerah lebih mampu menstimulus daerah untuk melakukan belanja dibanding PADnya sendiri. Dengan demikian,

hipotesis keempat yang menyatakan daerah dengan PAD rendah dan PAD tinggi mengalami *flypaper effect* tidak dapat ditolak.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Indonesia selama kurun waktu 4 tahun yaitu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Melalui regresi berganda, diketahui bahwa PAD dan DAU secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Ini diketahui melalui uji F, dimana signifikansi F hitung yang diperoleh dalam model regresi ini yaitu 0, lebih kecil daripada tingkat kepercayaannya, yaitu 0,05. Sehingga dapat dikatakan, pemerintah daerah dalam melakukan belanja tahun berjalan dipengaruhi oleh jumlah PAD dan DAU yang diperoleh pada tahun yang sama.
- b. Melalui uji t, diketahui bahwa *P value* t hitung yang diperoleh masing-masing variabel independen yaitu PAD dan DAU, signifikan terhadap belanja daerah. Namun jika dibandingkan, ternyata *P value* t hitung variabel DAU jauh lebih kecil daripada *P value* t hitung variabel PAD., sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih kuat daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Atau dengan kata lain, pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan belanjanya lebih distimulus oleh jumlah DAU yang diterima pada tahun berjalan daripada

PADnya sendiri. Ini membuktikan adanya *flypaper effect* dalam respon Pemda terhadap DAU dan PAD.

- c. Dari pengujian pengaruh PAD_{t-1} dan DAU_{t-1} terhadap Belanja Daerah tahun berjalan, diperoleh nilai *P value* *t* hitung masing-masing variabel independen yang signifikan. Namun jika dibandingkan, diketahui bahwa *P value* *t* hitung DAU jauh lebih kecil daripada *P value* *t* Hitung PAD. Ini berarti, pengaruh DAU_{t-1} terhadap Belanja Daerah tahun berjalan lebih kuat daripada pengaruh PAD_{t-1} terhadap belanja Daerah. Atau dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan belanja daerah tahun berjalan lebih ditentukan oleh DAU yang telah diterima pada periode sebelumnya daripada PAD yang juga telah diperoleh pada periode sebelumnya. Ini juga membuktikan bahwa *flypaper effect* juga terjadi dalam respon Pemda terhadap DAU_{t-1} dan PAD_{t-1}.
- d. Dari pengelompokan daerah berdasarkan nilai DOF masing-masing daerah, diperoleh dua kondisi daerah yaitu daerah dengan PAD tinggi (daerah dengan DOF diatas rata-rata) dan daerah dengan PAD rendah (daerah dengan DOF di bawah rata-rata). Pada dua kondisi daerah tersebut kemudian dilakukan pengujian adanya *flypaper effect* dengan menggunakan regresi berganda. Dari hasil regresi berganda tersebut, diketahui bahwa variabel DAU pada masing-masing kondisi daerah memiliki pengaruh lebih kuat terhadap Belanja Daerah daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah. Ini mengindikasikan bahwa *flypaper effect* tidak hanya terjadi pada daerah dengan PAD rendah namun juga pada daerah dengan PAD tinggi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan realisasi APBD yang dipublikasikan melalui situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, sehingga tidak ikut melibatkan aspek-aspek perilaku Pemda dalam mengalokasikan sumber daya, menentukan kebijakan Belanja, efektifitas penyerapan PAD dan efisiensi dalam penggunaan pendapatan (baik PAD maupun Dana Perimbangan) untuk Belanja Daerah.

5.3 Saran

Dari beberapa keterbatasan penelitian yang telah disebutkan di atas, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Untuk penelitian berikutnya agar memasukkan aspek perilaku Pemda dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah, serta memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- b. Temuan-temuan yang ada dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pemberian DAU kepada daerah kabupaten dan kota di Indonesia bukan hanya untuk menutup celah fiskal yang ada pada kemampuan keuangan daerah, namun juga sebagai sumber penerimaan utama untuk membiayai belanja. Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah ke depannya, agar lebih mampu meningkatkan PAD dengan melakukan inovasi dan menggali potensi daerah di luar pajak daerah, sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani oleh pajak, dan PAD yang dihasilkan mampu membiayai belanja daerah itu sendiri.

REFERENSI

Abdullah, Sukriy dan Abdul Halim, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*, SNA VI, Yogyakarta, 2003, Hal 1140-1159

Algifari, *Statistik Induktif Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2000.

Bastian, Indra, *Manual Akuntansi Keuangan Daerah*, PPA FE UGM, Yogyakarta, 2001.

Ghozali Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS 12*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

Halim Abdul, *Seri Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Maimunah Mutiara, *Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di pulau Sumatera*, Simposium nasional Akuntansi IX, Padang, 2006.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Saragih, Panglima Juli, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Sidik, Machfud, B. Raksaka Mahi, Robert Simanjutak, & Bambang Brodjonegoro, *Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002.



LAMPIRAN 1

SAMPEL PENELITIAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI INDONESIA

No	Propinsi	Kabupaten / Kota
1	Nangroe Aceh Darussalam	Kab. Aceh Tenggara
2		Kota Banda Aceh
3	Sumatra Utara	Kab. Asahan
4		Kab. Dairi
5		Kab. Deli Serdang
6		Kab. Tanah Karo
7		Kab. Labuhan Batu
8		Kab. Tapanuli Selatan
9		Kab. Tapanuli Tengah
10		Kab. Tapanuli Utara
11		Kab. Toba Samosir
12		Kota Binjai
13		Kota Sibolga
14		Kota Tanjung Balai
15		Kota Tebing Tinggi
16	Sumatra Barat	Kab. Lima Puluh Kota
17		Kab. Agam
18		Kab. Padang Pariaman
19		Kab. Pasaman
20		Kab. Pesisir Selatan
21		Kab. Sawah Lunto Sijunjung
22		Kab. Solok
23		Kab. Tanah Datar
24		Kota Padang Panjang
25		Kota Padang
26		Kota Payakumbuh
27		Kota Sawahlunto
28		Kota Solok
29	Jambi	Kab. Batanghari
30		Kab. Bungo
31		Kab. Muaro Jambi
32		Kab. Sarolangun
33		Kab. Tanjung Jabung Barat
34		Kab. Tanjung Jabung Timur
35		Kab. Tebo
36		Kota Jambi
37	Sumatra Selatan	Kab. Lahat
38		Kab. Ogan Komering Ilir

No	Propinsi	Kabupaten / Kota
39	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan
40		Kab. Rejang Lebong
41		Kota Bengkulu
42	Lampung	Kab. Lampung Barat
43		Kab. Lampung Selatan
44		Kab. Lampung Tengah
45		Kab. Lampung Utara
46		Kab. Tanggamus
47		Kab. Tulang Bawang
48		Kota Bandar Lampung
49		Kota Metro
50	Jawa Barat	Kab. Bogor
51		Kab. Ciamis
52		Kab. Cianjur
53		Kab. Cirebon
54		Kab. Majalengka
55		Kab. Purwakarta
56		Kab. Sukabumi
57		Kab. Sumedang
58		Kab. Tasikmalaya
59		Kota Bogor
60		Kota Cirebon
61		Kota Sukabumi
62	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara
63		Kab. Banyumas
64		Kab. Batang
65		Kab. Blora
66		Kab. Boyolali
67		Kab. Brebes
68		Kab. Cilacap
69		Kab. Grobogan
70		Kab. Jepara
71		Kab. Karanganyar
72		Kab. Kebumen
73		Kab. Kendal
74		Kab. Klaten
75		Kab. Pekalongan
76		Kab. Pemasang
77		Kab. Purbalingga
78		Kab. Rembang
79		Kab. Semarang
80		Kab. Sragen
81		Kab. Sukoharjo
82		Kab. Temanggung
83		Kab. Wonogiri
84		Kab. Wonosobo
85		Kota Magelang

No	Propinsi	Kabupaten / Kota
86		Kota Pekalongan
87		Kota Salatiga
88		Kota Surakarta
89		Kota Tegal
90	Yogyakarta	Kab. Bantul
91		Kab. Gunung Kidul
92		Kab. Kulon Progo
93	Jawa Timur	Kab. Bangkalan
94		Kab. Banyuwangi
95		Kab. Blitar
96		Kab. Bojonegoro
97		Kab. Bondowoso
98		Kab. Gresik
99		Kab. Jember
100		Kab. Jombang
101		Kab. Kediri
102		Kab. Lamongan
103		Kab. Lumajang
104		Kab. Madiun
105		Kab. Magetan
106		Kab. Malang
107		Kab. Mojokerto
108		Kab. Nganjuk
109		Kab. Pacitan
110		Kab. Pamekasan
111		Kab. Pasuruan
112		Kab. Ponorogo
113		Kab. Probolinggo
114		Kab. Sampang
115		Kab. Sidoarjo
116		Kab. Situbondo
117		Kab. Trenggalek
118		Kab. Tuban
119		Kab. Tulungagung
120		Kota Blitar
121		Kota Kediri
122		Kota Madiun
123		Kota Malang
124		Kota Mojokerto
125		Kota Pasuruan
126		Kota Probolinggo
127	Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang
128		Kab. Landak
129		Kab. Kapuas Hulu
130		Kab. Ketapang
131		Kab. Pontianak
132		Kab. Sambas

No	Propinsi	Kabupaten / Kota
133		Kab. Sanggau
134		Kab. Sintang
135		Kota Pontianak
136	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara
137		Kab. Kapuas
138		Kab. Kotawaringin Barat
139		Kab. Kotawaringin Timur
140		Kota Palangka Raya
141	Kalimantan Selatan	Kab. Banjar
142		Kab. Barito Kuala
143		Kab. Hulu Sungai Selatan
144		Kab. Hulu Sungai Tengah
145		Kab. Hulu Sungai Utara
146		Kab. Tabalong
147		Kab. Tanah Laut
148		Kab. Tapin
149		Kota Banjar Baru
150		Kota Banjarmasin
151	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa
152		Kab. Sangihe Talaud
153		Kota Bitung
154		Kota Manado
155	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai
156		Kab. Banggai Kepulauan
157		Kab. Toli-Toli
158		Kab. Donggala
159		Kab. Poso
160		Kota Palu
161	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng
162		Kab. Barru
163		Kab. Bone
164		Kab. Enrekang
165		Kab. Gowa
166		Kab. Jeneponto
167		Kab. Luwu
168		Kab. Luwu Utara
169		Kab. Majene
170		Kab. Mamuju
171		Kab. Maros
172		Kab. Pangkajene dan Kepulauan
173		Kab. Pinrang
174		Kab. Polewali Mamasa
175		Kab. Selayar
176		Kab. Sidenreng Rappang
177		Kab. Sinjai
178		Kab. Soppeng
179		Kab. Wajo

No	Propinsi	Kabupaten / Kota
180	Sulawesi Tenggara	Kota Pare-Pare
181		Kota Makassar
182		Kab. Buton
183		Kab. Kendari
184		Kab. Kolaka
185	Bali	Kota Kendari
186		Kab. Bangli
187		Kab. Buleleng
188		Kab. Gianyar
189		Kab. Jembrana
190		Kab. Karangasem
191		Kab. Tabanan
192		Kota Denpasar
193	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu
194		Kab. Lombok Barat
195		Kab. Lombok Tengah
196		Kab. Lombok Timur
197		Kota Mataram
198	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor
199		Kab. Belu
200		Kab. Ende
201		Kab. Kupang
202		Kab. Manggarai
203		Kab. Ngada
204		Kab. Sikka
205		Kab. Sumba Barat
206		Kab. Sumba Timur
207		Kab. Timor Tengah Selatan
208		Kab. Timor Tengah Utara
209		Kota Kupang
210	Maluku	Kab. Maluku Tengah
211		Kota Ambon
212	Papua	Kota Jayapura
213		Kota Sorong
214	Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah
215		Kota Ternate
216	Banten	Kab. Lebak
217		Kab. Pandeglang
218		Kab. Serang
219		Kota Cilegon
220	Bangka Belitung	Kab. Bangka
221		Kab. Belitung
222		Kota Pangkal Pinang
223	Gorontalo	Kab. Boalemo
224		Kab. Gorontalo
225		Kota Gorontalo

LAMPIRAN 2

DATA RINGKASAN REALISASI BELANJA DAERAH (BD)

PEMDA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

TAHUN ANGGARAN

2001-2004

(000 Rupiah)

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
1	Kab. Aceh Tenggara	153.072.020	205.460.140	175.028.640	182.482.150
2	Kota Banda Aceh	170.353.300	208.233.320	223.030.270	215.452.250
3	Kab. Asahan	267.093.280	315.327.760	375.414.460	397.865.130
4	Kab. Dairi	132.859.680	155.067.490	203.666.910	129.750.310
5	Kab. Deli Serdang	429.846.920	505.987.250	681.946.190	582.411.880
6	Kab. Tanah Karo	135.866.000	173.612.100	232.974.460	237.003.300
7	Kab. Labuhan Batu	219.478.430	272.742.740	354.608.750	405.279.760
8	Kab. Tapanuli Selatan	272.195.600	294.407.140	333.826.090	329.829.570
9	Kab. Tapanuli Tengah	111.997.580	139.617.350	193.537.220	204.276.670
10	Kab. Tapanuli Utara	205.665.780	240.726.600	295.472.580	192.055.890
11	Kab. Toba Samosir	157.668.660	183.242.490	224.682.350	206.935.630
12	Kota Binjai	117.943.000	155.280.950	185.294.500	182.828.520
13	Kota Sibolga	45.689.340	88.983.940	123.434.750	121.478.120
14	Kota Tanjung Balai	57.352.690	130.359.280	137.381.490	139.774.320
15	Kota Tebing Tinggi	74.588.110	115.741.540	136.650.590	139.055.260
16	Kab. Lima Puluh Kota	124.691.790	146.934.280	215.282.060	234.789.670
17	Kab. Agam	163.242.450	191.613.130	247.621.900	253.393.780
18	Kab. Padang Pariaman	151.256.840	192.702.430	227.124.610	242.391.720
19	Kab. Pasaman	175.421.740	201.452.650	271.662.820	278.487.430
20	Kab. Pesisir Selatan	154.644.770	171.872.420	249.348.830	246.549.180
21	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	116.414.620	185.054.280	230.427.100	231.513.520
22	Kab. Solok	162.957.330	204.330.720	261.158.000	279.024.390
23	Kab. Tanah Datar	130.042.660	191.234.960	220.971.300	236.854.710
24	Kota Padang Panjang	47.431.620	69.676.200	94.077.210	110.155.020
25	Kota Padang	277.603.150	327.776.740	388.433.100	406.617.350
26	Kota Payakumbuh	84.244.640	114.514.470	155.970.940	154.369.630
27	Kota Sawahlunto	62.041.470	86.542.250	107.735.360	117.766.800
28	Kota Solok	50.171.030	69.714.140	84.696.820	99.045.650
29	Kab. Batanghari	121.677.690	154.283.700	201.289.130	220.061.420
30	Kab. Bungo	132.916.300	146.255.790	210.687.800	210.859.600
31	Kab. Muaro Jambi	102.854.750	143.470.970	194.879.850	214.566.110
32	Kab. Sarolangun	122.951.580	151.871.390	164.786.700	174.082.900
33	Kab. Tanjung Jabung Barat	103.867.950	159.872.050	185.983.060	205.774.550

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
34	Kab. Tanjung Jabung Timur	69.796.310	120.818.700	192.861.790	215.448.470
35	Kab. Tebo	71.412.990	118.764.730	169.207.270	178.897.210
36	Kota Jambi	147.647.590	198.145.660	254.118.360	273.672.560
37	Kab. Lahat	238.657.530	224.031.660	301.265.900	291.178.230
38	Kab. Ogan Komering Ilir	289.702.230	230.758.970	410.141.950	441.199.420
39	Kab. Bengkulu Selatan	196.629.430	200.281.820	262.743.860	124.074.670
40	Kab. Rejang Lebong	154.974.710	186.317.130	246.022.960	258.777.880
41	Kota Bengkulu	90.840.510	125.476.320	200.961.690	213.124.810
42	Kab. Lampung Barat	122.075.620	167.653.040	206.076.110	201.587.190
43	Kab. Lampung Selatan	270.890.640	304.801.510	399.517.560	413.068.060
44	Kab. Lampung Tengah	280.889.890	308.153.860	412.429.530	409.356.110
45	Kab. Lampung Utara	238.463.910	239.738.530	296.769.180	275.408.890
46	Kab. Tanggamus	172.799.470	265.044.300	308.103.530	339.353.480
47	Kab. Tulang Bawang	140.927.260	187.177.320	266.334.270	284.580.090
48	Kota Bandar Lampung	220.674.820	278.137.640	359.397.620	355.832.040
49	Kota Metro	107.812.410	135.636.430	182.431.070	168.283.200
50	Kab. Bogor	563.153.900	822.273.040	803.164.130	974.948.090
51	Kab. Ciamis	378.510.870	446.952.290	573.681.700	543.539.160
52	Kab. Cianjur	355.893.550	421.626.580	509.480.760	549.469.750
53	Kab. Cirebon	327.912.280	418.118.430	530.394.010	563.389.100
54	Kab. Majalengka	249.540.850	309.438.950	396.736.820	428.868.140
55	Kab. Purwakarta	187.065.050	237.602.470	328.316.460	350.226.040
56	Kab. Sukabumi	363.319.590	417.919.320	529.596.740	574.565.210
57	Kab. Sumedang	265.286.930	334.453.030	436.761.770	440.904.720
58	Kab. Tasikmalaya	442.930.310	367.512.510	451.462.120	501.801.910
59	Kota Bogor	206.249.650	268.267.900	343.987.820	370.129.230
60	Kota Cirebon	150.989.250	201.165.290	233.843.750	244.062.660
61	Kota Sukabumi	108.870.920	155.533.240	202.054.110	215.174.580
62	Kab. Banjarnegara	198.874.720	253.205.380	331.694.770	344.791.090
63	Kab. Banyumas	341.320.790	374.393.380	471.777.490	488.534.620
64	Kab. Batang	186.301.940	215.516.010	296.802.730	325.408.820
65	Kab. Blora	258.148.040	327.882.530	398.203.760	377.671.510
66	Kab. Boyolali	242.887.420	287.112.590	390.543.660	395.622.550
67	Kab. Brebes	325.035.160	354.580.300	470.672.930	475.275.800
68	Kab. Cilacap	352.554.410	389.405.480	545.722.030	507.788.660
69	Kab. Grobogan	285.594.560	320.855.970	424.580.830	473.481.020
70	Kab. Jepara	257.532.590	290.306.770	370.344.030	385.527.380
71	Kab. Karanganyar	238.717.250	266.567.400	348.659.940	351.188.880
72	Kab. Kebumen	264.447.180	352.473.700	431.376.490	427.806.040
73	Kab. Kendal	265.534.770	358.644.110	407.490.040	396.809.050
74	Kab. Klaten	320.287.040	364.272.110	483.962.190	494.976.200
75	Kab. Pekalongan	191.825.090	256.791.680	304.568.120	311.462.410
76	Kab. Pemalang	241.889.350	281.545.500	408.865.100	417.909.670
77	Kab. Purbalingga	235.681.400	280.918.930	350.141.650	346.236.140
78	Kab. Rembang	180.771.130	202.741.510	265.460.000	286.605.170
79	Kab. Semarang	230.342.780	285.329.670	357.769.620	363.569.880

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
80	Kab. Sragen	250.634.840	276.284.950	390.467.390	380.335.920
81	Kab. Sukoharjo	205.601.790	239.662.080	336.907.120	328.493.080
82	Kab. Temanggung	216.189.010	254.228.530	321.522.390	307.170.940
83	Kab. Wonogiri	257.368.550	300.401.010	403.593.890	421.874.650
84	Kab. Wonosobo	177.333.920	235.247.000	335.183.940	351.619.870
85	Kota Magelang	105.759.820	141.675.820	178.912.850	175.413.690
86	Kota Pekalongan	96.798.860	133.676.210	168.958.370	180.287.990
87	Kota Salatiga	74.547.310	110.040.020	161.956.860	168.950.590
88	Kota Surakarta	209.337.380	262.624.680	351.968.340	328.310.680
89	Kota Tegal	122.265.280	158.163.670	218.966.950	252.064.890
90	Kab. Bantul	258.897.950	314.758.690	389.277.630	396.426.750
91	Kab. Gunung Kidul	204.218.550	232.377.950	301.448.340	347.114.350
92	Kab. Kulon Progo	189.464.000	248.670.970	280.647.400	311.321.680
93	Kab. Bangkalan	191.486.550	208.941.350	302.412.330	381.168.170
94	Kab. Banyuwangi	338.638.320	371.530.700	494.763.610	481.882.140
95	Kab. Blitar	314.557.370	347.538.130	391.418.690	383.477.210
96	Kab. Bojonegoro	262.904.990	297.705.010	403.422.990	415.677.820
97	Kab. Bondowoso	223.025.880	316.150.630	321.468.540	321.468.540
98	Kab. Gresik	206.043.430	303.076.390	391.295.400	391.295.400
99	Kab. Jember	433.361.150	492.520.340	589.464.320	589.464.320
100	Kab. Jombang	265.056.350	328.046.410	428.959.660	428.959.660
101	Kab. Kediri	308.171.840	363.181.200	504.086.880	473.130.990
102	Kab. Lamongan	264.341.070	306.089.840	388.427.180	415.059.540
103	Kab. Lumajang	254.315.410	297.143.640	347.657.370	347.435.760
104	Kab. Madiun	210.933.040	243.066.810	310.290.460	317.094.200
105	Kab. Magetan	245.018.940	273.139.290	338.703.780	345.455.700
106	Kab. Malang	463.125.830	507.254.140	627.317.450	599.157.810
107	Kab. Mojokerto	245.094.370	292.773.710	406.067.990	382.994.930
108	Kab. Nganjuk	249.241.920	292.654.850	396.907.260	375.175.710
109	Kab. Pacitan	198.203.540	235.848.440	266.856.680	269.335.330
110	Kab. Pamekasan	210.911.960	218.624.290	290.135.010	305.677.920
111	Kab. Pasuruan	318.466.560	480.845.270	537.671.570	580.236.010
112	Kab. Ponorogo	269.848.850	302.615.530	377.001.800	370.723.150
113	Kab. Probolinggo	239.641.030	277.283.880	348.786.400	349.078.280
114	Kab. Sampang	144.571.630	188.678.910	261.259.860	295.895.260
115	Kab. Sidoarjo	360.559.720	436.111.700	591.920.740	610.660.500
116	Kab. Situbondo	170.311.180	246.567.090	313.908.760	285.821.970
117	Kab. Trenggalek	230.729.810	262.858.810	324.735.910	330.256.840
118	Kab. Tuban	264.255.280	300.049.460	394.829.120	421.354.420
119	Kab. Tulungagung	277.140.490	306.589.840	409.996.360	459.399.080
120	Kota Blitar	85.800.410	109.477.460	162.663.850	174.803.910
121	Kota Kediri	128.437.970	188.749.300	218.362.790	216.389.850
122	Kota Madiun	139.137.900	219.259.380	346.606.880	278.019.790
123	Kota Malang	231.389.410	262.047.490	330.152.760	362.175.130
124	Kota Mojokerto	116.089.770	122.380.360	145.143.720	158.093.740
125	Kota Pasuruan	114.104.370	133.475.130	177.980.490	167.196.020

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
126	Kota Probolinggo	100.512.090	129.471.190	167.739.380	179.676.250
127	Kab. Bengkayang	117.297.650	116.701.030	152.419.140	174.804.610
128	Kab. Landak	93.935.530	134.874.190	184.149.680	202.807.520
129	Kab. Kapuas Hulu	144.925.890	201.113.060	265.428.410	249.322.660
130	Kab. Ketapang	224.039.820	276.905.430	321.425.770	317.502.580
131	Kab. Pontianak	192.294.460	220.670.740	303.572.140	310.862.890
132	Kab. Sambas	186.966.090	217.362.250	261.566.820	257.370.510
133	Kab. Sanggau	202.759.400	237.003.410	279.554.650	305.741.780
134	Kab. Sintang	195.793.690	244.123.790	314.875.440	320.632.050
135	Kota Pontianak	190.913.390	256.492.610	307.789.290	281.425.090
136	Kab. Barito Utara	165.664.900	194.786.500	173.757.360	189.464.820
137	Kab. Kapuas	285.351.880	339.221.160	236.855.460	266.731.730
138	Kab. Kotawaringin Barat	186.825.900	203.048.410	167.386.730	199.424.980
139	Kab. Kotawaringin Timur	395.359.480	298.606.760	297.347.810	287.675.810
140	Kota Palangka Raya	113.843.040	155.739.200	193.237.840	193.418.290
141	Kab. Banjar	137.266.680	184.705.970	241.715.910	254.591.580
142	Kab. Barito Kuala	107.252.740	142.095.620	173.027.970	195.246.480
143	Kab. Hulu Sungai Selatan	115.044.770	135.378.960	181.298.020	208.083.830
144	Kab. Hulu Sungai Tengah	124.103.120	163.647.560	173.218.650	178.144.120
145	Kab. Hulu Sungai Utara	152.958.950	162.218.820	197.106.740	142.231.510
146	Kab. Tabalong	145.861.890	164.641.100	204.545.430	204.767.460
147	Kab. Tanah Laut	109.667.830	141.625.920	165.222.400	176.501.080
148	Kab. Tapin	98.730.390	133.418.570	156.568.540	170.579.000
149	Kota Banjar Baru	85.233.300	111.191.760	133.468.700	157.283.130
150	Kota Banjarmasin	189.190.180	222.430.540	289.322.240	302.955.700
151	Kab. Minahasa	301.730.700	327.788.580	426.070.680	299.366.170
152	Kab. Sangihe Talaud	139.664.520	178.806.840	159.141.070	183.139.390
153	Kota Bitung	84.395.360	134.125.470	142.124.420	133.944.420
154	Kota Manado	164.470.560	201.564.280	257.372.840	274.302.920
155	Kab. Banggai	154.568.430	169.596.120	229.791.260	235.428.820
156	Kab. Banggai Kepulauan	79.747.520	95.583.800	137.275.460	138.064.890
157	Kab. Toli-Toli	114.549.630	133.475.050	177.832.990	169.663.560
158	Kab. Donggala	260.417.260	289.811.920	249.359.670	286.526.500
159	Kab. Poso	209.913.970	234.751.040	270.053.750	279.630.040
160	Kota Palu	108.966.110	154.806.950	218.026.650	241.842.560
161	Kab. Bantaeng	64.953.130	98.872.600	139.210.520	141.541.740
162	Kab. Barru	94.310.070	117.114.590	140.348.020	187.367.660
163	Kab. Bone	190.067.510	219.758.120	324.034.790	347.192.380
164	Kab. Enrekang	83.749.450	104.176.970	154.409.630	179.347.540
165	Kab. Gowa	178.215.040	220.341.530	263.269.090	281.776.930
166	Kab. Jeneponto	101.866.880	161.685.300	188.235.350	180.504.780
167	Kab. Luwu	166.884.840	190.228.770	174.729.180	212.048.500
168	Kab. Luwu Utara	175.885.930	206.416.140	269.865.750	166.051.880
169	Kab. Majene	83.826.300	116.165.730	149.211.140	141.992.660
170	Kab. Mamuju	129.048.910	185.198.630	226.281.570	174.351.430
171	Kab. Maros	119.885.690	157.207.180	142.977.270	209.457.410

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
172	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	120.073.290	162.160.350	200.135.880	207.705.590
173	Kab. Pinrang	129.619.930	161.060.920	204.604.660	206.426.360
174	Kab. Polewali Mamasa	145.253.550	170.909.320	165.132.230	205.126.720
175	Kab. Selayar	77.165.580	109.905.200	130.939.760	142.568.930
176	Kab. Sidenreng Rappang	96.311.970	133.445.930	183.069.670	223.394.140
177	Kab. Sinjai	91.062.970	122.303.440	177.210.890	185.045.010
178	Kab. Soppeng	98.057.620	151.649.060	171.391.420	177.112.410
179	Kab. Wajo	124.348.770	154.598.960	244.634.760	204.366.150
180	Kota Pare-Pare	82.700.150	105.464.610	155.444.740	173.248.840
181	Kota Makassar	353.035.990	408.779.140	530.280.690	546.737.080
182	Kab. Buton	217.606.080	187.218.260	241.653.130	267.890.310
183	Kab. Kendari	233.156.170	243.153.530	314.064.400	197.909.100
184	Kab. Kolaka	150.103.490	181.307.100	237.938.960	246.453.160
185	Kota Kendari	92.608.610	140.788.090	193.602.780	197.963.460
186	Kab. Bangli	103.624.590	137.086.880	181.840.560	183.671.010
187	Kab. Buleleng	241.345.550	248.904.100	366.147.930	353.945.490
188	Kab. Gianyar	252.933.530	305.608.470	287.047.560	317.242.920
189	Kab. Jembrana	130.973.210	157.930.850	215.715.910	211.700.300
190	Kab. Karangasem	154.083.850	195.778.000	247.036.260	254.458.480
191	Kab. Tabanan	221.346.950	272.742.020	328.642.880	317.446.230
192	Kota Denpasar	262.006.980	321.533.250	357.368.800	349.241.460
193	Kab. Dompu	107.389.750	138.239.860	161.365.980	170.249.180
194	Kab. Lombok Barat	200.232.880	243.550.270	303.035.450	302.164.030
195	Kab. Lombok Tengah	222.291.300	254.183.310	286.603.900	313.133.100
196	Kab. Lombok Timur	267.783.750	289.376.430	362.624.830	386.694.890
197	Kota Mataram	124.559.390	162.504.090	216.162.850	216.061.580
198	Kab. Alor	110.184.910	143.766.530	170.299.170	198.012.870
199	Kab. Belu	151.760.330	186.796.460	213.136.970	229.187.440
200	Kab. Ende	137.135.740	150.184.180	197.230.160	228.741.830
201	Kab. Kupang	224.126.650	251.666.220	209.394.570	238.569.790
202	Kab. Manggarai	210.807.540	201.962.790	305.568.820	227.408.750
203	Kab. Ngada	132.266.450	147.876.490	169.749.180	210.436.840
204	Kab. Sikka	129.495.270	150.349.550	179.927.470	188.956.480
205	Kab. Sumba Barat	136.657.510	146.458.640	219.085.940	211.515.060
206	Kab. Sumba Timur	117.382.550	141.685.330	181.368.650	200.556.060
207	Kab. Timor Tengah Selatan	195.037.240	214.457.320	249.317.290	273.524.780
208	Kab. Timor Tengah Utara	141.557.980	164.135.770	193.149.760	187.156.750
209	Kota Kupang	106.692.520	123.295.670	178.133.860	197.543.480
210	Kab. Maluku Tengah	224.004.670	302.966.900	361.114.590	389.255.920
211	Kota Ambon	116.511.040	154.607.970	234.378.440	253.007.830
212	Kota Jayapura	135.482.770	220.540.420	260.324.990	266.538.480
213	Kota Sorong	112.316.960	189.759.690	251.390.990	267.144.800
214	Kab. Halmahera Tengah	129.639.020	193.129.460	247.441.770	110.199.920
215	Kota Ternate	96.660.980	157.416.290	180.051.460	183.413.450
216	Kab. Lebak	212.168.970	237.702.320	328.074.920	334.735.920

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
217	Kab. Pandeglang	254.232.650	264.844.870	354.227.790	358.977.110
218	Kab. Serang	315.863.990	362.793.620	504.107.220	530.240.060
219	Kota Cilegon	105.453.500	201.990.700	230.623.290	238.985.970
220	Kab. Bangka	180.651.110	279.499.630	278.494.720	158.451.880
221	Kab. Belitung	96.165.930	132.852.510	177.786.900	123.359.880
222	Kota Pangkal Pinang	72.146.800	116.108.910	133.929.050	150.278.870
223	Kab. Boalemo	91.011.080	119.784.620	155.915.430	99.861.060
224	Kab. Gorontalo	173.426.230	207.288.900	296.522.030	238.247.080
225	Kota Gorontalo	105.185.110	128.667.570	166.694.070	181.786.220



LAMPIRAN 3

DATA RINGKASAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PEMDA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

TAHUN ANGGARAN

2001-2004

(000 Rupiah)

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
1	Kab. Aceh Tenggara	2.442.260	3.427.910	5.016.250	4.366.310
2	Kota Banda Aceh	5.476.220	6.665.870	6.352.490	9.456.710
3	Kab. Asahan	15.569.200	19.015.240	22.626.590	22.876.080
4	Kab. Dairi	3.987.530	4.995.020	4.742.510	4.648.780
5	Kab. Deli Serdang	26.996.850	32.315.520	52.076.450	46.169.040
6	Kab. Tanah Karo	4.688.610	7.498.710	9.310.350	9.151.940
7	Kab. Labuhan Batu	8.383.320	13.356.660	26.031.700	27.500.450
8	Kab. Tapanuli Selatan	4.305.470	6.893.940	7.879.350	7.115.020
9	Kab. Tapanuli Tengah	2.846.420	4.972.430	5.433.750	6.817.910
10	Kab. Tapanuli Utara	5.035.080	8.881.840	11.177.700	8.381.590
11	Kab. Toba Samosir	10.661.960	13.755.150	13.024.050	12.006.300
12	Kota Binjai	3.909.630	5.892.650	8.312.930	8.965.290
13	Kota Sibolga	2.463.310	4.257.490	7.162.160	7.972.800
14	Kota Tanjung Balai	4.127.620	8.305.290	9.900.870	8.840.190
15	Kota Tebing Tinggi	4.118.450	5.715.580	8.051.560	9.701.880
16	Kab. Lima Puluh Kota	2.741.640	5.634.710	17.302.180	10.146.660
17	Kab. Agam	4.600.190	6.944.160	11.183.070	11.681.140
18	Kab. Padang Pariaman	4.552.830	8.062.960	11.113.230	15.840.390
19	Kab. Pasaman	6.011.110	11.929.670	16.492.390	9.077.580
20	Kab. Pesisir Selatan	2.897.280	5.641.470	9.680.360	7.346.070
21	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	7.261.230	16.661.050	19.949.320	14.352.310
22	Kab. Solok	5.080.820	10.647.570	11.769.350	10.448.410
23	Kab. Tanah Datar	4.877.810	9.815.090	11.931.500	15.390.490
24	Kota Padang Panjang	2.341.840	4.378.540	6.708.000	8.334.180
25	Kota Padang	39.351.200	52.951.300	63.932.550	68.646.570
26	Kota Payakumbuh	4.652.710	6.496.600	13.715.900	20.121.310
27	Kota Sawahlunto	2.352.020	5.170.320	8.434.990	9.871.720
28	Kota Solok	2.152.770	4.185.160	7.262.070	8.546.780
29	Kab. Batanghari	7.837.810	12.532.570	21.413.330	18.269.270
30	Kab. Bungo	11.387.010	16.708.010	28.021.240	20.821.710
31	Kab. Muaro Jambi	5.969.260	13.358.280	10.782.480	7.418.050
32	Kab. Sarolangun	3.087.460	11.992.690	6.726.230	7.343.060
33	Kab. Tanjung Jabung Barat	7.318.640	22.156.640	15.573.350	16.065.480
34	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.750.660	6.591.560	6.318.830	5.977.540
35	Kab. Tebo	9.117.800	15.002.920	18.543.120	11.169.750

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
36	Kota Jambi	15.091.880	18.796.320	23.436.360	32.133.200
37	Kab. Lahat	6.039.570	7.078.100	10.138.540	14.325.900
38	Kab. Ogan Komering Ilir	9.277.430	11.656.380	13.824.130	12.848.840
39	Kab. Bengkulu Selatan	4.192.120	6.119.430	4.595.160	4.125.390
40	Kab. Rejang Lebong	4.526.050	6.118.240	7.535.240	7.812.370
41	Kota Bengkulu	5.169.970	6.801.490	9.685.850	15.495.500
42	Kab. Lampung Barat	2.054.020	3.978.840	5.394.420	4.954.460
43	Kab. Lampung Selatan	9.811.720	9.519.590	11.928.100	13.265.860
44	Kab. Lampung Tengah	7.064.160	8.521.040	10.125.010	10.165.310
45	Kab. Lampung Utara	4.562.010	6.090.060	7.863.210	8.244.670
46	Kab. Tanggamus	2.244.590	3.170.990	7.559.080	8.769.700
47	Kab. Tulang Bawang	2.195.500	4.747.950	6.862.730	5.173.970
48	Kota Bandar Lampung	23.696.670	31.586.280	35.511.800	36.689.580
49	Kota Metro	4.478.010	7.198.010	10.098.040	10.511.500
50	Kab. Bogor	100.680.640	123.310.170	148.921.780	166.260.110
51	Kab. Ciamis	12.781.510	17.253.020	27.856.970	32.368.070
52	Kab. Cianjur	17.397.380	26.149.020	31.687.980	38.691.450
53	Kab. Cirebon	20.090.700	29.365.460	45.165.450	48.221.230
54	Kab. Majalengka	13.190.570	23.394.660	23.867.350	25.303.590
55	Kab. Purwakarta	28.815.130	38.901.840	37.697.400	39.807.320
56	Kab. Sukabumi	23.991.940	32.903.200	32.227.520	29.804.880
57	Kab. Sumedang	28.241.120	38.507.080	41.752.450	50.118.890
58	Kab. Tasikmalaya	25.739.840	14.670.880	18.659.210	20.598.900
59	Kota Bogor	26.787.460	31.173.870	41.454.150	50.644.040
60	Kota Cirebon	23.022.400	29.084.700	29.347.620	32.858.910
61	Kota Sukabumi	13.234.590	22.588.520	26.347.640	26.949.810
62	Kab. Banjarnegara	12.022.780	22.038.390	25.303.140	30.622.370
63	Kab. Banyumas	30.447.270	37.499.520	45.045.840	51.224.310
64	Kab. Batang	14.368.780	21.384.880	23.308.570	23.610.800
65	Kab. Blora	16.481.410	25.757.560	26.933.910	29.530.460
66	Kab. Boyolali	17.675.170	24.460.330	32.781.310	36.960.020
67	Kab. Brebes	14.520.910	19.793.550	25.288.380	25.735.110
68	Kab. Cilacap	32.112.950	46.833.920	48.301.120	53.499.090
69	Kab. Grobogan	18.449.540	27.067.570	37.296.070	37.038.760
70	Kab. Jepara	20.099.330	45.111.750	53.740.240	47.266.550
71	Kab. Karanganyar	16.550.710	23.188.520	25.196.920	29.485.260
72	Kab. Kebumen	14.216.180	22.760.200	29.807.200	26.264.660
73	Kab. Kendal	21.717.220	34.830.020	37.174.070	31.671.370
74	Kab. Klaten	13.832.060	17.519.440	22.288.970	27.047.600
75	Kab. Pekalongan	14.472.500	22.278.220	22.734.770	27.224.990
76	Kab. Pemalang	19.368.770	25.001.560	28.982.710	26.905.820
77	Kab. Purbalingga	15.122.500	23.603.060	28.300.570	28.619.780
78	Kab. Rembang	9.450.250	14.427.180	18.295.450	18.715.700
79	Kab. Semarang	18.923.180	30.058.620	40.269.710	44.634.640
80	Kab. Sragen	15.884.600	24.347.950	42.976.690	43.547.110
81	Kab. Sukoharjo	14.787.710	18.555.320	19.929.270	21.701.840

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
82	Kab. Temanggung	11.194.680	18.021.900	18.580.060	19.572.480
82	Kab. Temanggung	11.194.680	18.021.900	18.580.060	19.572.480
83	Kab. Wonogiri	14.224.170	23.108.190	25.998.750	25.290.370
84	Kab. Wonosobo	14.984.920	26.380.310	24.385.840	23.869.510
85	Kota Magelang	12.311.340	19.191.420	23.567.460	22.628.700
86	Kota Pekalongan	7.327.370	11.629.270	13.679.480	15.864.600
87	Kota Salatiga	10.501.680	17.703.830	20.181.960	21.619.400
88	Kota Surakarta	35.852.030	45.112.370	54.815.680	59.632.520
89	Kota Tegal	17.576.790	30.410.520	35.147.570	42.359.750
90	Kab. Bantul	14.073.120	22.425.150	32.882.340	30.777.820
91	Kab. Gunung Kidul	8.852.290	13.486.860	17.481.690	19.715.650
92	Kab. Kulon Progo	10.132.950	16.225.500	24.039.440	19.834.960
93	Kab. Bangkalan	7.976.420	14.181.070	20.873.080	20.568.370
94	Kab. Banyuwangi	18.093.380	35.422.590	41.969.840	36.279.150
95	Kab. Blitar	12.372.880	17.913.740	21.761.010	22.222.400
96	Kab. Bojonegoro	12.866.230	20.890.900	42.473.180	38.419.510
97	Kab. Bondowoso	9.887.610	26.622.450	21.172.050	21.172.050
98	Kab. Gresik	32.464.800	50.324.020	59.811.700	59.811.700
99	Kab. Jember	26.437.900	33.105.210	37.592.270	37.592.270
100	Kab. Jombang	23.936.810	45.097.700	70.114.760	70.114.760
101	Kab. Kediri	17.532.090	22.592.240	33.195.970	34.356.030
102	Kab. Lamongan	16.528.500	25.453.450	32.314.670	34.010.840
103	Kab. Lumajang	15.875.630	22.519.510	25.775.030	27.879.620
104	Kab. Madiun	6.515.610	11.428.570	18.704.250	19.995.170
105	Kab. Magetan	17.669.890	20.036.890	25.828.080	24.202.190
106	Kab. Malang	26.701.090	33.407.680	38.519.570	37.720.880
107	Kab. Mojokerto	15.301.170	22.961.480	32.074.850	34.050.070
108	Kab. Nganjuk	16.362.600	24.438.880	36.772.810	35.292.960
109	Kab. Pacitan	8.089.120	11.635.500	12.335.930	11.659.730
110	Kab. Pamekasan	7.960.040	11.527.130	14.712.140	16.794.920
111	Kab. Pasuruan	40.042.380	64.459.170	48.646.690	61.382.590
112	Kab. Ponorogo	14.262.410	16.037.820	23.873.500	24.579.700
113	Kab. Probolinggo	8.701.810	14.832.200	23.705.400	19.561.780
114	Kab. Sampang	5.465.320	9.051.760	11.924.140	23.799.440
115	Kab. Sidoarjo	69.792.190	85.738.560	112.979.820	118.757.990
116	Kab. Situbondo	11.579.760	14.289.300	15.614.020	13.091.050
117	Kab. Trenggalek	9.653.070	16.056.710	19.248.620	17.542.270
118	Kab. Tuban	28.993.090	45.104.690	54.481.560	59.557.250
119	Kab. Tulungagung	11.928.860	18.626.180	26.259.270	27.209.730
120	Kota Blitar	5.801.700	11.741.290	19.283.720	25.333.020
121	Kota Kediri	13.704.520	21.246.980	26.209.850	37.442.390
122	Kota Madiun	9.917.970	16.554.180	19.471.740	16.647.370
123	Kota Malang	27.987.060	39.733.290	42.094.970	50.007.310
124	Kota Mojokerto	6.068.580	7.878.920	11.021.540	12.194.330
125	Kota Pasuruan	7.419.420	15.139.240	15.754.180	13.210.250
126	Kota Probolinggo	11.952.970	14.573.920	16.312.050	18.526.310

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
127	Kab. Bengkayang	2.907.460	8.789.450	2.156.140	4.187.000
128	Kab. Landak	574.640	1.600.760	1.975.270	2.167.140
129	Kab. Kapuas Hulu	9.622.050	21.807.540	5.548.490	6.002.250
130	Kab. Ketapang	19.721.520	19.414.660	10.241.430	12.185.550
131	Kab. Pontianak	4.476.390	6.885.560	8.914.560	9.505.330
132	Kab. Sambas	4.813.820	7.642.680	7.597.950	10.267.950
133	Kab. Sanggau	3.791.780	6.564.770	8.575.080	10.343.170
134	Kab. Sintang	30.156.340	17.904.840	9.119.530	17.005.360
135	Kota Pontianak	20.419.130	29.597.310	31.320.420	34.774.390
136	Kab. Barito Utara	9.209.890	10.981.470	9.077.130	8.855.090
137	Kab. Kapuas	19.402.360	28.288.310	14.242.870	11.009.710
138	Kab. Kotawaringin Barat	17.875.440	16.447.690	17.780.180	21.585.910
139	Kab. Kotawaringin Timur	79.094.170	40.375.240	29.016.330	35.820.690
140	Kota Palangka Raya	4.777.180	7.741.340	8.981.600	10.107.040
141	Kab. Banjar	4.889.260	7.015.230	9.256.060	13.555.810
142	Kab. Barito Kuala	5.883.480	9.192.260	9.297.930	9.299.000
143	Kab. Hulu Sungai Selatan	3.851.170	6.757.960	10.150.620	11.916.410
144	Kab. Hulu Sungai Tengah	4.411.430	8.896.300	11.677.760	10.269.470
145	Kab. Hulu Sungai Utara	3.565.400	5.607.970	7.349.250	5.152.530
146	Kab. Tabalong	16.961.430	18.394.130	14.057.160	16.356.100
147	Kab. Tanah Laut	3.485.210	6.172.450	8.539.150	13.243.900
148	Kab. Tapin	4.435.810	7.371.790	8.314.510	10.917.660
149	Kota Banjar Baru	3.079.540	4.829.850	6.831.310	10.510.910
150	Kota Banjarmasin	18.813.690	24.300.890	29.166.010	38.328.020
151	Kab. Minahasa	9.463.180	11.547.510	13.534.480	13.630.200
152	Kab. Sangihe Talaud	4.323.620	12.359.310	10.494.760	7.836.090
153	Kota Bitung	6.075.580	7.132.140	5.803.330	9.444.720
154	Kota Manado	22.465.730	27.248.840	30.392.110	34.576.450
155	Kab. Banggai	4.738.690	6.486.990	8.457.620	13.966.500
156	Kab. Banggai Kepulauan	1.802.070	2.712.000	4.115.490	4.436.350
157	Kab. Toli-Toli	6.458.170	4.753.560	4.498.620	4.758.450
158	Kab. Donggala	5.200.070	7.522.770	6.097.450	9.377.730
159	Kab. Poso	3.274.990	5.207.470	6.419.510	5.722.070
160	Kota Palu	7.817.500	12.070.460	15.638.400	18.945.810
161	Kab. Bantaeng	2.629.590	4.165.040	6.187.770	6.983.050
162	Kab. Barru	3.956.950	6.431.800	8.739.340	10.014.350
163	Kab. Bone	7.405.880	13.553.340	15.952.400	17.690.390
164	Kab. Enrekang	3.980.480	7.106.890	10.430.390	10.463.560
165	Kab. Gowa	8.592.260	15.331.530	21.865.200	19.841.510
166	Kab. Jeneponto	4.062.740	4.876.360	4.587.690	5.183.920
167	Kab. Luwu	8.444.920	9.231.980	7.284.890	10.104.750
168	Kab. Luwu Utara	30.603.670	50.961.410	23.828.810	16.230.850
169	Kab. Majene	1.826.990	2.916.880	2.999.050	2.689.610
170	Kab. Mamuju	5.563.390	7.548.770	7.947.110	5.791.040
171	Kab. Maros	7.605.200	10.921.190	10.694.550	12.027.550
172	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	19.060.330	22.468.930	25.466.800	26.904.300

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
173	Kab. Pinrang	3.802.360	7.248.320	9.099.690	9.233.440
174	Kab. Polewali Mamasa	4.059.500	6.444.440	7.301.240	10.787.190
175	Kab. Selayar	1.807.310	2.885.210	4.124.560	3.810.770
176	Kab. Sidenreng Rappang	4.525.570	9.424.920	12.603.160	13.552.510
177	Kab. Sinjai	4.629.570	8.024.230	8.900.060	12.226.300
178	Kab. Soppeng	5.038.880	7.318.970	7.288.470	6.084.120
179	Kab. Wajo	8.371.280	11.555.760	14.788.530	13.550.270
180	Kota Pare-Pare	7.940.850	10.909.260	15.185.940	16.951.970
181	Kota Makassar	49.864.780	58.465.270	78.684.690	85.074.920
182	Kab. Buton	7.056.770	8.936.380	10.717.960	10.122.050
183	Kab. Kendari	5.501.980	8.042.350	6.756.100	14.112.540
184	Kab. Kolaka	8.376.280	11.419.900	17.124.750	10.134.170
185	Kota Kendari	7.096.790	15.385.600	13.893.280	14.112.540
186	Kab. Bangli	5.049.020	7.759.630	7.962.250	7.395.410
187	Kab. Buleleng	14.921.840	16.161.940	18.769.250	19.289.920
188	Kab. Gianyar	50.107.880	54.386.430	37.131.730	49.738.940
189	Kab. Jembrana	5.540.220	11.555.150	11.055.960	9.724.580
190	Kab. Karangasem	18.559.990	21.123.870	19.513.360	19.762.680
191	Kab. Tabanan	22.246.260	33.107.380	34.584.290	43.358.860
192	Kota Denpasar	81.684.260	91.763.020	88.548.230	90.827.790
193	Kab. Dompu	4.783.810	8.147.170	8.474.540	6.854.150
194	Kab. Lombok Barat	18.360.960	25.560.050	21.084.350	23.048.680
195	Kab. Lombok Tengah	7.084.260	12.306.050	12.415.670	13.555.980
196	Kab. Lombok Timur	12.782.460	20.707.590	22.175.080	26.131.200
197	Kota Mataram	10.337.210	14.079.680	18.086.490	17.277.300
198	Kab. Alor	4.964.990	8.317.670	9.359.670	11.009.730
199	Kab. Belu	4.713.610	10.981.880	10.003.010	9.754.550
200	Kab. Ende	4.137.700	6.200.210	8.728.580	9.435.060
201	Kab. Kupang	9.766.050	19.782.940	20.671.980	22.998.210
202	Kab. Manggarai	7.873.720	10.651.950	11.687.260	11.507.840
203	Kab. Ngada	3.690.720	7.556.730	8.373.040	9.155.940
204	Kab. Sikka	4.296.630	7.087.780	8.818.820	8.454.410
205	Kab. Sumba Barat	4.676.460	8.287.180	10.251.680	11.358.560
206	Kab. Sumba Timur	3.782.310	7.708.120	9.166.190	11.715.810
207	Kab. Timor Tengah Selatan	5.976.870	8.591.590	19.569.680	20.364.290
208	Kab. Timor Tengah Utara	3.773.150	6.968.890	5.346.330	7.616.150
209	Kota Kupang	6.733.110	10.950.970	15.717.260	35.662.320
210	Kab. Maluku Tengah	4.995.180	8.621.680	7.942.330	13.429.530
211	Kota Ambon	6.247.010	5.506.060	8.178.230	21.895.180
212	Kota Jayapura	5.119.620	11.181.930	14.623.560	16.683.190
213	Kota Sorong	2.338.260	10.526.730	15.262.010	11.299.680
214	Kab. Halmahera Tengah	1.759.580	5.505.710	6.305.050	2.293.010
215	Kota Ternate	3.174.750	6.533.590	7.853.500	10.366.960
216	Kab. Lebak	7.229.040	10.566.990	14.118.670	18.990.270
217	Kab. Pandeglang	8.087.600	11.104.240	14.770.230	15.055.510
218	Kab. Serang	45.990.200	60.183.780	61.863.020	67.966.520

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
219	Kota Cilegon	38.708.360	63.457.910	72.622.360	84.879.320
220	Kab. Bangka	29.224.970	43.131.200	31.953.990	20.136.340
221	Kab. Belitung	12.391.130	19.614.610	22.005.780	19.541.530
222	Kota Pangkal Pinang	8.157.170	11.331.630	10.065.800	13.432.970
223	Kab. Boalemo	2.651.440	5.324.510	11.336.550	4.351.250
224	Kab. Gorontalo	6.442.060	11.081.810	18.212.470	12.059.970
225	Kota Gorontalo	6.136.380	10.101.940	11.966.570	16.589.980



LAMPIRAN 4

DATA RINGKASAN REALISASI DANA ALOKASI UMUM (DAU)

PEMDA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

TAHUN ANGGARAN

2001-2004

(000 Rupiah)

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
1	Kab. Aceh Tenggara	122.268.270	130.547.330	94.378.630	122.468.000
2	Kota Banda Aceh	139.958.570	138.673.620	134.470.000	146.610.860
3	Kab. Asahan	215.625.640	237.505.000	292.739.190	274.447.000
4	Kab. Dairi	102.421.010	136.184.680	161.265.720	131.494.000
5	Kab. Deli Serdang	334.267.290	411.812.630	522.266.190	485.416.000
6	Kab. Tanah Karo	105.501.550	142.470.000	186.175.180	192.376.250
7	Kab. Labuhan Batu	182.005.570	218.440.000	263.300.000	268.127.000
8	Kab. Tapanuli Selatan	225.998.220	253.984.190	271.621.480	252.889.000
9	Kab. Tapanuli Tengah	105.449.740	123.337.180	129.090.000	134.817.000
10	Kab. Tapanuli Utara	178.415.390	211.663.650	227.813.890	139.276.000
11	Kab. Toba Samosir	119.473.790	141.910.000	156.550.000	159.848.000
12	Kota Binjai	111.964.720	128.866.380	132.050.000	132.050.000
13	Kota Sibolga	37.179.120	87.950.000	94.313.520	93.121.000
14	Kota Tanjung Balai	43.503.810	100.174.320	103.860.000	103.860.000
15	Kota Tebing Tinggi	74.999.570	110.315.940	114.961.840	115.453.090
16	Kab. Lima Puluh Kota	106.743.410	135.419.950	160.470.000	167.840.000
17	Kab. Agam	147.117.310	168.289.950	186.690.000	190.470.000
18	Kab. Padang Pariaman	132.286.380	178.485.690	171.870.000	195.136.430
19	Kab. Pasaman	157.212.890	175.630.000	203.420.000	212.914.640
20	Kab. Pesisir Selatan	127.524.810	155.930.000	185.370.000	193.016.000
21	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	119.771.690	140.400.000	171.014.610	167.030.000
22	Kab. Solok	156.945.100	169.656.740	194.501.080	202.064.000
23	Kab. Tanah Datar	121.129.610	149.850.330	185.997.030	173.264.000
24	Kota Padang Panjang	40.939.390	64.550.000	85.087.690	89.061.940
25	Kota Padang	208.847.620	233.830.000	265.540.000	272.154.000
26	Kota Payakumbuh	76.854.220	107.263.740	119.970.000	119.970.000
27	Kota Sawahlunto	55.878.900	72.563.160	82.083.690	81.802.000
28	Kota Solok	45.976.520	68.949.960	88.360.000	97.217.400
29	Kab. Batanghari	97.055.290	104.670.000	129.917.630	140.880.000
30	Kab. Bungo	114.833.380	134.880.000	140.520.000	147.820.000
31	Kab. Muaro Jambi	78.491.370	103.920.000	130.849.970	128.068.210
32	Kab. Sarolangun	96.699.490	114.130.000	135.291.010	133.096.010
33	Kab. Tanjung Jabung Barat	89.855.460	104.583.540	112.720.000	119.273.000

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
34	Kab. Tanjung Jabung Timur	56.343.920	97.440.000	104.910.000	113.797.000
35	Kab. Tebo	65.229.090	104.730.000	117.628.110	128.757.750
36	Kota Jambi	111.525.470	155.642.030	178.310.000	186.780.000
37	Kab. Lahat	182.989.850	143.720.000	186.920.000	193.320.000
38	Kab. Ogan Komering Ilir	234.137.240	251.124.250	322.947.230	335.451.440
39	Kab. Bengkulu Selatan	175.596.290	179.276.840	221.282.010	87.323.000
40	Kab. Rejang Lebong	145.652.400	174.189.090	209.509.560	200.940.900
41	Kota Bengkulu	79.456.490	129.370.000	163.250.920	158.218.220
42	Kab. Lampung Barat	92.848.630	133.520.000	144.690.000	149.384.000
43	Kab. Lampung Selatan	231.715.970	259.389.670	321.983.470	335.148.170
44	Kab. Lampung Tengah	231.508.740	272.870.000	296.049.990	308.268.000
45	Kab. Lampung Utara	200.310.920	201.290.570	232.310.240	215.610.000
46	Kab. Tanggamus	151.741.500	213.366.910	252.630.000	279.653.700
47	Kab. Tulang Bawang	107.159.350	168.200.000	207.923.850	203.812.000
48	Kota Bandar Lampung	159.411.800	199.350.000	233.550.000	243.044.000
49	Kota Metro	111.452.580	111.829.180	124.513.690	122.427.810
50	Kab. Bogor	479.574.010	521.753.730	516.095.310	591.852.180
51	Kab. Ciamis	307.370.710	361.760.000	438.200.000	441.791.250
52	Kab. Cianjur	296.188.190	335.620.000	389.850.000	411.220.000
53	Kab. Cirebon	298.356.520	324.510.000	411.400.990	407.416.000
54	Kab. Majalengka	233.941.750	228.748.730	295.270.000	308.162.000
55	Kab. Purwakarta	123.954.880	168.697.620	201.486.580	199.592.220
56	Kab. Sukabumi	302.054.930	324.840.000	423.414.710	418.183.000
57	Kab. Sumedang	197.085.050	250.270.000	291.220.000	301.089.000
58	Kab. Tasikmalaya	382.120.220	338.880.000	405.556.690	387.801.000
59	Kota Bogor	145.936.040	169.528.700	211.979.350	205.937.150
60	Kota Cirebon	92.395.130	128.269.710	147.400.010	149.752.240
61	Kota Sukabumi	81.330.560	109.779.570	124.630.000	126.824.000
62	Kab. Banjarnegara	209.841.730	215.477.410	248.820.000	260.996.000
63	Kab. Banyumas	293.426.140	321.924.060	381.941.930	374.866.990
64	Kab. Batang	211.883.530	212.735.650	224.887.870	222.399.000
65	Kab. Blora	285.249.670	286.552.490	270.140.000	285.249.980
66	Kab. Boyolali	212.748.560	250.946.370	292.070.000	303.635.550
67	Kab. Brebes	272.829.570	304.222.460	357.380.000	375.145.860
68	Kab. Cilacap	315.850.700	328.181.810	368.270.000	405.543.790
69	Kab. Grobogan	244.117.430	268.106.390	339.381.580	331.415.000
70	Kab. Jepara	233.777.840	232.522.270	248.660.000	258.973.000
71	Kab. Karanganyar	199.130.490	222.497.810	266.550.000	277.906.000
72	Kab. Kebumen	269.691.410	287.464.210	315.400.000	339.716.000
73	Kab. Kendal	286.806.430	286.810.000	270.560.000	286.808.000
74	Kab. Klaten	287.601.610	331.679.050	409.386.140	382.345.000
75	Kab. Pekalongan	205.219.040	206.186.370	222.580.000	233.319.000
76	Kab. Pemasang	223.787.950	250.279.320	297.359.580	312.263.680
77	Kab. Purbalingga	224.657.760	234.944.960	254.460.360	246.694.000
78	Kab. Rembang	160.094.660	173.125.940	188.930.000	196.642.000
79	Kab. Semarang	195.599.910	215.290.000	258.283.870	268.217.000

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
80	Kab. Sragen	215.887.280	238.900.000	271.940.000	283.621.000
81	Kab. Sukoharjo	154.866.420	213.634.140	273.518.050	281.710.730
82	Kab. Temanggung	181.604.820	196.610.000	221.660.000	228.086.000
83	Kab. Wonogiri	239.731.590	253.974.330	311.090.000	326.104.000
84	Kab. Wonosobo	207.242.120	215.728.580	237.249.610	246.292.320
85	Kota Magelang	103.011.670	106.457.880	119.980.000	122.298.000
86	Kota Pekalongan	79.989.080	99.269.950	122.170.000	125.408.000
87	Kota Salatiga	77.107.930	100.590.970	105.690.000	107.734.000
88	Kota Surakarta	111.630.280	178.390.000	232.342.000	218.045.000
89	Kota Tegal	194.484.040	163.413.860	151.650.000	189.057.750
90	Kab. Bantul	180.450.610	258.680.000	292.700.000	314.131.670
91	Kab. Gunung Kidul	157.630.910	216.810.710	271.444.350	255.642.000
92	Kab. Kulon Progo	191.330.400	209.056.940	236.729.440	215.470.000
93	Kab. Bangkalan	178.344.770	199.540.000	255.203.820	246.209.000
94	Kab. Banyuwangi	297.757.480	317.280.000	356.260.000	372.023.000
95	Kab. Blitar	264.021.240	282.910.000	316.873.840	308.854.000
96	Kab. Bojonegoro	230.948.130	260.731.260	313.548.440	303.395.000
97	Kab. Bondowoso	251.718.050	251.720.000	234.020.000	234.020.000
98	Kab. Gresik	173.813.860	204.402.440	235.130.000	235.130.000
99	Kab. Jember	418.291.230	423.650.000	456.800.000	456.800.000
100	Kab. Jombang	229.908.810	257.819.890	301.143.530	301.143.530
101	Kab. Kediri	290.313.390	312.068.990	347.730.000	358.233.000
102	Kab. Lamongan	246.825.800	262.710.000	296.740.000	298.570.000
103	Kab. Lumajang	235.014.070	236.801.370	275.107.610	265.664.000
104	Kab. Madiun	185.520.000	208.500.000	223.030.000	230.124.000
105	Kab. Magetan	221.292.610	220.600.000	242.980.000	253.135.000
106	Kab. Malang	435.227.070	441.780.890	466.360.000	484.995.000
107	Kab. Mojokerto	257.219.320	258.262.810	250.380.000	257.944.000
108	Kab. Nganjuk	240.197.360	253.280.000	290.900.000	322.878.330
109	Kab. Pacitan	197.361.750	198.358.040	204.940.000	211.332.000
110	Kab. Pamekasan	200.299.860	202.950.000	220.130.000	230.952.000
111	Kab. Pasuruan	378.254.340	378.250.000	398.513.540	398.257.260
112	Kab. Ponorogo	245.780.330	255.081.900	271.650.000	278.567.000
113	Kab. Probolinggo	209.844.860	248.224.890	254.500.000	261.881.430
114	Kab. Sampang	178.800.460	179.877.050	214.707.400	225.500.240
115	Kab. Sidoarjo	248.139.500	277.281.070	330.930.000	348.087.310
116	Kab. Situbondo	206.733.060	207.576.000	203.560.000	206.730.000
117	Kab. Trenggalek	212.777.050	225.217.870	247.660.000	252.004.000
118	Kab. Tuban	214.190.140	234.577.190	269.140.000	278.098.000
119	Kab. Tulungagung	234.664.850	262.770.000	300.150.000	309.024.000
120	Kota Blitar	83.648.520	96.910.000	111.770.000	121.078.110
121	Kota Kediri	111.280.210	113.178.790	118.740.000	119.259.000
122	Kota Madiun	207.319.710	207.864.710	216.735.850	215.437.760
123	Kota Malang	173.312.290	183.420.000	204.790.000	211.628.000
124	Kota Mojokerto	103.569.160	103.793.740	114.335.350	110.591.990
125	Kota Pasuruan	125.067.050	125.070.000	130.926.110	125.070.000

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
126	Kota Probolinggo	84.381.860	96.535.320	109.391.740	112.709.530
127	Kab. Bengkayang	97.890.000	102.640.000	124.017.990	124.563.000
128	Kab. Landak	86.613.910	120.720.000	148.850.000	160.018.000
129	Kab. Kapuas Hulu	125.887.970	154.430.000	187.950.000	202.240.000
130	Kab. Ketapang	187.938.290	185.990.800	251.304.310	254.434.000
131	Kab. Pontianak	170.983.650	197.270.000	237.650.000	245.525.000
132	Kab. Sambas	180.101.340	178.641.850	201.810.000	207.729.000
133	Kab. Sanggau	192.645.700	207.717.860	244.890.760	235.937.000
134	Kab. Sintang	160.538.350	194.540.000	243.520.000	268.658.980
135	Kota Pontianak	166.462.870	176.000.000	189.771.530	188.292.760
136	Kab. Barito Utara	120.785.400	152.570.000	102.360.000	122.396.340
137	Kab. Kapuas	240.617.790	268.762.440	183.322.810	218.886.580
138	Kab. Kotawaringin Barat	117.807.310	141.740.000	106.910.000	136.293.500
139	Kab. Kotawaringin Timur	230.403.540	245.905.490	155.880.500	189.191.770
140	Kota Palangka Raya	89.545.630	124.428.340	151.829.300	155.420.900
141	Kab. Banjar	101.163.100	141.419.950	167.320.000	174.963.000
142	Kab. Barito Kuala	86.031.130	111.911.530	133.030.000	137.217.970
143	Kab. Hulu Sungai Selatan	94.890.480	120.663.570	137.660.000	147.168.000
144	Kab. Hulu Sungai Tengah	110.355.250	125.787.520	139.260.000	139.260.000
145	Kab. Hulu Sungai Utara	104.788.980	119.890.000	134.790.000	79.175.000
146	Kab. Tabalong	78.312.260	99.034.060	113.740.000	118.482.000
147	Kab. Tanah Laut	76.074.740	99.020.000	110.590.000	116.653.000
148	Kab. Tapin	71.153.960	103.859.950	116.130.000	116.531.000
149	Kota Banjar Baru	62.425.320	84.780.000	97.850.000	102.424.000
150	Kota Banjarmasin	125.073.070	167.489.240	190.300.000	194.081.000
151	Kab. Minahasa	274.250.410	318.696.090	397.297.510	210.510.000
152	Kab. Sangihe Talaud	125.594.060	158.823.610	124.456.290	143.727.750
153	Kota Bitung	65.932.000	105.300.000	123.941.590	119.755.000
154	Kota Manado	118.379.520	142.153.440	194.620.420	183.903.000
155	Kab. Banggai	129.548.360	150.170.000	176.730.000	185.949.690
156	Kab. Banggai Kepulauan	75.856.680	91.640.000	123.499.340	135.070.460
157	Kab. Toli-Toli	103.399.890	112.270.000	138.051.820	136.256.000
158	Kab. Donggala	252.822.250	265.675.630	193.483.810	227.232.340
159	Kab. Poso	200.624.810	201.352.420	217.295.330	206.871.000
160	Kota Palu	85.626.320	140.473.280	176.989.110	174.446.250
161	Kab. Bantaeng	58.600.640	93.005.060	106.330.000	109.648.000
162	Kab. Barru	84.219.940	109.008.480	120.810.000	132.209.890
163	Kab. Bone	169.536.500	215.586.910	257.081.140	265.708.200
164	Kab. Enrekang	78.145.940	105.760.520	124.250.000	136.983.000
165	Kab. Gowa	156.343.470	174.837.020	202.110.000	225.980.480
166	Kab. Jeneponto	87.403.370	134.510.730	141.780.000	146.600.000
167	Kab. Luwu	143.281.750	171.290.000	141.540.000	162.586.290
168	Kab. Luwu Utara	103.397.010	139.790.000	175.210.000	107.731.790
169	Kab. Majene	67.634.210	102.080.970	115.670.000	116.114.000
170	Kab. Mamuju	103.551.050	157.520.000	184.928.250	130.640.630
171	Kab. Maros	102.242.850	130.100.000	148.212.730	161.734.040

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
172	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	99.077.070	125.620.000	151.260.000	154.392.000
173	Kab. Pinrang	109.263.110	136.816.800	164.013.250	165.988.060
174	Kab. Polewali Mamasa	126.115.290	158.630.000	124.140.000	152.051.000
175	Kab. Selayar	70.692.260	89.790.000	106.445.520	108.368.000
176	Kab. Sidenreng Rappang	83.994.420	117.540.000	147.830.000	147.830.000
177	Kab. Sinjai	84.720.620	112.850.000	132.820.000	137.118.000
178	Kab. Soppeng	86.331.460	131.378.540	147.030.000	151.053.590
179	Kab. Wajo	106.493.400	139.920.000	166.130.000	169.040.360
180	Kota Pare-Pare	69.988.870	89.930.000	116.320.000	121.837.000
181	Kota Makassar	257.042.400	274.480.000	308.140.000	308.158.000
182	Kab. Buton	200.744.480	188.540.000	215.780.000	218.669.570
183	Kab. Kendari	210.609.570	225.320.000	289.743.110	145.149.750
184	Kab. Kolaka	135.392.530	162.488.650	180.760.000	194.922.000
185	Kota Kendari	77.998.770	112.179.120	140.329.550	145.149.750
186	Kab. Bangli	71.272.800	99.021.680	122.390.000	126.374.000
187	Kab. Buleleng	169.866.850	200.900.000	237.610.000	248.515.000
188	Kab. Gianyar	195.040.730	190.521.150	203.642.040	193.932.610
189	Kab. Jembrana	105.836.830	128.270.000	137.389.960	144.661.000
190	Kab. Karangasem	112.869.460	142.750.000	163.260.000	170.302.000
191	Kab. Tabanan	133.805.800	199.247.410	203.699.960	211.450.990
192	Kota Denpasar	146.981.130	166.770.000	193.489.800	176.989.760
193	Kab. Dompu	93.989.390	116.150.000	123.730.000	125.987.980
194	Kab. Lombok Barat	165.094.690	201.640.430	219.529.720	236.813.250
195	Kab. Lombok Tengah	203.787.200	221.340.000	240.502.620	243.251.110
196	Kab. Lombok Timur	235.603.840	246.390.000	278.320.000	291.019.000
197	Kota Mataram	92.336.770	120.921.110	146.070.000	152.623.000
198	Kab. Alor	112.716.500	124.546.670	153.700.000	159.338.010
199	Kab. Belu	141.876.730	169.635.320	180.520.000	186.697.000
200	Kab. Ende	125.227.390	136.760.630	160.660.000	165.323.000
201	Kab. Kupang	218.082.010	236.370.000	197.980.000	211.456.410
202	Kab. Manggarai	206.842.760	207.699.740	247.849.450	173.147.000
203	Kab. Ngada	142.255.200	141.661.970	164.664.200	158.237.000
204	Kab. Sikka	122.146.740	133.330.000	146.480.000	153.290.000
205	Kab. Sumba Barat	135.644.920	144.210.000	174.020.000	182.594.000
206	Kab. Sumba Timur	126.708.310	128.340.000	155.448.000	162.358.000
207	Kab. Timor Tengah Selatan	186.360.930	193.260.000	203.030.000	216.751.360
208	Kab. Timor Tengah Utara	142.244.870	145.979.990	149.779.720	157.163.000
209	Kota Kupang	95.919.860	117.710.000	158.753.950	150.982.480
210	Kab. Maluku Tengah	222.410.240	254.140.000	292.971.420	330.745.000
211	Kota Ambon	109.591.300	142.080.000	170.520.000	189.766.850
212	Kota Jayapura	114.124.660	141.279.950	160.070.000	170.389.000
213	Kota Sorong	95.516.250	113.750.000	139.925.750	157.228.000
214	Kab. Halmahera Tengah	97.840.000	163.280.000	159.919.820	58.323.610
215	Kota Ternate	94.765.130	126.040.000	132.301.530	126.042.000
216	Kab. Lebak	198.314.420	207.880.220	247.270.160	264.401.000
217	Kab. Pandeglang	225.234.120	237.786.740	268.900.000	303.490.210

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
218	Kab. Serang	244.317.150	264.318.470	331.586.420	346.946.000
219	Kota Cilegon	49.890.900	84.259.920	94.110.000	95.542.000
220	Kab. Bangka	140.017.640	169.904.600	193.088.240	80.420.500
221	Kab. Belitung	71.374.670	105.120.000	116.720.000	78.190.000
222	Kota Pangkal Pinang	52.792.850	85.280.000	90.850.000	95.875.500
223	Kab. Boalemo	85.355.710	105.070.000	128.625.070	68.120.000
224	Kab. Gorontalo	155.996.020	185.370.000	232.088.340	170.681.000
225	Kota Gorontalo	105.704.930	111.698.290	124.005.000	135.079.300



LAMPIRAN 5

PENGHITUNGAN RASIO DOF

TAHUN 2002

No	Kabupaten / Kota	PAD	Total Pendapatan	DOF
1	Kab. Landak	1.600.760.000	145.579.030.000	1,10%
2	Kab. Tanggamus	3.170.990.000	252.024.590.000	1,26%
3	Kab. Aceh Tenggara	3.427.910.000	207.308.640.000	1,65%
4	Kab. Poso	5.207.470.000	251.485.370.000	2,07%
5	Kab. Lampung Barat	3.978.840.000	191.085.940.000	2,08%
6	Kab. Tapanuli Selatan	6.893.940.000	307.576.660.000	2,24%
7	Kab. Tulang Bawang	4.747.950.000	206.712.830.000	2,30%
8	Kab. Banggai Kepulauan	2.712.000.000	116.214.440.000	2,33%
9	Kab. Majene	2.916.880.000	123.750.530.000	2,36%
10	Kab. Halmahera Tengah	5.505.710.000	230.047.380.000	2,39%
11	Kab. Lampung Utara	6.090.060.000	247.961.180.000	2,46%
12	Kab. Donggala	7.522.770.000	304.695.700.000	2,47%
13	Kab. Lampung Tengah	8.521.040.000	341.045.000.000	2,50%
14	Kab. Selayar	2.885.210.000	112.821.690.000	2,56%
15	Kab. Sanggau	6.564.770.000	251.972.800.000	2,61%
16	Kab. Maluku Tengah	8.621.680.000	310.812.420.000	2,77%
17	Kab. Bengkulu Selatan	6.119.430.000	213.395.900.000	2,87%
18	Kota Ambon	5.506.060.000	190.882.170.000	2,88%
19	Kab. Lampung Selatan	9.519.590.000	329.095.860.000	2,89%
20	Kab. Tapanuli Tengah	4.972.430.000	171.761.910.000	2,89%
21	Kab. Pesisir Selatan	5.641.470.000	194.688.330.000	2,90%
22	Kab. Pontianak	6.885.560.000	236.714.290.000	2,91%
23	Kab. Dairi	4.995.020.000	171.276.120.000	2,92%
24	Kab. Jeneponto	4.876.360.000	165.416.880.000	2,95%
25	Kota Banda Aceh	6.665.870.000	226.115.410.000	2,95%
26	Kab. Rejang Lebong	6.118.240.000	204.287.680.000	2,99%
27	Kab. Lahat	7.078.100.000	232.422.460.000	3,05%
28	Kab. Agam	6.944.160.000	227.706.530.000	3,05%
29	Kab. Kendari	8.042.350.000	250.245.780.000	3,21%
30	Kab. Tapanuli Utara	8.881.840.000	275.694.750.000	3,22%
31	Kab. Lima Puluh Kota	5.634.710.000	174.595.920.000	3,23%
32	Kab. Sambas	7.642.680.000	236.683.080.000	3,23%
33	Kab. Minahasa	11.547.510.000	351.063.020.000	3,29%
34	Kab. Tasikmalaya	14.670.880.000	443.608.020.000	3,31%
35	Kab. Ogan Komering Ilir	11.656.380.000	350.709.460.000	3,32%
36	Kab. Hulu Sungai Utara	5.607.970.000	168.241.290.000	3,33%
37	Kab. Sampang	9.051.760.000	271.503.270.000	3,33%
38	Kab. Toli-Toli	4.753.560.000	141.646.130.000	3,36%

No	Kabupaten / Kota	PAD	Total Pendapatan	DOF
39	Kab. Polewali Mamasa	6.444.440.000	191.769.930.000	3,36%
40	Kota Binjai	5.892.650.000	170.896.150.000	3,45%
41	Kab. Banggai	6.486.990.000	185.737.130.000	3,49%
42	Kab. Banjar	7.015.230.000	197.280.860.000	3,56%
43	Kota Ternate	6.533.590.000	179.456.990.000	3,64%
44	Kab. Timor Tengah Selatan	8.591.590.000	233.410.200.000	3,68%
45	Kab. Bantaeng	4.165.040.000	112.624.230.000	3,70%
46	Kab. Ciamis	17.253.020.000	464.975.700.000	3,71%
47	Kab. Tanah Laut	6.172.450.000	164.434.690.000	3,75%
48	Kab. Padang Pariaman	8.062.960.000	214.217.140.000	3,76%
49	Kab. Ende	6.200.210.000	160.408.660.000	3,87%
50	Kota Sibolga	4.257.490.000	109.967.460.000	3,87%
51	Kab. Mamuju	7.548.770.000	193.991.150.000	3,89%
52	Kab. Buton	8.936.380.000	229.624.870.000	3,89%
53	Kota Tebing Tinggi	5.715.580.000	145.009.610.000	3,94%
54	Kab. Boalemo	5.324.510.000	135.060.380.000	3,94%
55	Kab. Timor Tengah Utara	6.968.890.000	176.759.300.000	3,94%
56	Kab. Tanah Karo	7.498.710.000	189.057.720.000	3,97%
57	Kab. Hulu Sungai Selatan	6.757.960.000	170.281.030.000	3,97%
58	Kab. Ngada	7.556.730.000	186.743.070.000	4,05%
59	Kab. Pandeglang	11.104.240.000	274.180.370.000	4,05%
60	Kota Metro	7.198.010.000	176.697.010.000	4,07%
61	Kab. Lebak	10.566.990.000	257.603.270.000	4,10%
62	Kota Banjar Baru	4.829.850.000	114.964.980.000	4,20%
63	Kota Bengkulu	6.801.490.000	158.678.380.000	4,29%
64	Kab. Tanjung Jabung Timur	6.591.560.000	153.255.220.000	4,30%
65	Kab. Barito Utara	10.981.470.000	252.078.560.000	4,36%
66	Kab. Luwu	9.231.980.000	211.631.560.000	4,36%
67	Kab. Manggarai	10.651.950.000	242.158.720.000	4,40%
68	Kab. Tanah Datar	9.815.090.000	222.695.010.000	4,41%
69	Kab. Labuhan Batu	13.356.660.000	302.754.530.000	4,41%
70	Kab. Sikka	7.087.780.000	159.773.940.000	4,44%
71	Kab. Solok	10.647.570.000	239.536.870.000	4,45%
72	Kab. Pacitan	11.635.500.000	261.662.520.000	4,45%
73	Kab. Pamekasan	11.527.130.000	259.087.240.000	4,45%
74	Kab. Madiun	11.428.570.000	256.734.270.000	4,45%
75	Kab. Pinrang	7.248.320.000	161.692.850.000	4,48%
76	Kab. Lombok Tengah	12.306.050.000	274.123.590.000	4,49%
77	Kota Solok	4.185.160.000	92.993.120.000	4,50%
78	Kab. Klaten	17.519.440.000	387.763.520.000	4,52%
79	Kab. Situbondo	14.289.300.000	316.055.550.000	4,52%
80	Kab. Sumba Timur	7.708.120.000	169.662.290.000	4,54%
81	Kab. Sumba Barat	8.287.180.000	180.284.270.000	4,60%
82	Kota Palangka Raya	7.741.340.000	166.719.020.000	4,64%
83	Kab. Hulu Sungai Tengah	8.896.300.000	188.332.860.000	4,72%
84	Kab. Probolinggo	14.832.200.000	311.363.980.000	4,76%

No	Kabupaten / Kota	PAD	Total Pendapatan	DOF
85	Kab. Soppeng	7.318.970.000	153.125.830.000	4,78%
86	Kab. Barru	6.431.800.000	134.325.540.000	4,79%
87	Kota Madiun	16.554.180.000	341.551.350.000	4,85%
88	Kota Jayapura	11.181.930.000	229.067.120.000	4,88%
89	Kab. Tapin	7.371.790.000	150.551.140.000	4,90%
90	Kab. Dompu	8.147.170.000	166.051.010.000	4,91%
91	Kab. Pasaman	11.929.670.000	242.547.040.000	4,92%
92	Kota Padang Panjang	4.378.540.000	88.949.500.000	4,92%
93	Kota Tanjung Balai	8.305.290.000	167.081.210.000	4,97%
94	Kab. Gorontalo	11.081.810.000	222.931.260.000	4,97%
95	Kota Payakumbuh	6.496.600.000	130.677.560.000	4,97%
96	Kab. Ponorogo	16.037.820.000	316.823.960.000	5,06%
97	Kab. Bangli	7.759.630.000	152.597.630.000	5,09%
98	Kab. Blitar	17.913.740.000	351.715.460.000	5,09%
99	Kota Sawahlunto	5.170.320.000	101.344.490.000	5,10%
100	Kab. Alor	8.317.670.000	160.083.220.000	5,20%
101	Kab. Belu	10.981.880.000	211.119.460.000	5,20%
102	Kab. Bone	13.553.340.000	257.696.490.000	5,26%
103	Kota Sorong	10.526.730.000	199.196.480.000	5,28%
104	Kota Bitung	7.132.140.000	134.125.470.000	5,32%
105	Kab. Enrekang	7.106.890.000	133.221.880.000	5,33%
106	Kab. Brebes	19.793.550.000	370.735.240.000	5,34%
107	Kab. Gunung Kidul	13.486.860.000	251.665.060.000	5,36%
108	Kab. Bangkalan	14.181.070.000	263.267.660.000	5,39%
109	Kab. Buleleng	16.161.940.000	296.149.980.000	5,46%
110	Kab. Kediri	22.592.240.000	410.579.550.000	5,50%
111	Kab. Trenggalek	16.056.710.000	286.559.190.000	5,60%
112	Kab. Sinjai	8.024.230.000	142.214.200.000	5,64%
113	Kab. Tulungagung	18.626.180.000	328.080.480.000	5,68%
114	Kab. Kebumen	22.760.200.000	399.787.010.000	5,69%
115	Kab. Asahan	19.015.240.000	329.108.040.000	5,78%
116	Kab. Cianjur	26.149.020.000	449.072.560.000	5,82%
117	Kab. Kolaka	11.419.900.000	195.196.760.000	5,85%
118	Kota Mojokerto	7.878.920.000	134.399.510.000	5,86%
119	Kab. Barito Kuala	9.192.260.000	155.270.510.000	5,92%
120	Kab. Malang	33.407.680.000	558.615.200.000	5,98%
121	Kab. Jembrana	11.555.150.000	192.625.290.000	6,00%
122	Kab. Jember	33.105.210.000	550.354.350.000	6,02%
123	Kab. Mojokerto	22.961.480.000	372.470.270.000	6,16%
124	Kab. Sidenreng Rappang	9.424.920.000	152.390.370.000	6,18%
125	Kab. Blora	25.757.560.000	408.550.150.000	6,30%
126	Kab. Deli Serdang	32.315.520.000	510.090.860.000	6,34%
127	Kab. Rembang	14.427.180.000	227.289.390.000	6,35%
128	Kab. Bojonegoro	20.890.900.000	328.826.020.000	6,35%
129	Kab. Cirebon	29.365.460.000	461.060.550.000	6,37%
130	Kab. Bengkayang	8.789.450.000	137.425.820.000	6,40%

No	Kabupaten / Kota	PAD	Total Pendapatan	DOF
131	Kab. Wajo	11.555.760.000	179.369.330.000	6,44%
132	Kab. Kulon Progo	16.225.500.000	251.631.710.000	6,45%
133	Kota Gorontalo	10.101.940.000	152.293.950.000	6,63%
134	Kab. Temanggung	18.021.900.000	270.749.310.000	6,66%
135	Kab. Bantul	22.425.150.000	336.570.260.000	6,66%
136	Kab. Gowa	15.331.530.000	229.131.470.000	6,69%
137	Kab. Batang	21.384.880.000	318.961.010.000	6,70%
138	Kab. Magetan	20.036.890.000	298.507.850.000	6,71%
139	Kab. Sangihe Talaud	12.359.310.000	183.189.080.000	6,75%
140	Kab. Toba Samosir	13.755.150.000	202.503.460.000	6,79%
141	Kab. Lombok Timur	20.707.590.000	303.161.170.000	6,83%
142	Kab. Ketapang	19.414.660.000	281.319.660.000	6,90%
143	Kab. Kupang	19.782.940.000	283.058.770.000	6,99%
144	Kab. Sintang	17.904.840.000	256.058.120.000	6,99%
145	Kab. Sukoharjo	18.555.320.000	265.092.760.000	7,00%
146	Kab. Maros	10.921.190.000	155.958.580.000	7,00%
147	Kota Palu	12.070.460.000	172.293.970.000	7,01%
148	Kab. Banjarnegara	22.038.390.000	312.464.610.000	7,05%
149	Kab. Wonogiri	23.108.190.000	325.063.870.000	7,11%
150	Kab. Lumajang	22.519.510.000	314.918.400.000	7,15%
151	Kab. Majalengka	23.394.660.000	326.971.440.000	7,15%
152	Kab. Bondowoso	26.622.450.000	369.902.290.000	7,20%
153	Kab. Sukabumi	32.903.200.000	456.765.720.000	7,20%
154	Kota Kupang	10.950.970.000	151.833.410.000	7,21%
155	Kab. Purbalingga	23.603.060.000	326.967.800.000	7,22%
156	Kab. Sarolangun	11.992.690.000	165.757.190.000	7,24%
157	Kab. Lamongan	25.453.450.000	345.800.870.000	7,36%
158	Kab. Nganjuk	24.438.880.000	328.666.820.000	7,44%
159	Kab. Pekalongan	22.278.220.000	298.421.110.000	7,47%
160	Kab. Boyolali	24.460.330.000	325.257.090.000	7,52%
161	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	16.661.050.000	219.999.890.000	7,57%
162	Kab. Kapuas	28.288.310.000	369.641.420.000	7,65%
163	Kab. Batanghari	12.532.570.000	163.288.860.000	7,68%
164	Kab. Pematang	25.001.560.000	324.927.000.000	7,69%
165	Kab. Kotawaringin Barat	16.447.690.000	210.122.650.000	7,83%
166	Kota Mataram	14.079.680.000	178.790.610.000	7,87%
167	Kota Pekalongan	11.629.270.000	147.587.360.000	7,88%
168	Kab. Grobogan	27.067.570.000	342.757.610.000	7,90%
169	Kota Pasuruan	15.139.240.000	190.624.480.000	7,94%
170	Kab. Wonosobo	26.380.310.000	330.954.430.000	7,97%
171	Kab. Sragen	24.347.950.000	304.172.000.000	8,00%
172	Kab. Karanganyar	23.188.520.000	289.482.690.000	8,01%
173	Kota Blitar	11.741.290.000	145.607.390.000	8,06%
174	Kab. Kendal	34.830.020.000	428.436.300.000	8,13%
175	Kota Pangkal Pinang	11.331.630.000	133.123.210.000	8,51%
176	Kab. Muaro Jambi	13.358.280.000	153.810.890.000	8,68%

No	Kabupaten / Kota	PAD	Total Pendapatan	DOF
177	Kab. Karangasem	21.123.870.000	243.034.440.000	8,69%
178	Kab. Banyuwangi	35.422.590.000	406.617.310.000	8,71%
179	Kota Jambi	18.796.320.000	212.570.100.000	8,84%
180	Kab. Bungo	16.708.010.000	186.925.640.000	8,94%
181	Kab. Banyumas	37.499.520.000	412.117.380.000	9,10%
182	Kota Pare-Pare	10.909.260.000	119.080.800.000	9,16%
183	Kab. Lombok Barat	25.560.050.000	274.875.660.000	9,30%
184	Kab. Tebo	15.002.920.000	158.203.840.000	9,48%
185	Kota Tegal	30.410.520.000	318.324.430.000	9,55%
186	Kab. Kotawaringin Timur	40.375.240.000	418.330.830.000	9,65%
187	Kab. Semarang	30.058.620.000	310.210.650.000	9,69%
188	Kota Kediri	21.246.980.000	218.430.690.000	9,73%
189	Kota Kendari	15.385.600.000	156.590.440.000	9,83%
190	Kota Pontianak	29.597.310.000	300.571.770.000	9,85%
191	Kab. Pasuruan	64.459.170.000	648.426.300.000	9,94%
192	Kota Probolinggo	14.573.920.000	144.951.230.000	10,05%
193	Kab. Cilacap	46.833.920.000	461.719.530.000	10,14%
194	Kab. Kapuas Hulu	21.807.540.000	212.559.900.000	10,26%
195	Kota Banjarmasin	24.300.890.000	233.242.010.000	10,42%
196	Kota Salatiga	17.703.830.000	167.730.920.000	10,55%
197	Kota Bandar Lampung	31.586.280.000	296.008.080.000	10,67%
198	Kota Bogor	31.173.870.000	289.468.150.000	10,77%
199	Kab. Sumedang	38.507.080.000	354.504.760.000	10,86%
200	Kab. Tabalong	18.394.130.000	168.548.930.000	10,91%
201	Kota Magelang	19.191.420.000	167.952.410.000	11,43%
202	Kab. Tabanan	33.107.380.000	286.618.050.000	11,55%
203	Kab. Belitung	19.614.610.000	169.419.340.000	11,58%
204	Kab. Tanjung Jabung Barat	22.156.640.000	189.177.490.000	11,71%
205	Kota Manado	27.248.840.000	231.204.740.000	11,79%
206	Kota Sukabumi	22.588.520.000	182.304.240.000	12,39%
207	Kab. Tuban	45.104.690.000	359.426.400.000	12,55%
208	Kab. Jombang	45.097.700.000	356.075.280.000	12,67%
209	Kab. Bogor	123.310.170.000	943.760.190.000	13,07%
210	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	22.468.930.000	171.817.460.000	13,08%
211	Kota Makassar	58.465.270.000	442.964.960.000	13,20%
212	Kota Cirebon	29.084.700.000	215.479.470.000	13,50%
213	Kab. Gresik	50.324.020.000	367.522.550.000	13,69%
214	Kab. Jepara	45.111.750.000	328.357.330.000	13,74%
215	Kota Malang	39.733.290.000	287.900.170.000	13,80%
216	Kab. Bangka	43.131.200.000	311.809.470.000	13,83%
217	Kab. Purwakarta	38.901.840.000	274.110.750.000	14,19%
218	Kab. Serang	60.183.780.000	402.685.330.000	14,95%
219	Kota Padang	52.951.300.000	330.834.590.000	16,01%
220	Kab. Gianyar	54.386.430.000	337.877.450.000	16,10%
221	Kota Surakarta	45.112.370.000	266.940.390.000	16,90%
222	Kab. Sidoarjo	85.738.560.000	496.333.580.000	17,27%

No	Kabupaten / Kota	PAD	Total Pendapatan	DOF
223	Kab. Luwu Utara	50.961.410.000	242.956.990.000	20,98%
224	Kota Cilegon	63.457.910.000	281.005.650.000	22,58%
225	Kota Denpasar	91.763.020.000	385.100.200.000	23,83%



LAMPIRAN 6

PENGHITUNGAN RASIO DOF

TAHUN 2003

No	Kabupaten / Kota	PAD	Total Pendapatan	DOF
1	Kab. Landak	1.975.270.000	185.167.300.000	1,07%
2	Kab. Bengkayang	2.156.140.000	172.461.390.000	1,25%
3	Kab. Bengkulu Selatan	4.595.160.000	256.459.930.000	1,79%
4	Kab. Kapuas Hulu	5.548.490.000	285.295.310.000	1,94%
5	Kab. Majene	2.999.050.000	147.379.470.000	2,03%
6	Kab. Kendari	6.756.100.000	315.291.590.000	2,14%
7	Kab. Maluku Tengah	7.942.330.000	368.608.810.000	2,15%
8	Kab. Dairi	4.742.510.000	217.284.450.000	2,18%
9	Kab. Poso	6.419.510.000	287.862.390.000	2,23%
10	Kab. Tapanuli Selatan	7.879.350.000	342.734.510.000	2,30%
11	Kab. Tanggamus	7.559.080.000	327.132.860.000	2,31%
12	Kab. Donggala	6.097.450.000	258.229.060.000	2,36%
13	Kab. Lampung Tengah	10.125.010.000	428.521.770.000	2,36%
14	Kab. Lampung Barat	5.394.420.000	226.777.330.000	2,38%
15	Kab. Tulang Bawang	6.862.730.000	286.416.340.000	2,40%
16	Kab. Banggai Kepulauan	4.115.490.000	166.147.250.000	2,48%
17	Kab. Toli-Toli	4.498.620.000	181.205.960.000	2,48%
18	Kab. Jeneponto	4.587.690.000	177.150.360.000	2,59%
19	Kab. Tapanuli Tengah	5.433.750.000	208.412.800.000	2,61%
20	Kab. Lampung Utara	7.863.210.000	298.859.210.000	2,63%
21	Kota Banda Aceh	6.352.490.000	235.566.580.000	2,70%
22	Kab. Halmahera Tengah	6.305.050.000	232.050.110.000	2,72%
23	Kab. Aceh Tenggara	5.016.250.000	179.372.110.000	2,80%
24	Kab. Tanjung Jabung Timur	6.318.830.000	223.571.670.000	2,83%
25	Kab. Minahasa	13.534.480.000	473.005.590.000	2,86%
26	Kab. Timor Tengah Utara	5.346.330.000	186.236.220.000	2,87%
27	Kab. Sintang	9.119.530.000	314.780.120.000	2,90%
28	Kab. Pontianak	8.914.560.000	307.242.860.000	2,90%
29	Kab. Lampung Selatan	11.928.100.000	409.780.770.000	2,91%
30	Kab. Sanggau	8.575.080.000	294.155.820.000	2,92%
31	Kab. Rejang Lebong	7.535.240.000	257.497.210.000	2,93%
32	Kab. Sambas	7.597.950.000	256.542.560.000	2,96%
33	Kab. Ketapang	10.241.430.000	324.804.760.000	3,15%
34	Kab. Selayar	4.124.560.000	130.724.760.000	3,16%
35	Kab. Sarolangun	6.726.230.000	201.709.770.000	3,33%
36	Kab. Lahat	10.138.540.000	303.585.820.000	3,34%
37	Kab. Banggai	8.457.620.000	249.433.510.000	3,39%
38	Kab. Ogan Komering Ilir	13.824.130.000	406.632.230.000	3,40%

No	Kabupaten / Kota	PAD	Total Pendapatan	DOF
39	Kab. Sampang	11.924.140.000	346.973.160.000	3,44%
40	Kab. Mamuju	7.947.110.000	227.305.030.000	3,50%
41	Kab. Tapanuli Utara	11.177.700.000	317.127.890.000	3,52%
42	Kab. Hulu Sungai Utara	7.349.250.000	207.038.140.000	3,55%
43	Kab. Soppeng	7.288.470.000	203.228.770.000	3,59%
44	Kota Ambon	8.178.230.000	227.706.750.000	3,59%
45	Kab. Banjar	9.256.060.000	244.398.080.000	3,79%
46	Kab. Tanah Karo	9.310.350.000	243.513.160.000	3,82%
47	Kota Bitung	5.803.330.000	151.058.040.000	3,84%
48	Kab. Tasikmalaya	18.659.210.000	484.827.820.000	3,85%
49	Kab. Ende	8.728.580.000	224.989.970.000	3,88%
50	Kab. Luwu	7.284.890.000	184.838.600.000	3,94%
51	Kab. Barito Utara	9.077.130.000	225.566.240.000	4,02%
52	Kab. Pesisir Selatan	9.680.360.000	239.026.250.000	4,05%
53	Kab. Pandeglang	14.770.230.000	363.338.270.000	4,07%
54	Kab. Buton	10.717.960.000	262.513.130.000	4,08%
55	Kab. Manggarai	11.687.260.000	285.454.630.000	4,09%
56	Kab. Bantaeng	6.187.770.000	150.795.940.000	4,10%
57	Kab. Lebak	14.118.670.000	335.065.180.000	4,21%
58	Kab. Lombok Tengah	12.415.670.000	293.397.200.000	4,23%
59	Kab. Pacitan	12.335.930.000	288.623.240.000	4,27%
60	Kab. Polewali Mamasa	7.301.240.000	169.009.230.000	4,32%
61	Kab. Ngada	8.373.040.000	188.851.770.000	4,43%
62	Kota Ternate	7.853.500.000	176.996.570.000	4,44%
63	Kab. Pinrang	9.099.690.000	204.920.080.000	4,44%
64	Kab. Klaten	22.288.970.000	499.848.530.000	4,46%
65	Kota Binjai	8.312.930.000	186.247.820.000	4,46%
66	Kab. Pamekasan	14.712.140.000	327.532.920.000	4,49%
67	Kab. Bangli	7.962.250.000	176.488.940.000	4,51%
68	Kab. Belu	10.003.010.000	218.698.530.000	4,57%
69	Kab. Solok	11.769.350.000	256.509.280.000	4,59%
70	Kota Palangka Raya	8.981.600.000	195.462.510.000	4,60%
71	Kab. Agam	11.183.070.000	241.638.450.000	4,63%
72	Kota Tebing Tinggi	8.051.560.000	170.883.770.000	4,71%
73	Kab. Sumba Barat	10.251.680.000	215.050.380.000	4,77%
74	Kota Banjar Baru	6.831.310.000	142.102.630.000	4,81%
75	Kab. Sumba Timur	9.166.190.000	190.296.640.000	4,82%
76	Kab. Ciamis	27.856.970.000	577.930.190.000	4,82%
77	Kab. Bone	15.952.400.000	328.083.420.000	4,86%
78	Kota Metro	10.098.040.000	207.354.950.000	4,87%
79	Kab. Padang Pariaman	11.113.230.000	227.368.040.000	4,89%
80	Kab. Buleleng	18.769.250.000	383.340.780.000	4,90%
81	Kab. Sikka	8.818.820.000	179.719.870.000	4,91%
82	Kab. Alor	9.359.670.000	189.193.890.000	4,95%
83	Kota Bengkulu	9.685.850.000	193.185.680.000	5,01%
84	Kab. Tanah Laut	8.539.150.000	170.270.740.000	5,02%

No	Kabupaten / Kota	PAD	Total Pendapatan	DOF
85	Kota Madiun	19.471.740.000	387.519.010.000	5,02%
86	Kab. Dompu	8.474.540.000	168.335.850.000	5,03%
87	Kab. Barito Kuala	9.297.930.000	182.580.480.000	5,09%
88	Kab. Tanah Datar	11.931.500.000	233.617.630.000	5,11%
89	Kab. Gunung Kidul	17.481.690.000	342.277.680.000	5,11%
90	Kota Sibolga	7.162.160.000	139.786.500.000	5,12%
91	Kab. Tapin	8.314.510.000	161.911.010.000	5,14%
92	Kab. Maros	10.694.550.000	204.298.430.000	5,23%
93	Kab. Kapuas	14.242.870.000	270.330.020.000	5,27%
94	Kab. Sinjai	8.900.060.000	168.337.390.000	5,29%
95	Kab. Muaro Jambi	10.782.480.000	*202.541.460.000	5,32%
96	Kab. Hulu Sungai Selatan	10.150.620.000	189.116.130.000	5,37%
97	Kota Jayapura	14.623.560.000	271.695.170.000	5,38%
98	Kab. Barru	8.739.340.000	158.852.370.000	5,50%
99	Kab. Blitar	21.761.010.000	394.124.110.000	5,52%
100	Kab. Trenggalek	19.248.620.000	348.604.030.000	5,52%
101	Kab. Brebes	25.288.380.000	457.563.180.000	5,53%
102	Kab. Toba Samosir	13.024.050.000	235.449.880.000	5,53%
103	Kab. Jembrana	11.055.960.000	197.832.170.000	5,59%
104	Kota Tanjung Balai	9.900.870.000	171.938.590.000	5,76%
105	Kota Sorong	15.262.010.000	264.054.790.000	5,78%
106	Kab. Asahan	22.626.590.000	387.840.600.000	5,83%
107	Kab. Sukoharjo	19.929.270.000	338.998.070.000	5,88%
108	Kab. Situbondo	15.614.020.000	265.186.190.000	5,89%
109	Kab. Hulu Sungai Tengah	11.677.760.000	193.491.570.000	6,04%
110	Kab. Majalengka	23.867.350.000	393.250.770.000	6,07%
111	Kab. Cianjur	31.687.980.000	521.110.520.000	6,08%
112	Kab. Sukabumi	32.227.520.000	528.221.870.000	6,10%
113	Kab. Wajo	14.788.530.000	240.827.990.000	6,14%
114	Kab. Gorontalo	18.212.470.000	295.738.650.000	6,16%
115	Kab. Ponorogo	23.873.500.000	386.841.660.000	6,17%
116	Kab. Pasaman	16.492.390.000	265.501.560.000	6,21%
117	Kota Padang Panjang	6.708.000.000	107.947.210.000	6,21%
118	Kab. Wonosobo	24.385.840.000	391.880.770.000	6,22%
119	Kab. Lombok Timur	22.175.080.000	356.030.300.000	6,23%
120	Kab. Sidenreng Rappang	12.603.160.000	202.313.980.000	6,23%
121	Kab. Madiun	18.704.250.000	300.121.500.000	6,23%
122	Kab. Tulungagung	26.259.270.000	418.537.270.000	6,27%
123	Kab. Probolinggo	23.705.400.000	374.988.330.000	6,32%
124	Kota Solok	7.262.070.000	114.434.340.000	6,35%
125	Kab. Kediri	33.195.970.000	522.242.460.000	6,36%
126	Kab. Temanggung	18.580.060.000	291.371.530.000	6,38%
127	Kab. Jember	37.592.270.000	588.230.310.000	6,39%
128	Kab. Malang	38.519.570.000	602.430.660.000	6,39%
129	Kab. Wonogiri	25.998.750.000	403.978.350.000	6,44%
130	Kab. Enrekang	10.430.390.000	160.980.980.000	6,48%

No	Kabupaten / Kota	PAD	Total Pendapatan	DOF
131	Kab. Tabalong	14.057.160.000	215.201.220.000	6,53%
132	Kab. Bangkalan	20.873.080.000	314.470.090.000	6,64%
133	Kota Palu	15.638.400.000	233.417.810.000	6,70%
134	Kota Pangkal Pinang	10.065.800.000	149.756.420.000	6,72%
135	Kab. Bondowoso	21.172.050.000	313.589.480.000	6,75%
136	Kab. Sangihe Talaud	10.494.760.000	155.412.910.000	6,75%
137	Kab. Labuhan Batu	26.031.700.000	385.059.380.000	6,76%
138	Kota Mojokerto	11.021.540.000	158.352.250.000	6,96%
139	Kab. Karanganyar	25.196.920.000	357.223.480.000	7,05%
140	Kab. Lumajang	25.775.030.000	361.890.440.000	7,12%
141	Kab. Kolaka	17.124.750.000	239.462.930.000	7,15%
142	Kota Kendari	13.893.280.000	192.817.020.000	7,21%
143	Kab. Kebumen	29.807.200.000	413.249.830.000	7,21%
144	Kab. Boalemo	11.336.550.000	157.052.880.000	7,22%
145	Kab. Lombok Barat	21.084.350.000	291.555.470.000	7,23%
146	Kab. Rembang	18.295.450.000	252.361.340.000	7,25%
147	Kab. Magetan	25.828.080.000	355.405.980.000	7,27%
148	Kab. Blora	26.933.910.000	366.173.380.000	7,36%
149	Kota Gorontalo	11.966.570.000	161.984.260.000	7,39%
150	Kab. Tanjung Jabung Barat	15.573.350.000	210.437.530.000	7,40%
151	Kab. Deli Serdang	52.076.450.000	696.442.160.000	7,48%
152	Kab. Timor Tengah Selatan	19.569.680.000	260.788.510.000	7,50%
153	Kab. Banjarnegara	25.303.140.000	336.000.750.000	7,53%
154	Kota Payakumbuh	13.715.900.000	181.954.500.000	7,54%
155	Kab. Purbalingga	28.300.570.000	374.536.210.000	7,56%
156	Kab. Pemalang	28.982.710.000	382.936.670.000	7,57%
157	Kab. Pekalongan	22.734.770.000	293.063.280.000	7,76%
158	Kota Sawahlunto	8.434.990.000	108.574.000.000	7,77%
159	Kota Pekalongan	13.679.480.000	172.741.670.000	7,92%
160	Kab. Lima Puluh Kota	17.302.180.000	218.034.570.000	7,94%
161	Kab. Karangasem	19.513.360.000	243.757.520.000	8,01%
162	Kab. Lamongan	32.314.670.000	398.809.990.000	8,10%
163	Kab. Kulon Progo	24.039.440.000	294.377.190.000	8,17%
164	Kota Jambi	23.436.360.000	284.531.480.000	8,24%
165	Kab. Gowa	21.865.200.000	264.694.770.000	8,26%
166	Kota Kupang	15.717.260.000	189.817.650.000	8,28%
167	Kab. Grobogan	37.296.070.000	449.518.390.000	8,30%
168	Kab. Kupang	20.671.980.000	248.356.310.000	8,32%
169	Kab. Batang	23.308.570.000	279.676.190.000	8,33%
170	Kab. Boyolali	32.781.310.000	389.246.880.000	8,42%
171	Kab. Bantul	32.882.340.000	389.393.970.000	8,44%
172	Kab. Cilacap	48.301.120.000	570.553.600.000	8,47%
173	Kab. Nganjuk	36.772.810.000	429.525.730.000	8,56%
174	Kota Mataram	18.086.490.000	211.104.290.000	8,57%
175	Kab. Cirebon	45.165.450.000	526.385.700.000	8,58%
176	Kab. Banyuwangi	41.969.840.000	488.445.510.000	8,59%

No	Kabupaten / Kota	PAD	Total Pendapatan	DOF
177	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	19.949.320.000	225.634.240.000	8,84%
178	Kab. Mojokerto	32.074.850.000	361.847.170.000	8,86%
179	Kab. Tebo	18.543.120.000	204.459.060.000	9,07%
180	Kota Pasuruan	15.754.180.000	173.316.840.000	9,09%
181	Kota Probolinggo	16.312.050.000	174.539.630.000	9,35%
182	Kab. Pasuruan	48.646.690.000	520.520.150.000	9,35%
183	Kab. Luwu Utara	23.828.810.000	253.880.760.000	9,39%
184	Kab. Banyumas	45.045.840.000	477.970.050.000	9,42%
185	Kota Bandar Lampung	35.511.800.000	369.344.390.000	9,61%
186	Kota Banjarmasin	29.166.010.000	302.579.300.000	9,64%
187	Kota Pare-Pare	15.185.940.000	157.054.270.000	9,67%
188	Kab. Batanghari	21.413.330.000	220.637.700.000	9,71%
189	Kab. Kendal	37.174.070.000	379.323.470.000	9,80%
190	Kab. Kotawaringin Barat	17.780.180.000	178.832.260.000	9,94%
191	Kab. Sumedang	41.752.450.000	418.748.870.000	9,97%
192	Kab. Bojonegoro	42.473.180.000	424.068.800.000	10,02%
193	Kab. Sragen	42.976.690.000	405.554.280.000	10,60%
194	Kab. Purwakarta	37.697.400.000	351.073.790.000	10,74%
195	Kab. Bangka	31.953.990.000	294.436.090.000	10,85%
196	Kab. Semarang	40.269.710.000	363.287.640.000	11,08%
197	Kab. Tabanan	34.584.290.000	308.759.240.000	11,20%
198	Kab. Bungo	28.021.240.000	249.345.280.000	11,24%
199	Kota Kediri	26.209.850.000	231.355.730.000	11,33%
200	Kota Pontianak	31.320.420.000	275.637.270.000	11,36%
201	Kota Manado	30.392.110.000	264.387.410.000	11,50%
202	Kota Blitar	19.283.720.000	163.399.780.000	11,80%
203	Kab. Gianyar	37.131.730.000	312.127.640.000	11,90%
204	Kota Cirebon	29.347.620.000	246.290.690.000	11,92%
205	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	25.466.800.000	212.412.780.000	11,99%
206	Kab. Kotawaringin Timur	29.016.330.000	239.621.130.000	12,11%
207	Kota Bogor	41.454.150.000	342.018.080.000	12,12%
208	Kab. Serang	61.863.020.000	503.816.530.000	12,28%
209	Kota Salatiga	20.181.960.000	163.267.290.000	12,36%
210	Kota Malang	42.094.970.000	335.700.870.000	12,54%
211	Kota Sukabumi	26.347.640.000	202.601.010.000	13,00%
212	Kota Magelang	23.567.460.000	178.643.720.000	13,19%
213	Kab. Tuban	54.481.560.000	407.373.300.000	13,37%
214	Kota Tegal	35.147.570.000	245.408.380.000	14,32%
215	Kota Makassar	78.684.690.000	531.596.740.000	14,80%
216	Kab. Jepara	53.740.240.000	359.871.690.000	14,93%
217	Kota Surakarta	54.815.680.000	356.483.580.000	15,38%
218	Kab. Gresik	59.811.700.000	388.497.840.000	15,40%
219	Kab. Jombang	70.114.760.000	444.639.310.000	15,77%
220	Kab. Belitung	22.005.780.000	138.836.880.000	15,85%
221	Kota Padang	63.932.550.000	396.783.110.000	16,11%
222	Kab. Bogor	148.921.780.000	845.677.870.000	17,61%

No	Kabupaten / Kota	PAD	Total Pendapatan	DOF
223	Kab. Sidoarjo	112.979.820.000	599.103.580.000	18,86%
224	Kota Denpasar	88.548.230.000	340.486.570.000	26,01%
225	Kota Cilegon	72.622.360.000	257.516.030.000	28,20%



LAMPIRAN 7

PENGHITUNGAN RASIO DOF

TAHUN 2004

No	Kabupaten / Kota	PAD	Total Pendapatan	DOF
1	Kab. Landak	2.167.140.000	199.818.520.000	1,08%
2	Kab. Majene	2.689.610.000	153.499.420.000	1,75%
3	Kab. Tulang Bawang	5.173.970.000	285.932.110.000	1,81%
4	Kab. Poso	5.722.070.000	292.035.530.000	1,96%
5	Kab. Tapanuli Selatan	7.115.020.000	336.823.510.000	2,11%
6	Kab. Halmahera Tengah	2.293.010.000	104.955.660.000	2,18%
7	Kab. Banggai Kepulauan	4.436.350.000	194.135.510.000	2,29%
8	Kab. Aceh Tenggara	4.366.310.000	189.641.720.000	2,30%
9	Kab. Lampung Barat	4.954.460.000	210.749.340.000	2,35%
10	Kab. Kapuas Hulu	6.002.250.000	254.164.770.000	2,36%
11	Kab. Lampung Tengah	10.165.310.000	410.358.590.000	2,48%
12	Kab. Bengkayang	4.187.000.000	168.047.130.000	2,49%
13	Kab. Tanggamus	8.769.700.000	343.821.740.000	2,55%
14	Kab. Selayar	3.810.770.000	148.528.240.000	2,57%
15	Kab. Tanjung Jabung Timur	5.977.540.000	228.830.740.000	2,61%
16	Kab. Dairi	4.648.780.000	177.358.380.000	2,62%
17	Kab. Toli-Toli	4.758.450.000	175.979.930.000	2,70%
18	Kab. Jenepono	5.183.920.000	187.012.330.000	2,77%
19	Kab. Pesisir Selatan	7.346.070.000	257.095.570.000	2,86%
20	Kab. Lampung Utara	8.244.670.000	288.492.050.000	2,86%
21	Kab. Ogan Komering Ilir	12.848.840.000	445.367.930.000	2,88%
22	Kab. Rejang Lebong	7.812.370.000	268.350.320.000	2,91%
23	Kab. Soppeng	6.084.120.000	195.428.970.000	3,11%
24	Kab. Pontianak	9.505.330.000	303.541.780.000	3,13%
25	Kab. Donggala	9.377.730.000	297.027.260.000	3,16%
26	Kab. Lampung Selatan	13.265.860.000	414.802.940.000	3,20%
27	Kab. Sarolangun	7.343.060.000	228.654.780.000	3,21%
28	Kab. Muaro Jambi	7.418.050.000	227.850.890.000	3,26%
29	Kab. Bengkulu Selatan	4.125.390.000	124.542.140.000	3,31%
30	Kab. Maluku Tengah	13.429.530.000	401.143.780.000	3,35%
31	Kab. Sanggau	10.343.170.000	305.186.700.000	3,39%
32	Kab. Pasaman	9.077.580.000	264.903.690.000	3,43%
33	Kab. Mamuju	5.791.040.000	166.795.630.000	3,47%
34	Kab. Tapanuli Tengah	6.817.910.000	191.622.970.000	3,56%
35	Kab. Ketapang	12.185.550.000	339.810.710.000	3,59%
36	Kab. Hulu Sungai Utara	5.152.530.000	138.716.760.000	3,71%
37	Kab. Buton	10.122.050.000	269.285.650.000	3,76%
38	Kab. Dompu	6.854.150.000	179.943.060.000	3,81%

No	Kabupaten / Kota	PAD	Total Pendapatan	DOF
39	Kab. Kolaka	10.134.170.000	263.870.340.000	3,84%
40	Kab. Timor Tengah Utara	7.616.150.000	196.197.540.000	3,88%
41	Kab. Sambas	10.267.950.000	263.991.260.000	3,89%
42	Kab. Tanah Karo	9.151.940.000	232.954.140.000	3,93%
43	Kab. Pacitan	11.659.730.000	296.437.400.000	3,93%
44	Kab. Solok	10.448.410.000	264.695.300.000	3,95%
45	Kab. Tasikmalaya	20.598.900.000	515.451.720.000	4,00%
46	Kab. Kapuas	11.009.710.000	274.228.510.000	4,01%
47	Kab. Bangli	7.395.410.000	181.940.570.000	4,06%
48	Kota Banda Aceh	9.456.710.000	231.151.990.000	4,09%
49	Kab. Sangihe Talaud	7.836.090.000	188.910.800.000	4,15%
50	Kab. Belu	9.754.550.000	235.056.420.000	4,15%
51	Kab. Pandeglang	15.055.510.000	359.204.840.000	4,19%
52	Kab. Boalemo	4.351.250.000	103.678.850.000	4,20%
53	Kota Sorong	11.299.680.000	267.545.750.000	4,22%
54	Kab. Lahat	14.325.900.000	333.299.280.000	4,30%
55	Kab. Tapanuli Utara	8.381.590.000	194.435.620.000	4,31%
56	Kab. Pinrang	9.233.440.000	214.077.670.000	4,31%
57	Kab. Sikka	8.454.410.000	194.576.310.000	4,35%
58	Kab. Lombok Tengah	13.555.980.000	306.447.320.000	4,42%
59	Kab. Ende	9.435.060.000	213.262.530.000	4,42%
60	Kota Surakarta	59.632.520.000	1.329.900.590.000	4,48%
61	Kab. Lima Puluh Kota	10.146.660.000	223.555.100.000	4,54%
62	Kab. Ngada	9.155.940.000	201.147.590.000	4,55%
63	Kab. Jembrana	9.724.580.000	208.031.260.000	4,67%
64	Kab. Situbondo	13.091.050.000	279.047.920.000	4,69%
65	Kab. Agam	11.681.140.000	248.917.630.000	4,69%
66	Kab. Bantaeng	6.983.050.000	147.252.410.000	4,74%
67	Kota Binjai	8.965.290.000	185.348.070.000	4,84%
68	Kab. Minahasa	13.630.200.000	277.843.160.000	4,91%
69	Kab. Sumba Barat	11.358.560.000	230.916.260.000	4,92%
70	Kab. Trenggalek	17.542.270.000	355.032.590.000	4,94%
71	Kab. Barito Kuala	9.299.000.000	187.127.570.000	4,97%
72	Kota Palangka Raya	10.107.040.000	200.960.650.000	5,03%
73	Kab. Barito Utara	8.855.090.000	176.057.490.000	5,03%
74	Kab. Luwu	10.104.750.000	200.851.370.000	5,03%
75	Kab. Bone	17.690.390.000	348.791.190.000	5,07%
76	Kab. Manggarai	11.507.840.000	223.503.720.000	5,15%
77	Kab. Sintang	17.005.360.000	329.777.260.000	5,16%
78	Kab. Hulu Sungai Tengah	10.269.470.000	198.648.950.000	5,17%
79	Kab. Tebo	11.169.750.000	215.807.090.000	5,18%
80	Kab. Sukabumi	29.804.880.000	570.634.860.000	5,22%
81	Kab. Banjar	13.555.810.000	255.658.890.000	5,30%
82	Kab. Alor	11.009.730.000	205.412.420.000	5,36%
83	Kab. Polewali Mamasa	10.787.190.000	200.940.330.000	5,37%
84	Kab. Klaten	27.047.600.000	501.906.040.000	5,39%

No	Kabupaten / Kota	PAD	Total Pendapatan	DOF
85	Kab. Brebes	25.735.110.000	476.469.220.000	5,40%
86	Kab. Gorontalo	12.059.970.000	220.943.060.000	5,46%
87	Kab. Blitar	22.222.400.000	405.266.700.000	5,48%
88	Kab. Pamekasan	16.794.920.000	305.924.440.000	5,49%
89	Kab. Toba Samosir	12.006.300.000	215.346.400.000	5,58%
90	Kota Ternate	10.366.960.000	184.820.020.000	5,61%
91	Kab. Lebak	18.990.270.000	337.204.820.000	5,63%
92	Kab. Sumba Timur	11.715.810.000	207.886.280.000	5,64%
93	Kab. Buleleng	19.289.920.000	342.268.130.000	5,64%
94	Kab. Wajo	13.550.270.000	240.005.930.000	5,65%
95	Kab. Probolinggo	19.561.780.000	345.887.860.000	5,66%
96	Kab. Maros	12.027.550.000	210.483.340.000	5,71%
97	Kab. Gunung Kidul	19.715.650.000	340.447.500.000	5,79%
98	Kab. Banggai	13.966.500.000	239.768.290.000	5,82%
99	Kab. Majalengka	25.303.590.000	433.218.450.000	5,84%
100	Kab. Ciamis	32.368.070.000	550.373.920.000	5,88%
101	Kab. Barru	10.014.350.000	170.067.840.000	5,89%
102	Kab. Tulungagung	27.209.730.000	461.267.590.000	5,90%
103	Kota Metro	10.511.500.000	177.360.960.000	5,93%
104	Kab. Asahan	22.876.080.000	383.833.890.000	5,96%
105	Kab. Enrekang	10.463.560.000	174.961.790.000	5,98%
106	Kota Bitung	9.444.720.000	157.792.580.000	5,99%
107	Kab. Malang	37.720.880.000	627.242.260.000	6,01%
108	Kab. Hulu Sungai Selatan	11.916.410.000	197.977.940.000	6,02%
109	Kab. Wonogiri	25.290.370.000	419.984.770.000	6,02%
110	Kab. Kebumen	26.264.660.000	434.678.640.000	6,04%
111	Kab. Tapin	10.917.660.000	178.776.730.000	6,11%
112	Kab. Sukoharjo	21.701.840.000	354.676.300.000	6,12%
113	Kab. Jember	37.592.270.000	611.399.110.000	6,15%
114	Kota Jayapura	16.683.190.000	269.002.730.000	6,20%
115	Kab. Bangkalan	20.568.370.000	330.195.550.000	6,23%
116	Kota Tanjung Balai	8.840.190.000	141.883.000.000	6,23%
117	Kota Tebing Tinggi	9.701.880.000	154.770.590.000	6,27%
118	Kota Sibolga	7.972.800.000	126.486.290.000	6,30%
119	Kota Madiun	16.647.370.000	261.211.920.000	6,37%
120	Kab. Ponorogo	24.579.700.000	385.485.870.000	6,38%
121	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	14.352.310.000	224.254.190.000	6,40%
122	Kab. Madiun	19.995.170.000	312.198.210.000	6,40%
123	Kab. Sidenreng Rappang	13.552.510.000	207.072.830.000	6,54%
124	Kab. Temanggung	19.572.480.000	298.535.230.000	6,56%
125	Kab. Tanah Datar	15.390.490.000	233.803.630.000	6,58%
126	Kab. Padang Pariaman	15.840.390.000	238.871.210.000	6,63%
127	Kab. Pematang	26.905.820.000	403.790.970.000	6,66%
128	Kab. Kulon Progo	19.834.960.000	296.569.120.000	6,69%
129	Kab. Sinjai	12.226.300.000	182.672.050.000	6,69%
130	Kab. Lombok Timur	26.131.200.000	386.683.410.000	6,76%

No	Kabupaten / Kota	PAD	Total Pendapatan	DOF
131	Kab. Bondowoso	21.172.050.000	313.044.420.000	6,76%
132	Kota Solok	8.546.780.000	125.681.370.000	6,80%
133	Kab. Cianjur	38.691.450.000	565.060.890.000	6,85%
134	Kab. Rembang	18.715.700.000	271.447.580.000	6,89%
135	Kota Banjar Baru	10.510.910.000	152.048.670.000	6,91%
136	Kab. Kendari	14.112.540.000	203.783.700.000	6,93%
137	Kota Kendari	14.112.540.000	203.783.700.000	6,93%
138	Kab. Tanah Laut	13.243.900.000	190.695.830.000	6,95%
139	Kab. Batanghari	18.269.270.000	262.961.280.000	6,95%
140	Kab. Kediri	34.356.030.000	492.526.000.000	6,98%
141	Kab. Magetan	24.202.190.000	343.496.560.000	7,05%
142	Kab. Labuhan Batu	27.500.450.000	389.771.320.000	7,06%
143	Kota Padang Panjang	8.334.180.000	117.527.670.000	7,09%
144	Kab. Gowa	19.841.510.000	278.744.770.000	7,12%
145	Kab. Deli Serdang	46.169.040.000	645.753.120.000	7,15%
146	Kab. Tabalong	16.356.100.000	226.006.280.000	7,24%
147	Kab. Tanjung Jabung Barat	16.065.480.000	220.787.060.000	7,28%
148	Kota Mojokerto	12.194.330.000	166.463.660.000	7,33%
149	Kab. Banyuwangi	36.279.150.000	494.501.230.000	7,34%
150	Kota Palu	18.945.810.000	250.357.190.000	7,57%
151	Kota Bengkulu	15.495.500.000	204.167.350.000	7,59%
152	Kab. Lombok Barat	23.048.680.000	303.670.530.000	7,59%
153	Kota Pasuruan	13.210.250.000	173.659.980.000	7,61%
154	Kab. Wonosobo	23.869.510.000	312.255.570.000	7,64%
155	Kab. Bantul	30.777.820.000	398.879.890.000	7,72%
156	Kota Mataram	17.277.300.000	222.448.060.000	7,77%
157	Kab. Karangasem	19.762.680.000	253.273.150.000	7,80%
158	Kab. Timor Tengah Selatan	20.364.290.000	260.738.610.000	7,81%
159	Kab. Lumajang	27.879.620.000	356.692.160.000	7,82%
160	Kab. Karanganyar	29.485.260.000	373.132.450.000	7,90%
161	Kab. Blora	29.530.460.000	371.605.620.000	7,95%
162	Kab. Grobogan	37.038.760.000	453.262.650.000	8,17%
163	Kab. Lamongan	34.010.840.000	413.414.600.000	8,23%
164	Kab. Cirebon	48.221.230.000	581.585.240.000	8,29%
165	Kab. Sampang	23.799.440.000	285.746.990.000	8,33%
166	Kab. Purbalingga	28.619.780.000	343.353.600.000	8,34%
167	Kab. Kendal	31.671.370.000	379.727.590.000	8,34%
168	Kota Sawahlunto	9.871.720.000	117.891.510.000	8,37%
169	Kota Pangkal Pinang	13.432.970.000	159.937.990.000	8,40%
170	Kab. Batang	23.610.800.000	280.568.880.000	8,42%
171	Kab. Nganjuk	35.292.960.000	406.160.770.000	8,69%
172	Kab. Pekalongan	27.224.990.000	311.781.790.000	8,73%
173	Kota Pekalongan	15.864.600.000	181.052.920.000	8,76%
174	Kab. Kupang	22.998.210.000	261.643.360.000	8,79%
175	Kab. Banjarnegara	30.622.370.000	346.486.270.000	8,84%
176	Kota Gorontalo	16.589.980.000	186.190.730.000	8,91%

No	Kabupaten / Kota	PAD	Total Pendapatan	DOF
177	Kota Ambon	21.895.180.000	245.373.060.000	8,92%
178	Kab. Boyolali	36.960.020.000	403.038.390.000	9,17%
179	Kab. Bojonegoro	38.419.510.000	417.136.170.000	9,21%
180	Kab. Mojokerto	34.050.070.000	364.188.610.000	9,35%
181	Kab. Bungo	20.821.710.000	218.180.950.000	9,54%
182	Kab. Banyumas	51.224.310.000	524.312.690.000	9,77%
183	Kota Pare-Pare	16.951.970.000	173.176.180.000	9,79%
184	Kota Bandar Lampung	36.689.580.000	368.985.450.000	9,94%
185	Kab. Luwu Utara	16.230.850.000	161.720.230.000	10,04%
186	Kab. Cilacap	53.499.090.000	529.583.870.000	10,10%
187	Kota Probolinggo	18.526.310.000	173.681.780.000	10,67%
188	Kota Jambi	32.133.200.000	300.996.360.000	10,68%
189	Kab. Kotawaringin Barat	21.585.910.000	200.504.310.000	10,77%
190	Kab. Sumedang	50.118.890.000	463.961.840.000	10,80%
191	Kab. Sragen	43.547.110.000	395.271.900.000	11,02%
192	Kab. Pasuruan	61.382.590.000	548.712.180.000	11,19%
193	Kab. Purwakarta	39.807.320.000	350.174.190.000	11,37%
194	Kab. Semarang	44.634.640.000	380.755.120.000	11,72%
195	Kota Payakumbuh	20.121.310.000	166.410.660.000	12,09%
196	Kota Banjarmasin	38.328.020.000	314.965.410.000	12,17%
197	Kota Pontianak	34.774.390.000	282.899.610.000	12,29%
198	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	26.904.300.000	218.105.640.000	12,34%
199	Kota Manado	34.576.450.000	279.439.540.000	12,37%
200	Kota Magelang	22.628.700.000	178.861.460.000	12,65%
201	Kab. Jepara	47.266.550.000	372.049.230.000	12,70%
202	Kota Sukabumi	26.949.810.000	211.420.070.000	12,75%
203	Kab. Serang	67.966.520.000	529.596.790.000	12,83%
204	Kab. Bangka	20.136.340.000	154.246.380.000	13,05%
205	Kota Bogor	50.644.040.000	384.455.000.000	13,17%
206	Kota Cirebon	32.858.910.000	246.930.100.000	13,31%
207	Kota Salatiga	21.619.400.000	161.978.610.000	13,35%
208	Kab. Tabanan	43.358.860.000	318.840.720.000	13,60%
209	Kab. Kotawaringin Timur	35.820.690.000	263.323.900.000	13,60%
210	Kab. Belitung	19.541.530.000	141.724.260.000	13,79%
211	Kab. Gresik	59.811.700.000	425.841.800.000	14,05%
212	Kab. Tuban	59.557.250.000	421.734.140.000	14,12%
213	Kota Malang	50.007.310.000	352.644.070.000	14,18%
214	Kota Blitar	25.333.020.000	173.148.090.000	14,63%
215	Kota Makassar	85.074.920.000	557.505.310.000	15,26%
216	Kota Kediri	37.442.390.000	236.195.490.000	15,85%
217	Kota Kupang	35.662.320.000	215.806.190.000	16,53%
218	Kota Padang	68.646.570.000	413.377.790.000	16,61%
219	Kota Tegal	42.359.750.000	255.045.400.000	16,61%
220	Kab. Gianyar	49.738.940.000	298.649.180.000	16,65%
221	Kab. Bogor	166.260.110.000	991.691.770.000	16,77%
222	Kab. Jombang	70.114.760.000	416.319.780.000	16,84%

No	Kabupaten / Kota	PAD	Total Pendapatan	DOF
223	Kab. Sidoarjo	118.757.990.000	648.328.700.000	18,32%
224	Kota Denpasar	90.827.790.000	349.335.190.000	26,00%
225	Kota Cilegon	84.879.320.000	258.641.880.000	32,82%

